PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

KABUPATEN TANAH DATAR

TAHUN 2024



Batusangkar

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD Kabupaten Tanah Datar memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA, tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini telah disusun sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar menjadi amal jariyah bagi kita semua serta senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk dan ridho Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.

Batusangkar, Maret 2025

BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA, SE, MM

DAFTAR ISI

				Halaman
KATA PENGANTAR				i
DAFTAR ISI				iii
DAFTAR TABEL				iv
BAB	I	PENDAHULUAN		
		1.1	Latar Belakang	I-1
			1.1.1 Penjelasan Umum	I-3
			1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-23
			1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-54
BAB	II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
		2.1	Capaian Kinerja Makro	II-1
		2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-4
		2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-79
BAB	III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		
		3.1	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah ..	III-1
BAB	IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		IV-1
BAB	V	PENUTUP		V-1

DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL		HALAMAN
1.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan	.....	I-4
1.2	Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	.....	I-5
1.3	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (2023-2024)	.....	I-5
1.4	Komposisi Penduduk Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Kepadatan (2023-2024)	.....	I-6
1.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Proporsi Angkatan Kerja Tahun 2023	.....	I-6
1.6	Daftar UPTD Kabupaten Tanah Datar	.....	I-8
1.7	ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	.....	I-10
1.8	ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Perangkat Daerah Tahun 2023	.....	I-10
1.9	ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2024	.....	I-12
1.10	Sebaran ASN pada Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2024	.....	I-12
1.11	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	.....	I-14
1.12	Sebaran ASN pada Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	.....	I-14
1.13	ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2024	.....	I-16
1.14	Sebaran ASN pada Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2024	.....	I-16
1.15	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023	.....	I-18
1.16	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024	.....	I-18
1.17	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024	.....	I-19
2.1	Capaian Kinerja Makro Tahun 2023-2024	.....	II-1
2.2	Matriks Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026	.....	II-80
2.3	Tema dan Prioritas Pembangunan	.....	II-86
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	.....	II-87

2.5	Program dan Anggaran Pembangunan Tahun 2024	.....	II-89
2.6	Pengukuran Kinerja Tahun 2024	.....	II-96
2.7	Jumlah Hafiz/Hafizah 2021 – 2024	.....	II-100
2.8	Peningkatan Lembaga Adat dan Budaya yang Aktif	.....	II-104
2.9	Produksi Pertanian Tahun 2021 – 2024	.....	II-109
2.10	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024	.....	II-110
2.11	Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2024	.....	II-111
2.12	Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2024	.....	II-112
2.13	Produksi Peternakan Tahun 2024	.....	II-113
2.14	Produksi Perikanan Tahun 2022 – 2024	.....	II-115
2.15	Produksi Ikan Budidaya 2021 – 2024	.....	II-116
2.16	Data Industri Kecil dan Menengah 2021 - 2024	.....	II-121
2.17	Jumlah Wirausaha Baru 2024	.....	II-129
2.18	Tabel Jumlah Sekolah dan Akreditasinya	.....	II-132
2.19	Pendidikan Guru SD dan SMP Tahun 2024	.....	II-133
2.20	Angka Partisipasi Murni 2021 – 2024	.....	II-133
2.21	Perbandingan Prevelansi Stunting kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional	.....	II-138
2.22	Tabel Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumbar Tahun 2022-2024	.....	II-141
2.23	Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 – 2024 per Objek Wisata	.....	II-145
2.24	Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 - 2024	.....	II-153
2.25	Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	.....	II-149
2.26	Aplikasi yang telah terintegrasi	.....	II-160
2.27	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	.....	II-169
2.28	Indikator Persentase Infrastruktur Wilayah yang berkualitas	.....	II-170
2.29	Indikator IKLH 2024	.....	II-176
2.30	Target dan Realisasi Indeks Kualitas Air	.....	II-177
2.31	Target dan Realisasi Capaian Indeks Kualitas Udara	.....	II-178
2.32	Target dan Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lahan	.....	II-179
2.33	Jumlah Bencana yang Ditangani Tahun 2021 - 2024	.....	II-183
2.34	Program dan Realisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2024	.....	II-185
4.1	Target Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024	.....	IV-1
4.2	Target Pencapaian SPM Sekolah Dasar Tahun 2024	.....	IV-2
4.3	Target Pencapaian SPM Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024	.....	IV-2

4.4	Target Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024	.....	IV-3
4.5	Realisasi SPM Pendidikan PAUD	.....	IV-4
4.6	Realisasi SPM Pendidikan SD	.....	IV-4
4.7	Realisasi SPM Pendidikan SMP	.....	IV-5
4.8	Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan	.....	IV-5
4.9	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan	.....	IV-6
4.10	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan	.....	IV-9
4.11	Permasalahan Dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan	.....	IV-9
4.12	Target Rekapitulasi SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Datar	.....	IV-12
4.13	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan	.....	IV-23
4.14	Target SPM Urusan Pekerjaan Umum	.....	IV-24
4.15	Jumlah Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum	.....	IV-26
4.16	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pekerjaan Umum	.....	IV-27
4.17	Target dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	.....	IV-28
4.18	Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	.....	IV-29
4.19	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat	.....	IV-30
4.20	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat	.....	IV-30
4.21	Target SPM Sub Urusan Trantibum	.....	IV-31
4.22	Target SPM Sub Urusan Kebencanaan (BPBD)	.....	IV-34
4.23	Realisasi dan Penerapan SPM Trantibum	.....	IV-35
4.24	Realisasi SPM Damkar	.....	IV-36
4.25	Realisasi dan Penerapan SPM Kebencanaan	.....	IV-37
4.26	Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Trantibum (Satpol-PP) dan Damkar	.....	IV-38
4.27	Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Bencana pada BPBD	.....	IV-39
4.28	Jumlah Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak Satuan Polisi Pamong Paja dan Pemadam Kebakaran	.....	IV-40
4.29	Eselon pada Satuan Polisi Pamong Paja dan Pemadam Kebakaran	.....	IV-40
4.30	Target Penerapan SPM Urusan Sosial	.....	IV-42
4.31	Realisasi Penerapan SPM Urusan Sosial	.....	IV-46
4.32	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial	.....	IV-48
4.33	Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Sosial	.....	IV-49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjelaskan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Adapun dasar hukum penyusunan LPPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
BAB V Penutup

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

b. Data Geografis Wilayah

1) Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis terletak pada $00^0$17’ LS-$00^0$39’ LS dan 100^0 19’ BT-100^0 51’ BT.

2) Batas Administrasi Daerah

Batas administrasi Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Padang Pariaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

3) Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Nagari

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah $\pm$1.377,19 Km^2 atau 137.719 Ha, atau sekitar 3,26% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 19.929 Ha atau 14,47%, sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 2.631 Ha atau 1,91%. Wilayah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	X Koto	14.869	10,80	9	41
2.	Batipuh	10.118	7,35	8	49
3.	Rambatan	12.939	9,40	5	33
4.	Lima Kaum	3.064	2,22	5	33
5.	Tanjung Emas	12.875	9,35	4	19
6.	Lintau Buo	11.065	8,04	4	22
7.	Sungayang	6.837	4,96	5	14
8.	Sungai Tarab	8.387	6,09	10	32
9.	Pariangan	5.830	4,23	6	21
10.	Salimpaung	5.635	4,09	6	27
11.	Padang Ganting	6.861	4,98	2	7
12.	Tanjung Baru	2.631	1,91	2	17
13.	Lintau Buo Utara	19.929	14,47	5	63
14.	Batipuah Selatan	16.679	12,11	4	17
Jumlah		1.377,19	100,00	75	395

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

4) Topografis dan Penggunaan Lahan

Kondisi topografi Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Marapi, Singgalang dan Sago serta diperkaya pula dengan lima sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Kabupaten Tanah Datar sebagian besar berada di ketinggian 200-800 mdpl dengan luas 86.960 Ha atau 62,52% dari total luas keseluruhan, sedangkan wilayah di ketinggian 2601-3200 mdpl dengan luas 354 Ha atau 0,25% dari total luas keseluruhan Kabupaten Tanah Datar.

Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan 137.719 Ha, didominasi hutan rimba seluas 60.253 Ha (43,75%) dan lahan sawah seluas 24.850 Ha (18,04%). Lahan pertanian selain sawah yaitu tegalan/ladang seluas 12.349 Ha (9,03%) dan perkebunan seluas 18.814 Ha (13,66%). Penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut:

c. Jumlah Penduduk

1) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 tercatat sebanyak 382.674 jiwa. Kepadatan penduduk 277,87 per Km2. Jumlah dan kepadatan penduduk masing-masing kecamatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Penduduk			Kepadatan Penduduk per Km^2
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	
1.	X Koto	152.02	22770	22,347	45117	296.78
2.	Batipuh	144.26	15687	15859	31546	218.67
3.	Rambatan	129.15	19759	19390	39149	303.13
4.	Lima Kaum	50	20419	20450	40869	817.38
5.	Tanjung Emas	112.05	12810	12844	25654	228.95
6.	Lintau Buo	60.22	10212	10157	20369	338.24
7.	Sungayang	65.45	9688	9803	19491	297.80
8.	Sungai Tarab	71.85	17136	16870	34006	473.29
9.	Pariangan	76.43	10490	10688	21178	277.09
10.	Salimpaung	60.88	12365	12505	24870	408.51
11.	Padang Ganting	83.5	7352	7622	14974	179.33
12.	Tanjung Baru	43.14	7517	7401	14918	345.80
13.	Lintau Buo Utara	204.32	19580	19411	38991	190.83
14.	Batipuh Selatan	82.73	5728	5814	11542	139.51
Tanah Datar		1377.186	191.513	191.161	382.674	277.87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

2) Komposisi Penduduk

a) Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dari 380.727 jiwa menjadi 382.674 jiwa pada tahun 2024. Komposisi penduduk laki-laki mengalami peningkatan, tahun 2023 berjumlah 190.188 jiwa atau 49,95% sedangkan tahun 2024 menjadi 191.513 jiwa atau 50,04%, komposisi penduduk perempuan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2023 sebanyak 190.539 jiwa atau 50,05% dan pada tahun 2023 menjadi 191.161 jiwa atau 49,95%. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (2023-2024)

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%
2023	380.727	190.188	49,95	190.539	50,05
2024	382.674	191.513	50,04	191.161	49,95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024

b) Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan dari 380.727 jiwa pada tahun 2023 menjadi 382.674 jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,51% seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Kepadatan 2023-2024

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan %	Luas Wilayah (KM^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM^2)
2023	380.727	1,24	137.716,76	276.46
2024	382.674	0,51	1.377	277,87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024

c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Proporsi Angkatan Kerja

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Proporsi Angkatan Kerja Tahun 2024

NO	Kecamatan	Penduduk Tidak Bekerja	Penduduk Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Tenaga Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/7*100)
1.	X Koto	1.293	12.254	13.547	16.822	30.369	44.61
2.	Batipuh	1.225	8.256	9.481	11.486	20.967	45.22
3.	Rambatan	1.288	10.326	11.614	14.444	26.058	44.57
4.	Lima Kaum	1.406	12.451	13.857	13.944	27.801	49.84
5.	Tanjung Emas	828	7.100	7.928	9.387	17.315	45.79
6.	Lintau Buo	727	5.392	6.119	7.717	13.836	44.23
7.	Sungayang	535	5.266	5.801	7.119	12.920	44.90
8.	Sungai Tarab	1.209	9.226	10.435	12.230	22.665	46.04
9.	Pariangan	624	6.123	6.747	7.419	14.166	47.63
10.	Salimpaung	686	6.513	7.199	9.231	16.430	43.82
11.	Padang Ganting	529	3.911	4.440	5.498	9.938	44.68
12.	Tanjung Baru	519	3.784	4.303	5.615	9.918	43.39
13.	Lintau Buo Utara	1.701	9.897	11.598	14.432	26.030	44.56
14.	Batipuh Selatan	425	2.952	3.377	4.533	7.910	42.69
Jumlah		12.995	103.451	116.446	139.877	256.323	631.97
Rata-rata				-	-	-	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
Ket.: Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

a) Jumlah Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 sebanyak 41 Perangkat Daerah namun baru bisa terlaksana pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
c. Inspektorat Daerah

a. Dinas

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Dinas Pangan dan Perikanan
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15. Dinas Pertanian
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
17. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

b. Badan

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

c. Kecamatan

1. Kecamatan X Koto
2. Kecamatan Batipuh
3. Kecamatan Rambatan
4. Kecamatan Lima Kaum
5. Kecamatan Tanjung Emas
6. Kecamatan Lintau Buo
7. Kecamatan Sungayang
8. Kecamatan Sungai Tarab
9. Kecamatan Pariangan
10. Kecamatan Salimpaung
11. Kecamatan Padang Ganting
12. Kecamatan Tanjung Baru
13. Kecamatan Lintau Buo Utara
14. Kecamatan Batipuh Selatan

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Rumah Sakit Umum Daerah

Selain dari 41 perangkat daerah, sampai tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki 384 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6
Daftar UPTD Kabupaten Tanah Datar

No	Uraian	Dasar Hukum
1.	Satuan Pendidikan Non Formal (2 UPT SKB)	Perbup Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (300 UPT Sekolah Dasar)	Perbup Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (49 UPT Sekolah Menengah Pertama)	Perbup Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	UPT Puskesmas (23 Puskesmas)	Perbup Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan
5.	UPT Instalasi Farmasi	Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan

No	Uraian	Dasar Hukum
6.	UPT Laboratorium Konstruksi dan UPT Alat Berat dan Perbengkelan	Perbup Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Laboratorium Konstruksi dan Alat Berat dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
7.	UPT Kebersihan dan Persampahan	Perbup Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
8.	UPT Balai Latihan Kerja	Perbup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
9.	UPT Balai Benih Ikan	Perbup Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Perikanan
10.	UPT Pusat Kesehatan Hewan	Perbup Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian
11.	UPT Pengelolaan Pasar	Perbup Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
12.	UPT Pengelolaan Sentra Tenun	Perbup Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan UPT Pengelolaan Sentra Tenun pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
13.	UPTD Metrologi Legal	Perbup Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
14.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Perbup Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Pegawai Pemerintah

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar kondisi 31 Desember 2024 berjumlah 5.847 orang seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
ASN berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Laki-Laki	1.531	26,18
2.	Perempuan	4.316	73,81
	Jumlah	**5.847**	**100,0**

Sumber : BKPSDM Tahun 2024

ASN berdasarkan jenis kelamin pada perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
ASN berdasarkan Jenis Kelamin pada Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	60	51	111
2.	Sekretariat DPRD	13	8	21
3.	Inspektorat Daerah	18	29	47
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	23	18	41
5.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	21	30
6.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	17	22	39
7.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11	16	27
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	5	22
9.	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	7	9	16
10.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	772	2.746	3.518
11.	Dinas Kesehatan	96	680	776
12.	Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan	52	13	65
13.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	15	16	31
14.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	56	5	61
15.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12	20	32
16.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10	11	21
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10	17	27

No	OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
18.	Dinas Perhubungan	32	11	43
19.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12	15	27
20.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	14	28
21.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	20	26
22.	Dinas Pangan dan Perikanan	17	11	28
23.	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	16	17	33
24.	Dinas Pertanian	54	74	128
25.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	15	11	26
26.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	20	13	33
27.	Rumah Sakit Umum Daerah	75	360	435
28.	Kantor Camat Rambatan	4	4	8
29.	Kantor Camat X Koto	5	8	13
30.	Kantor Camat Pariangan	7	5	12
31.	Kantor Camat Lima Kaum	5	5	10
32.	Kantor Camat Tanjung Emas	4	5	9
33.	Kantor Camat Sungayang	3	7	10
34.	Kantor Camat Sungai Tarab	6	5	11
35.	Kantor Camat Salimpaung	5	6	11
36.	Kantor Camat Lintau Buo Utara	6	4	10
37.	Kantor Camat Lintau Buo	5	6	11
38.	Kantor Camat Padang Ganting	4	5	9
39.	Kantor Camat Tanjung Baru	4	7	11
40.	Kantor Camat Batipuh Selatan	6	5	11
41.	Kantor Camat Batipuh	3	6	9
42.	Penugasan Diluar Instansi	4	2	6
43.	CLTN	1	3	4
JUMLAH		1.531	4.316	5.847

Sumber: BKPSDM Tahun 2024

Dari 5.847 ASN tersebut terdiri atas 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu 4.215 PNS dan 1.632 PPPK. Dengan rincian berdasarkan golongan ruang kepangkatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9
ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Kepangkatan
Tahun 2024

NO	JENIS KEPEGAWAIAN/ GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	PNS	4.215
	a. Golongan I	37
	b. Golongan II	666
	c. Golongan III	2.717
	d. Golongan IV	795
2.	PPPK	1.632
	a. Golongan V	37
	b. Golongan VII	200
	c. Golongan IX	1.367
	a. Golongan X	28
Jumlah		5.847

Sumber: BKPSDM Tahun 2024

Selanjutnya sebaran ASN pada perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Kepangkatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Sebaran ASN pada Perangkat Daerah
Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2024

NO	SOPD	PNS															PPPK				JML
		I/B	I/C	I/D	II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	IV/C	IV/D	V	VII	IX	X	
1	Sekretariat Daerah		2	1	1	8	5	20	16	12	24	1	8	6	1				6		111
2	Sekretariat DPRD			1				3	5	2	6	2	1	1							21
3	Inspektorat Daerah							2	12	3	12	12	4	1	1						47
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan					1		7	4	4	14	8	1	1		1					41
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					2	1	3	6		11	4	2	1							30
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					1	1	4	7	3	13	4	2	1					3		39
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3	3	2	6	3	3	1	1					5		27
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					1	2	2	5	5	4	1	1	1							22
9	Badan Kesatuan Bangsa & Politik					2			3	1	4	1	1	1					3		16
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2	2	9	11	20	14	130	359	353	508	172	414	246					1278		3518
11	Dinas Kesehatan	1		3	1	28	124	30	107	141	143	41	18	7				90	27	15	776
12	Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan			1	1	7	8	11	14	5	13	4	1								65

NO	SOPD	PNS															PPPK				JML
		I/B	I/C	I/D	II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	IV/C	IV/D	V	VII	IX	X	
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup				2	1		5	7	1	9	4	1	1							31
14	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1		1		6	2	11	7	4	4	3	1	1			20				61
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					2		3	5	3	11	4	4								32
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					2		3	2	2	7	3	1	1							21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						6	2	2	6	5	3	3								27
18	Dinas Perhubungan					9	1	13	7	2	6	2	1	1		1					43
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika						3	2	4	1	6	2	1	1					7		27
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu					1		6	2	2	9	3	2					1	2		28
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan					3	5	4	3		6	3		2							26
22	Dinas Pangan dan Perikanan					1	2	5		5	9	3	1	1					1		28
23	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga					1	2	3	5	5	8	2	2	1					4		33
24	Dinas Pertanian						2	10	20	9	19	13	2	2			17	4	29	1	128
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	1				2	1	1	6	7	4	1	1	1					1		26
26	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1	1		1	1	5	6	6	8	3		1							33
27	Rumah Sakit Umum Daerah	3		4		10	25	12	39	70	95	25	24	10				105	1	12	435
28	Kantor Camat Rambatan						1		2	1	2	2									8
29	Kantor Camat X Koto					1	3		2		7										13
30	Kantor Camat Pariangan							2	4	3	1	2									12
31	Kantor Camat Lima Kaum			1						3	5	1									10
32	Kantor Camat Tanjung Emas						2		2	2	2	1									9
33	Kantor Camat Sungayang						1	1	1	1	5		1								10
34	Kantor Camat Sungai Tarab						2		4	1	3	1									11
35	Kantor Camat Salimpaung			1			1		2	3	2	2									11
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara						2	2		3	2		1								10
37	Kantor Camat Lintau Buo	1					2		5	1	1	1									11
38	Kantor Camat Padang Ganting				1		1	1		3	2		1								9
39	Kantor Camat Tanjung Baru					1	1			3	3	3									11
40	Kantor Camat Batipuh Selatan					1	1	1		2	4	2									11
41	Kantor Camat Batipuh							2	1	2	3	1									9
42	Penugasan Diluar Instansi							1	1	2	1	1									6
43	CLTN					1		1		2											4
	Jumlah	**9**	**5**	**23**	**17**	**113**	**225**	**311**	**679**	**690**	**1.004**	**344**	**501**	**290**	**2**	**2**	**37**	**200**	**1.367**	**28**	**5.847**

Sumber : BKPSDM Tahun 2024

ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2024 terlihat pada tabel 1.11. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan persentase terbanyak yakni lulusan S1 dengan jumlah 3.889 orang atau 66,59% dari jumlah ASN.

Tabel 1.11
ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	SD	18
2.	SLTP	25
3.	SLTA	293
4.	D I	2
5.	D II	54
6.	D III	841
7.	D IV	138
8.	SARJANA	4.179
9.	PASCA SARJANA	297
JUMLAH		5.847

Sumber : BKPSDM Tahun 2024

Sebaran ASN pada perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.12
Sebaran ASN pada Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO	OPD	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	SI	S2	JML
1	Sekretariat Daerah	1	2	16			8	11	58	15	111
2	Sekretariat DPRD	1		3			1	1	13	2	21
3	Inspektorat Daerah						1	1	37	8	47
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan			1			2	2	25	11	41
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			2			4	1	17	6	30
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			5			6		24	4	39
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1			4		20	2	27
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			4			1		15	2	22
9	Badan Kesatuan Bangsa & Politik			2			1	2	9	2	16
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4	9	68	1	50	19	1	3.280	86	3.518
11	Dinas Kesehatan	4		30	1		461	69	170	41	776

NO	OPD	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	SI	S2	JML
12	Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan		1	16			10		27	11	65
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup		2	3			3		19	4	31
14	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2	1	38		2	2		16		61
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			3			2	7	15	5	32
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			3			2		13	3	21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			3			3	1	17	3	27
18	Dinas Perhubungan		1	10		2	8	10	8	4	43
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika			2			4		17	4	27
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu			1			4		18	5	28
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			4			11	1	10		26
22	Dinas Pangan dan Perikanan			3			3		20	2	28
23	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga			3			6	1	19	4	33
24	Dinas Pertanian			24			10	3	82	9	128
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	1		3			3		18	1	26
26	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1	1	3			2	2	23	1	33
27	Rumah Sakit Umum Daerah	4	6	12			238	16	105	54	435
28	Kantor Camat Rambatan						1	2	4	1	8
29	Kantor Camat X Koto			6			1	1	5		13
30	Kantor Camat Pariangan			2					9	1	12
31	Kantor Camat Lima Kaum			3				1	5	1	10
32	Kantor Camat Tanjung Emas			3					6		9
33	Kantor Camat Sungayang			1			2	3	4		10
34	Kantor Camat Sungai Tarab			2			1		8		11
35	Kantor Camat Salimpaung		1	1			3		4	2	11
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara			3				1	5	1	10
37	Kantor Camat Lintau Buo		1	2			3		5		11
38	Kantor Camat Padang Ganting			2			3		4		9
39	Kantor Camat Tanjung Baru			1			2	1	6	1	11

NO	OPD	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	SI	S2	JML
40	Kantor Camat Batipuh Selatan			2			1		8		11
41	Kantor Camat Batipuh			1			2		5	1	9
42	Penugasan Diluar Instansi			1					5		6
43	CLTN						3		1		4
	JUMLAH	18	25	293	2	54	841	138	4.179	297	5.847

Sumber : BKPSDM Tahun 2024

ASN Kabupaten Tanah Datar berdasarkan tingkat Jabatan tahun 2024 pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.13
ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2024

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1.	Eselon II	32
2.	Eselon III	144
3.	Eselon IV	184
4.	Fungsional	4.634
5.	Pelaksana	853
JUMLAH		**5.847**

Sumber: BKPSDM Tahun 2024

ASN Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.14
Sebaran ASN Pada Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2024

NO	SOPD	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Fungsional	Pelaksana	JML
1	Sekretariat Daerah	1	6	9		4		35	56	111
2	Sekretariat DPRD		1	3		1		4	12	21
3	Inspektorat Daerah		1	6		1		35	4	47
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan		1	1	5	1		23	10	41
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1	1	3	2		10	13	30
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		1	1	4	9		11	13	39
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1	1	3	7		5	10	27
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1		4	8			9	22
9	Badan Kesatuan Bangsa & Politik		1	1	2	2		3	7	16
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		1	1	4	9		3.196	307	3.518
11	Dinas Kesehatan		1	1	4	3	1	677	89	776

NO	SOPD	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Fungsional	Pelaksana	JML
12	Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan		1	1	5	3	2	18	35	65
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup		1	1	4	3	1	10	11	31
14	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		1	1	3	7		21	28	61
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		1	1	4	2	1	13	10	32
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		1	1	4	2		3	10	21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1	1	3	2		7	13	27
18	Dinas Perhubungan		1	1	2	6			33	43
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika		1	1	3	2		13	7	27
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1		1	1		18	7	28
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		1	1	2	1		15	6	26
22	Dinas Pangan dan Perikanan		1	1	3	3	1	12	7	28
23	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga		1	1	3			12	16	33
24	Dinas Pertanian		1	1	5	2		98	21	128
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan		1	1	2	3	2	8	9	26
26	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1	1	2	4	2	11	12	33
27	Rumah Sakit Umum Daerah			1	4	9		376	45	435
28	Kantor Camat Rambatan			1	1	2	2		2	8
29	Kantor Camat X Koto			1	1	4	2		5	13
30	Kantor Camat Pariangan			1	1	4	2		4	12
31	Kantor Camat Lima Kaum			1	1	3	2		3	10
32	Kantor Camat Tanjung Emas				1	3	2		3	9
33	Kantor Camat Sungayang			1	1	4	2		2	10
34	Kantor Camat Sungai Tarab			1	1	4	2		3	11
35	Kantor Camat Salimpaung			1	1	4	2		3	11
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara			1	1	4	1		3	10
37	Kantor Camat Lintau Buo			1		4	2		4	11
38	Kantor Camat Padang Ganting			1		4	2		2	9
39	Kantor Camat Tanjung Baru			1	1	4	2		3	11
40	Kantor Camat Batipuh Selatan			1	1	4	1		4	11
41	Kantor Camat Batipuh			1	1	4	1		2	9
42	Penugasan Diluar Instansi								6	6
43	CLTN								4	4
	JUMLAH	1	31	53	91	149	35	4.634	853	5.847

Sumber : BKPSDM Tahun 2024

e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Anggaran Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dengan target Rp165.107.447.750,00 dan terealisasi Rp163.268.531.406,86 atau 98,89%. Rincian target dan realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.15
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	32.894.352.430,00	26.212.093.645,16	79,69
2.	Retribusi Daerah	96.274.102.607,00	100.115.028.810,00	103,99
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	26.805.931.157,00	26.819.370.914,00	100,05
4.	Lain-lain PAD yang sah	9.133.061.556,00	10.122.038.037,70	110,83
	Jumlah	165.107.447.750,00	163.268.531.406,86	98,89

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.199.762.905.978,00 dengan realisasi sebesar Rp1.166.508.813.774,00 atau 97,23% terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.089.529.470.715,00	1.084.949.309.436,00	99,58
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.233.435.263,00	81.559.504.338,00	73,99
	JUMLAH	1.199.762.905.978,00	1.166.508.813.774,00	97,23

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Tahun 2024 lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp675.484.000,00 atau 90,06% dengan perincian terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.17
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	600.000.000,00	80,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	75.484.000,00	0,00
	JUMLAH	750.000.000,00	675.484.000,00	90,06

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024

2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

a) Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja tersebut diprioritaskan dan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan dalam bentuk:

a. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 8 (delapan) prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
b. Penganggaran untuk mendukung program nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
c. Pemecahan masalah mendesak untuk penanganan bencana alam dan kerawanan sosial.
d. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
e. Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

b) Target dan Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.444.187.319.890,00 dengan realisasi sebesar Rp1.365.213.503.621,58 atau 94,53% dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.123.934.130.068,00 dengan realisasi sebesar Rp1.056.186.174.985,58 atau 93,97% dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp703.354.280.294,00 dengan realisasi sebesar Rp663.256.952.520,00 atau 94,30% yang terdiri dari:

- Belanja Gaji dan Tunjangan dianggarkan sebesar Rp427.556.814.348,00 dengan realisasi sebesar Rp410.643.584.963,00 atau 96,04%.
- Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dianggarkan sebesar Rp108.823.658.382,00 dengan realisasi sebesar Rp97.584.999.688,00 atau 89,67%.
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp124.625.497.411,00 dengan realisasi Rp113.358.790.860,00 atau 90,96%.
- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp12.626.479.105,00 dengan realisasi Rp12.295.833.478,00 atau 97,38%.
- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp591.833.291,00 dengan realisasi Rp429.785.694,00 atau 72,62%
- Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp710.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp692.400.000,00 atau 97,40%.
- Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp28.419.117.757,00 dengan realisasi Rp28.251.557.837,00 atau 99,41%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp367.099.329.409,00 dengan realisasi Rp342.756.603.809,58 atau 93,37% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp72.371.040.429,00 dengan realisasi sebesar Rp66.781.672.453,00 atau 92,28%.
- Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp114.935.983.474,00 dengan realisasi sebesar Rp108.031.819.418,00 atau 93,99%.
- Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp15.998.161.881,00 dengan realisasi sebesar Rp14.062.082.580,58 atau 87,90%.
- Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp62.755.966.453,00 dengan realisasi sebesar Rp55.239.254.967,00 atau 88,02%.
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp5.021.352.940,00 dengan realisasi sebesar Rp4.728.630.097,00 atau 94,17%.
- Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan sebesar Rp32.588.768.025,00 dengan realisasi sebesar Rp32.262.350.378,00 atau 99,00%.
- Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp63.428.056.207,00 dengan realisasi sebesar Rp61.650.793.916,00 atau 97,20%

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp485.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.063.333,00 atau 19,39%.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp48.197.630.543,00 dengan realisasi sebesar Rp45.995.605.600,00 atau 95,43% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp26.654.614.600,00 dengan realisasi sebesar Rp26.654.614.600,00 atau 100,00%.
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp17.962.200.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp15.828.496.979,00 atau 88,12%.

- Bantuan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp894.870.920,00 dengan realisasi sebesar Rp894.870.920,00 atau 100%.

e. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp4.797.889.822,00 dengan realisasi sebesar Rp4.082.949.723,00 atau 85,10% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp4.464.589.822,00 dengan realisasi sebesar Rp3.843.049.723,00 atau 86,08%.
- Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dianggarkan sebesar Rp333.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp239.900.000,00 atau 71,98%.

2) Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp151.591.515.821,00 dengan realisasi sebesar Rp143.408.477.344,00 atau 94,60% terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp1.906.414.453,00 dengan realisasi sebesar Rp1.615.869.600,00 atau 84,76%.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp29.424.986.867,00 dengan realisasi sebesar Rp26.945.755.401,00 atau 91,57%

c. Belanja modal Bangunan dan Gedung

Belanja Modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp14.591.057.373,00 dengan realisasi sebesar Rp11.858.545.807,26 atau 81,27%.

d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp100.806.638.812,00 dengan realisasi sebesar Rp98.522.462.046,74 atau 97,73%

e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar

Rp4.307.402.152,00 dengan realisasi sebesar Rp4.268.771.204,00 atau 99,10%.

d Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp555.016.164,00 dengan realisasi sebesar Rp197.073.285,00 atau 35,51%.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp8.066.118.722,00 dengan realisasi sebesar Rp6.149.873.219,00 atau 76,24%.

Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp160.595.555.279,00 dengan realisasi sebesar Rp159.468.978.073,00 atau 99,30% terdiri dari:

a. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp4.741.893.791,00 dengan realisasi Rp3.908.158.473,00 atau 82,42%

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp155.853.661.488,00 dengan realisasi Rp155.560.819.600,00 atau 99.81%

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan isu strategis daerah tahun 2023 yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi daerah akibat dampak covid-19.
2. Perluasan kesempatan kerja.
3. Peningkatan kualitas dan daya saing UMKM dan IKM daerah
4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian dan peternakan
5. Optimalisasi pencapaian pencapatan asli daerah
6. Peningkatan iklim investasi
7. Peningkatan daya saing destinasi wisata unggulan daerah
8. Peningkatan kualitas SDM.
9. Belum terintegrasinya penanganan kemiskinan di Kabupaten Tanah

Datar.

10. Masih rendahnya pengamalan adat dan budaya.
11. Masih adanya kasus stunting.
12. Belum maksimalnya penyediaan air bersih dan sanitasi layak.
13. Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan persampahan.
14. Masih rendahnya infrastruktur jalan
15. Lingkungan hidup dan kebencanaan.
16. Reformasi birokrasi

Berdasarkan isu strategis tersebut dirumuskan tema pembangunan tahun 2023 yaitu **"**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Program Unggulan Daerah**"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

a. Penuntasan penanganan Covid 19 dan permasalahan kesehatan lainnya.
b. Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya.
c. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi.
d. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian.
e. Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah.
f. Peningkatan kualitas SDM.
g. Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup.
h. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berkualitas

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu **"TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR MADANI YANG BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"** dengan makna sebagai berikut :

Penjelasan Visi :

a. **Madani** adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis serta maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

2. Misi

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 adalah:

a. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
b. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.
c. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
d. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah juga dilaksanakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun.
2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah.
3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi.
4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten.
5. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar.
6. Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari.
7. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan.
8. Membangun Jaringan Telekomunikasi.
9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan Tenaga Non ASN.
10. Perbaikan Irigasi.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, terkait dengan prioritas peningkatan pemahaman beragama, beradat dan berbudaya. Tujuan Misi pertama adalah meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai nilai ABS-SBK dengan sasaran meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat dan meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK.

Sasaran Meningkatkan pembangunan keagamaan masyarakat/ diukur dari indikator jumlah hafiz dan hafizah yang diwisuda serta jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi pertama diantaranya:

1. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Sasaran meningkatkan ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK, diukur dari indikator persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi pertama diantaranya :

1. Program Pengembangan kesenian tradisional.
2. Program Pembinaan sejarah.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya.
4. Program pengelolaan permuseuman.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, terkait dengan prioritas Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan Perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian Industri dan UMKM.

Tujuan Misi Kedua adalah menigkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian industri dan UMKM dengan 3 (tiga) sasaran yaitu pertama menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian, kedua meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif dan yang ketiga meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Sasaran menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian diukur dari indikator kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi kedua diantaranya :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian.

Sasaran Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif diukur dari indikator Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dan Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi kedua diantaranya :

1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7. Program Penanganan Kerawanan Pangan
8. Program Pengawasan Keamanan Pangan
9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
11. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
12. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
13. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
14. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
15. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
17. Program Pengembangan UMKM
18. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
19. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
20. Program Pengembangan Ekspor
21. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
22. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

23. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
24. Program Promosi Penanaman Modal
25. Program Pelayanan Penanaman Modal
26. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
27. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja diukur dari indikator Jumlah Wirausaha Baru yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi kedua diantaranya :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, terkait dengan Isu Strategis Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tujuan Misi Ketiga adalah meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dengan sasaran pertama meningkatnya mutu pendidikan, sasaran kedua meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan sasaran ketiga adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran meningkatnya mutu pendidikan yang diukur dari Indikator Rata-rata lama sekolah, yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi ketiga diantaranya:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dari indikator Umur harapan hidup dan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi ketiga diantaranya:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD)
6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Sasaran meningkatnya Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diukur dari indikator Angka Kemiskinan, IDG dan IPG yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi ketiga diantaranya:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7. Program Perlindungan Perempuan
8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
10. Program Perlindungan Khusus Anak
11. Program Penataan Desa
12. Program Peningkatan Kerjasama Desa
13. Program Administrasi Pemerintah Desa
14. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat
15. Program Pembinaan Keluarga berencana (KB)
16. Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, terkait dengan Isu Strategis Pembangunan Pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.

Tujuan Misi Keempat adalah Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai Destinasi Pariwisata yang Unggul Berbasis Agama Budaya dan Sumber Daya Alam dengan sasaran Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial yang diukur dari Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan dan lama tinggal wisatawan yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi kedua diantaranya :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, terkait dengan Isu Strategis Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Tujuan Misi Kelima adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Efektif dan Efisien dengan 3 (tiga) sasaran yaitu sasaran pertama Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, sasaran kedua meningkatnya birokrasi yang kapabel, dan yang ketiga meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dari Indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK atas laporan, Indeks Pengawasan Kearsipan dan Manajemen Resiko Level 3 yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi pertama diantaranya:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
10. Program Pengelolaan Kearsipan
11. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
12. Program Perizinan Penggunan Arsip
13. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Kepegawaian Daerah
16. Program Pendaftaran Penduduk
17. Program Pencatatan Sipil

18. Program Pengelolaaan Informasi Administrasi Kependudukan
19. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
20. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
21. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
22. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
23. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, terkait dengan Isu Strategis Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel yang diukur dari Indikator Indeks SPBE, Indeks Profesional ASN, Skor dan status kinerja pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi kedua diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik
4. Program Aplikasi Informatika

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang diukur dari Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi kedua diantaranya :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, terkait dengan Isu Strategis Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Tujuan Misi Keenam adalah Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah, sasaran kedua Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, dan sasaran ketiga

Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah yang diukur dari Indikator Persentase Infrastruktur yang berkualitas yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi keenam diantaranya:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Pengembangan Permukiman
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Program Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
12. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
13. Program Retribusi Tanah, serta ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
14. Program Penetapan Tanah Ulayat
15. Program Pengelolaan Tanah Kosong
16. Program Pengelolaan Izin membuka Tanah
17. Program Penatagunaan Tanah

Sasaran Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup yang diukur dari Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diimplementasikan dalam beberapa program yang mendukung untuk pencapaian Misi keenam diantaranya :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLaJ)
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup

8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
10. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
11. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha yang terkait dengan Pplh.
12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
13. Program Penangganan Penyadaran Lingkungan Hidup
14. Program Pengelolaan Persampahan

Sasaran ketiga Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana yang diukur dari Indikator Persentase Bencana yang ditangani yang diimplementasikan dalam program yang mendukung untuk pencapaian Misi keenam yaitu Program Penanggulangan Bencana.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Untuk mencapai visi pembangunan yang tercantum pada RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai–nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" dimana visi tersebut dirumuskan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di daerah dan juga RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap Keempat serta memperhatikan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 telah menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dilakukan proses pemetaan antara program dan kegiatan yang berpedoman dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selanjutnya, Visi tersebut diwujudkan melalui 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan 29 program, 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan 61 program, 6 Urusan Pilihan dengan 22 Program, 1 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dengan 3 program, 4 Unsur Penunjang Urusan

Pemerintahan dengan 7 program, 1 Unsur Pengawas dengan 2 Program, 1 Unsur Kewilayahan dengan 5 Program dan 1 Unsur Pemerintahan Umum dengan 5 Program yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
   a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan:
      1) Program Pengelolaan Pendidikan;
         a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
         b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
         c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
         d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan;
      2) Program Pengembangan Kurikulum
         a. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
         b. Kegiatan Penetapan Kurikulum Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
      3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
         Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

   b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan:
      1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
         a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
         b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
         c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
         d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
      2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
         Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
   a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
   b. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
   c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
   d. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
   a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
   1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
      a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
      b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
      Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
   Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
   Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;
5) Program Pengembangan Permukiman;
   Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
6) Program Penataan Bangunan Gedung;
   Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
   Kegitan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
8) Program Penyelenggaraan Jalan
   Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;
9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
   a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
   b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
   c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
   d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;

d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   1) Program Pengembangan Perumahan;
      a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
      b. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
      c. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
   2) Program Kawasan Permukiman;
      a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
      b. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
      c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
   3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
      Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota;
   4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
      Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;

e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
   1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
      a. Kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
      b. Kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/ kota dan peraturan bupati/wali kota;
      c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
   2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
      a. Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan

beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota;
b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
d. Kegiatan Penyelenggaran Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

3) Program penanggulangan bencana:
a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
1) Program Pemberdayaan Sosial;
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

2) Program rehabilitasi sosial;
a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
a. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
4) Program Penanganan Bencana
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota;
5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
   a) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
      1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
         Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
      2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
         a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
         b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
      3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
         a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten/Kota;
         b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
      4) Program Hubungan Industrial;
         a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
         b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

   b) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
      1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
         a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
         b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
         c. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
      2) Program Perlindungan Perempuan;
         a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
         b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi

Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;

3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
5) Program Perlindungan Khusus Anak;
   a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
   a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
   b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
   c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi.
3) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
4) Program Program Pengawasan Keamanan Pangan;
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Daerah Kabupaten/Kota;

d) Urusan Bidang Pemerintahan Pertanahan;
   1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
      Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
   2) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
      Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   3) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
      Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah;

e) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
   1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
      Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
   2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
      a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
      b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
      c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
   3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
      Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
   4) Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
      a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3;
      b. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   5) Program Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
      Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha

dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH;
   Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH;
7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
   Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
8) Program Pengelolaan Persampahan;
   Kegiatan Pengelolaan Sampah;

f) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   1) Program Pendaftaran Penduduk;
      a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
      b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
   2) Program Pencatatan Sipil;
      Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
   3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
      a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan;
      b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
   4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
      Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan;

g) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   1) Program Program Desa;
      Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa;
   2) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
      Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa;
   3) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
      Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
   4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota;

h) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   1) Program Pengendalian Penduduk:
      Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
   2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):
      a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
      b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
      c. Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;
      d. Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
   3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
      a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
      b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;

i) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
   1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
      a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;

b. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota;
c. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
d. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
e. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
f. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
g. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jariangan Trayek Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
h. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

j) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
   1) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
      Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   2) Program Aplikasi Informatika;
      Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

k) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
      Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit, Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
      Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
   3) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
      Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
   4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
      Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;

5) Program Pengembangan UMKM;
   Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil;

l) Urusan Penanaman Modal
   1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
      a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
   2) Program Promosi Penanaman Modal;
      Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
   3) Program Pelayanan Penanaman Modal;
      Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
   4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
      Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
   5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
      Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

m) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
   1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
      a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
      b. Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
   2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
      a. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
      b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

c. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
d. Kegiatan Pembianaan dan Pengembangan OlahRaga Rekreasi.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;

n) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;

o) Urusan Pemerintahan Persandian;
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

p) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
1) Program Pengembangan Kebudayaan
a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
Kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3) Program Pembinaan Sejarah;
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
5) Program Pengelolaan Permuseuman;
Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota;

q) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
1) Program Pembinaan Perpustakaan;

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

r) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
1) Program Pengelolaan Arsip;
a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;
b. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
2) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung Dan/Atau Dibubarkan, Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan;

3. Urusan Pemerintahan Pilihan;
a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil;

b) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
a. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
b. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota;
2) Program Pemasaran Pariwisata;
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
   a. Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
   b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
   1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
      a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
      b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
      c. Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
      d. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain;
   2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
      Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian;
   3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
      a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
      b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota;
      c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan

Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota;

d. Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;

4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
5) Program Perizinan Usaha Pertanian;
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
6) Program Penyuluhan Pertanian;
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;

d) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota;

e) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.
2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
b. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
a. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
4) Program Pengembangan Ekspor
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan;

6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

f) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota;

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
1) Sekretariat Daerah;
1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;
b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah;
2) Program Perekonomian dan Pembangunan;
a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;

2) Sekretariat DPRD:
1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
f. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD;

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Terdiri Dari:

a) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan:
   1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
      a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan;
      b. Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
      c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
   2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
      a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
      b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam);
      c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan;

b) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
   1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
      a. Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
      b. Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
      c. Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah;
      d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
      e. Kegiatan Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
   2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
      Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
      Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

c) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
   Program Kepegawaian Daerah;
   a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN;

b. Kegiatan Mutasi Dan Promosi ASN;
c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
d. Kegiatan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

d) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;

e) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah);
1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;

f) Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan;
b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan;
c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat;
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

g) Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
   Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
   Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik;
3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
   Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
   Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.
5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
   Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial;

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah;
d. Keguatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah;

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
i. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD;
j. Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
k. Kegiatan Penataan Organisasi;
l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan;
m. Kegiatan Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD;
n. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD;

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPM juga disusun sebagai alat pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan jenis-jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

f. Sosial.

Dalam penerapan SPM terdapat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.

Perangkat daerah dalam menerapkan SPM mengacu kepada program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan umum SPM dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Perumahan Rakyat
5. Bidang Trantibum Linmas
6. Bidang Sosial

Selanjutnya perangkat daerah memprioritaskan anggaran untuk pencapaian pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dalam semua dokumen perencanaan dan tertuang dalam dokumen kebijakan umum anggaran.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar tersebut diantaranya:

a. SPM Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    1) Pendidikan Anak Usia Dini
    2) Pendidikan Dasar
    3) Pendidikan Kesetaraan

b. SPM Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan
    1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
    2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
    3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
    4) Pelayanan Kesehatan Balita
    5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
    6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
    7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
    8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
    9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
    10) Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat
    11) Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis
    12) Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif pencegahan/preventif

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas PUPR dan Pertanahan
    1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
    2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perkim LH
    1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
    2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang

terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar dan BPBD
   1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
   3) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
   4) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
   5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

f. SPM Bidang Sosial Pada Dinas Sosial PPPA
   1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti
   2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti
   3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti
   4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
   5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Pemenuhan pelayanan dasar dimaksud merupakan strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Penurunan Jumlah Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per kapita dan ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Analisa capaian kinerja makro Pembangunan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,57	76,49	1,22
2.	Angka Kemiskinan (%)	4,16	4,28	2,88
3.	Angka Pengangguran (%)	5,35	5,30	0,93
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44	3,85	13,29
5.	Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	42,90	45,07	5,06
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,251	0,260	3,59

Sumber : BPS Sumbar, 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata

usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak (pengeluaran perkapita) dan juga mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu.

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah 76,49, meningkat sebesar 1,22 dibandingkan tahun 2023 adalah 75,57.

2. Angka Kemiskinan

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat di ukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar 4,16% dan pada tahun 2024 sebesar menjadi 4,28%.

Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta dengan melibatkan seluruh stakeholder.

3. Angka Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Hal ini masih perlu menjadi perhatian, karena berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi hidup beban sosial serta mendorong mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Pengangguran merupakan masalah yang harus diselesaikan pemerintah dalam era globalisasi ini karena selain ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi juga dengan semakin berhasilnya pemerintah mengurangi tingkat pengangguran maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

Angka pengangguran Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah sebesar 5,30%, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,93% dibandingkan dengan tahun 2023 yang berada pada angka 5,35%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah. Berdasarkan penghitungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada 2 (dua) tahun terakhir, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar sebesar 3,85 % atau turun sebesar 13,29 dibandingkan pada tahun 2023

sebesar 4,44%.

5. Pendapatan Per Kapita

Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya bisa diukur menggunakan nilai PDRB Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktivitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

PDRB per kapita ADHB Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebesar Rp. 45.066,39 ribu sedangkan pada tahun 2023 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 42.899,63 ribu, terjadi peningkatan sebesar %.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk secara menyeluruh. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya adalah Gini Ratio atau Indeks Gini yang membagi kesenjangan atau ketimpangan dalam kriteria:

1. G < 0,30 berarti Ketimpangan Rendah
2. 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti Ketimpangan Sedang
3. > 0,50 berarti Ketimpangan Tinggi

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa Gini Ratio Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah sebesar 0,258 dan mengalami penurunan sebesar 3,59% dari angka tahun 2023 sebesar 0,260. Hal ini menunjukan bahwa kesenjangan pendapatan antara penduduk di Kabupaten Tanah Datar masuk kategori rendah.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja Tahun 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Pendidikan	**1**	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di ---------- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun	7364 ----x100% 10863	67.79	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		7443	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		7443	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						4	Jumlah minimal kebutuhan pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		1104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		1104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		629	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah		629	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ---------- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun	34912 ----x100% 35874	97.32	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		a. Akreditasi A: 144 b. Akreditasi b: 244 c. Akreditasi c: 29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		34979	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		17921	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja Tahun 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
						4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		34.979	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		17921	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		2.618	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah (Negeri dan Swasta)		1769	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		2.725	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1.810	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		313	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		632	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		461	Dinas Pendidikan	
						14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2.693	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2.693	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		281	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja Tahun 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
						17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		541	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat		384	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ---------- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun	16.104 ----x100% 19.676	81.85	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		a. Akreditasi A: 144 b. Akreditasi B: 244 c. Akreditasi C: 29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		34979	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		17921	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		34.979	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		17921	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar		2.618	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		1769	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		2.725	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		1.810	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		313	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja Tahun 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
						11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		632	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		461	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2.693	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		1.767	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki jazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		281	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat		541	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat		384	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	657 ----x100% 2254	29.15	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		a. Akreditasi A: 2 b. Akreditasi B: 3 c. Akreditasi C:6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		1313	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja Tahun 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
						3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		1313	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		281	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 292 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah Penduduk di kabupaten 382.674	0.076	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.....	4	Dinas Kesehatan	
	2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi 4 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah RS di kabupaten 4	100.00	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya.....	4	Dinas Kesehatan	
	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 3.313 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten 3.382	97.96	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia…….. (Dibuat dalam bentuk daftar)	620.238	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal... (Dibuat dalam bentuk daftar)	3.013	Dinas Kesehatan	
	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan 3.382 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah ibu bersalin di kabupaten 3.382	100.00	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia…….. (Dibuat dalam bentuk daftar)	10.149	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah…… (Dibuat dalam bentuk daftar)	555	Dinas Kesehatan	
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 3.472 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah bayi baru lahir di kabupaten 3.472	100.00	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia …(Dibuat dalam bentuk daftar)	20835	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar …… (Dibuat dalam bentuk daftar)	3.678	Dinas Kesehatan	
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 17.118 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah balita di kabupaten 17.118	100.00	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia …….. (Dibuat dalam bentuk daftar)	118.676	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar ...	4.019	Dinas Kesehatan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 17.335 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten 55.550	31.21	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia ..... (Dibuat dalam bentuk daftar)	1.018.812	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar ... (Dibuat dalam bentuk daftar)	3.354	Dinas Kesehatan	
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 48.598 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten 236.124	20.58	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia ..... (Dibuat dalam bentuk daftar)	8395	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar ..... (Dibuat dalam bentuk daftar)	3.689	Dinas Kesehatan	
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining 38.747 ----x100% Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten 64.602	59.98	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia ..... (Dibuat dalam bentuk daftar)	28.911	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Dibuat dalam bentuk daftar)	3.643	Dinas Kesehatan	
	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11.742 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah penderita hipertensi di kabupaten 11.742	100.00	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Dibuat dalam bentuk daftar)	12.053	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar ..... (Dibuat dalam bentuk daftar)	604	Dinas Kesehatan	
	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2.756 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah penderita DM di kabupaten 2.756	100.00	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia ... (Dibuat dalam bentuk daftar)	5587	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Dibuat dalam bentuk daftar)	596	Dinas Kesehatan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 506 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah penderita ODGJ di kabupaten 506	100.00	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia …….. (Dibuat dalam bentuk daftar)	31	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar ……..	288	Dinas Kesehatan	
	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3.000 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah penderita TBC di kabupaten 3.000	100.00	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia…….	18.601	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar …….	392	Dinas Kesehatan	
	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 3.431 ---------- x 100 % ----x100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten 3.431	100.00 `	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia …….	13724	Dinas Kesehatan	
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar ……..	162	Dinas Kesehatan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	355,92		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten …….(ha)	0	Dinas PUPR dan Pertanahan	
			---------- x 100 %	----x100%	7.62	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten …..m	Tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	4673		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten…… (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten…… (m)	Tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah			Dinas PUPR dan Pertanahan	
							i. Bangunan perkuatan tebing (m)	i. Bangunan Perkuatan Tebing ….(m)			
							ii. Tanggul sungai (m)	ii. Tanggul sungai ……..(m)	ii. Tanggul sungai 1059,2 (m)		
							iii. Kanal bajir (m)	iii. Kanal banjir……. (m)	iii. Kanal banjir 0 (m)		
							iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)	iv. Pintu air/bendung pengendali banjir ……(Unit)	iv. Pintu air/bendung pengendali banjir 0 (Unit)		
							v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)	v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)	v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) 0		
							vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)	vi. Polder/Kolam Retensi…… (Unit)	vi. Polder/Kolam Retensi 0 (Unit)		
							vii. Breakwater (m)	vii. Breakwater ……(m)	vii. Breakwater 0 (m)		
							viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya …..(m)	viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya 0 (m)		

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten (ha)	0 ----x 100% 1	0	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten …….(ha)	Tidak Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten…… (m)	Tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota ……(ha)	Tidak Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten……. (m)	Tidak Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Tidak Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Tidak Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	Jumlah i. Bangunan perkuatan tebing ……..(m) ii. Tanggul sungai ……..(m) iii. Kanal bajir……. (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir ……(Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi…… (Unit) vii. Breakwater ……(m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai	Jumlah i. Bangunan perkuatan tebing ii. Tanggul sungai tidak ada iii. Kanal bajir Tidak Ada iv. Pintu air/bendung pengendali banjir tidak ada v. Pompa banjir tidak ada vi. Polder/Kolam Retensi Tidak Ada vii. Breakwater Tidak Ada viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya Tidak	Dinas PUPR dan Pertanahan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi (ha) dan dipelihara ---------- x 100 % Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	9.148 ----x 100% 29.437	31.08	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) 200025 ---------- x 100 % ... x 100% Panjang jaringan irigasi primer (m) 317500	63.00	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) 349250 ---------- x 100 % ... x 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 635000	55.00	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ---- ---------- x 100 % ... x 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m) ----	0.00	Dinas Pertanian	
	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah ---------- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten	95.324 ---100% 124.527	76.55	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten	Ada/tidak	Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten	Ada/tidak	Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten penyelenggaraan SPAM	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten penyelenggaran SPAM ……	1	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM ……	1	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain……..	0	Dinas PUPR dan Pertanahan	
	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ---------- x 100 % Jumlah rumah di kabupaten	89538 ... x 100% 104153	85.97	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S ……..	89092	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T ……	446	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T…	89538	Dinas PUPR dan Pertanahan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
						4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja ……..		Tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja ……..		Tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik ……..		Tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Σ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ---------- x 100 % Σ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	89538 ... x 100% 104153	85.97	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Σ rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT ---------- x 100 % Σ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25jiwa/ha	0 ... x 100% 104153	0	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Σ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ---------- x 100 % Σ rumah di wilayah pengembangan SPALDT	0 ... x 100% 446	0	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Σ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat ---------- x 100 % Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	89092 ... x 100% 89092	100	Dinas PU	
						11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Σ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ---------- x 100 % Σ jumlah sarana pengangkutan yang di butuhkan kabupaten	1 ... x 100% 4	25	Dinas PUPR dan Pertanahan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
						12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Σ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ---------- x 100 % Σ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten	12 -- x 100 % 48	25	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Σ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD ---------- x 100 % Σ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kabupaten	0 -- x 100 % 446	0	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Σ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot ---------- x 100 % Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	0 --- x 100 % 89092	0	Dinas PUPR dan Pertanahan	
	6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Jumlah Pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ---------- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	55 -----X100% 55	100	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Σ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku ---------- x 100 % Σ jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	6 -- x 100 % 6	100	PUPR	
						2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting		55 PBG	Dinas PMPTSP	
						3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak		Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						4	Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak		Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk		3290	BPKD	
						6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten.....		1	BPKD	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten	3290	BPKD	
						8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/ dirawat	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/dirawat	3290	BPKD	
	7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap (baik dan sedang) ---------- x 100 % Panjang jalan keselurahan di wilayah kabupaten	795.79 ...x 100% 1138.66	69.89	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten.....	1138.66	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						2	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang Dibangun.....	5.33	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						3	Panjang jembatan dibangun	Panjang jembatan yg dibangun.....	34.1 m	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi).....	3.2 km	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	22.66 km	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi	128 m	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						8	Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang Dipelihara.....	88.26 km	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						9	Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipelihara	472 m	Dinas PUPR dan Pertanahan	
	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten	28 ...x 100 % 416	6.73	1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten	0	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten	28	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten	28	PBJ	
						4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	Ada (SIPJAKI)	Dinas PUPR dan Pertanahan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kabupaten	Ada/tidak	Ada (SIRUP)	Bagian PBJ	
						6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada/tidak	Ada (SIRUP)	Bagian PBJ	
						7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/tidak	Ada	Bagian PBJ	
						8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/tidak	Ada	Bagian PBJ	
						9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten	Ada/tidak	Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/tidak	tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	Ada/tidak	tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten	Ada/tidak	tidak ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	Ada/tidak	Ada	Dinas PUPR dan Pertanahan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/tidak	Ada	PUPR	
						15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Ada/tidak	PUPR	
						16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	ada	Bagian AP	
						17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	ada	Bagian AP	
						18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten ……	Nihil	PMPTSP Naker	
						19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten ……	Nihil	Dinas PMPTSP Naker	
						20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten …….	Nihil	PBJ	
						21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten…….	30	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui……	Nihil	Dinas PMPTSP Naker	
						23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya……	27	Bagian AP	
						24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya ……	tidak ada	Bagian AP	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya……	tidak ada	Bagian AP	
	9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ---------- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	155 ... x 100 % 155	100		-	-	-	Dinas PUPR dan Pertanahan	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024 ---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024	60 --x 100 % 60	100	1	jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya…	1442	Dinas Perkim	
						2	jumlah yang terkena bencana alam	jumlah yang terkena bencana alam….	196	Dinas Perkim	
						3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumla RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam…	780	Dinas Perkim	
						4	Jumlah unit rumah korban bencana yag direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yag direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi...	0	Dinas Perkim	
						5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi ……	0	Dinas Perkim	
						6	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan	60	Dinas Perkim	
						7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban Bencana……	212	Dinas Perkim	
						8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi …..	60	Dinas Perkim	
						9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan ……	3.8 Ha	Dinas Perkim	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/ atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemarintah daerah yang memenuhi kriteria penerimaan pelayanan	0 -- x 100 % 1	0	1	Jumlah Rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah Rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM….	0	Dinas Perkim	
						2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian Hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian Hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM….	0	Dinas Perkim	
						3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM...	0	Dinas Perkim	
						4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM ….	60	Dinas Perkim	
						5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM ….	0	Dinas Perkim	
						6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah ……	3.8 Ha	Dinas Perkim	
	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	0 ... x 100% 156.33	0.000	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha…….	156.33	Dinas Perkim	
						2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH…..	0	Dinas Perkim	
						3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh …….	0	Dinas Perkim	
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ---------- x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten	10679 ... x 100% 104153	10.25	1	Jumlah rumah di kabupaten	Jumlah rumah di kabupaten..	104153	Dinas Perkim	
						2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH ……	230	Dinas Perkim	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						3	Jumlah rumah yang tidak layak huni	Jumlah rumah yang tidak layak huni	10679	Dinas Perkim	
						4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah rumah yang tidak dihuni	5640	Dinas Perkim	
						5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK 120745 ---------- Jumlah Total Unit Rumah 104153	115.93	Dinas Perkim	
						6	Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah rumah pembangunan baru	435	Dinas Perkim	
	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	340		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	20	Dinas Perkim	
			---------- x 100 %	... x 100%	19.27	2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Jumlah rumah yang sudah difasilitasi air minum	89655	PUPR	
			Jumlah unit rumah kabupaten	1764		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah unit perumahan yang terfasilitasi jalan lingkungan	31	PUPR	
						4	jumlah unit perumahan yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	89198	PUPR	
						5	jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Nihil	Dinas Perkim	
						6	jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	340	Dinas Perhubungan dan Perkim	
						7	jumlah pengembang yang tersertifikasi	jumlah pengembang yang tersertifikasi	13	Dinas Perkim	
						8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Jumlah pengembang yang teregistrasi	13	Dinas Perkim	
						9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	13	Dinas Perkim	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja -2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ---------- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	7 ------ 7	100	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten yang ditangani	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten yang ditangani …….		7	Satpol PP Damkar	
						2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan …..		1.184	Satpol PP Damkar	
						3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		2	Satpol PP Damkar	
						4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS ……		2	Satpol PP Damkar	
						5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada/tidak		Ada	Satpol PP Damkar	
						6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada/tidak (Dibuat dalam bentuk daftar)		Ada	Satpol PP Damkar	
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	2 ------ 94	2		-	-		-	Satpol PP Damkar	
	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ……..org	280854		1	Persentase penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100 % Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	1 ----- 1	100	BPBD	
			---------- x 100 % Jumlah Sasaran yang seharusnya menerima informasi rawan bencana… org	293938	95.548721	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ---------- x 100 % Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	280.854 293.938	96	BPBD	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja -2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ..... Org	1.662	1	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100 % Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	1 ----- 1	100	BPBD	
			Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan	293.938		2	Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/leGal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100 % Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah dilakukan	0 ----- 1	0	BPBD	
						3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (Pelatihan pencegahan dan	Jumlah Aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ---------- x 100 % Jumlah aparatur dengan warganegara di kawasan rawan bencana	330 ----- 6.372	5.18	BPBD	
						4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ---------- x 100 % jumlah warga negara dikawasan rawan bencana	1.332 ----- 293.938	0.453	BPBD	
						5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ---------- x 100 % jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	382.674 ----- 382.674	100	BPBD	
						6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan ---------- x 100 % jumlah warga negara dikawasan rawan bencana	382674 ----- 382.674	100	BPBD	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja -2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
	5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ……. Org Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana x 100%	77 77	100	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ---------- x 100 % jumlah seluruh penetapan status KLB	0 ----- 0	0	BPBD	
						2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana ---------- x 100 % jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	3 ----- 3	0	BPBD	
						3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ---------- x 100 % jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	1644 ----- 1644	100	BPBD	
						4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ---------- x 100 % Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	77 ----- 77	100	BPBD	
	6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran atau perangkat daerah ---------- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	52 ----x100% 73	71.23	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten….		3	Satpol PP Damkar	
						2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada/tidak		Ada	Satpol PP Damkar	
						3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada/tidak		Ada	Satpol PP Damkar	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja -2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap Nagari (Dibuat dalam bentuk daftar)	Ada	Satpol PP Damkar	
						5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi (Dibuat dalam bentuk daftar)……	267	Satpol PP Damkar	
						6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran …….	56	Satpol PP Damkar	
						7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran ……	185	Satpol PP Damkar	
						8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran …….	0	Satpol PP Damkar	
	7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran		11.16	-	-	-	-	Satpol PP Damkar	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ---------- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	796 ... x 100 % 796	100.00	1	Jumlah Layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah Layanan data dan pengaduan yang dimiliki……..	1	Dinas Sosial	
						2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM ……..	796	Dinas Sosial	
						3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk ……..	1	Dinas Sosial	
						4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau ……..	796	Dinas Sosial	
						5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki ……..	2	Dinas Sosial	
						6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi ……..	796	Dinas Sosial	
						7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ……..	1	Dinas Sosial	
						8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang ……..	796	Dinas Sosial	
						9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu ……..	1	Dinas Sosial	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter ……..	2	Dinas Sosial	
					11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia ……..	NIHIL	Dinas Sosial	
					12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan……..	NIHIL	Dinas Sosial	
					13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah ……..	2	Dinas Sosial	
					14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan ……..	597	Dinas Sosial	
					15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial ……..	796	Dinas Sosial	
					16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat ……..	796	Dinas Sosial	
					17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan ……..	NIHIL	Dinas Sosial	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	796	Dinas Sosial	
						19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	1	Dinas Sosial	
						20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	1	Dinas Sosial	
						21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk ……..	1	Dinas Sosial	
	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ---------- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	30 ---- x 100 % 30	100 ;	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan ……	3281	Dinas Sosial/BPBD	
						2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang …….	3281	Dinas Sosial/BPBD	
						3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki …….	0	Dinas Sosial	
						4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan …….	3281	Dinas Sosial	
						5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak Ada	3281	Dinas Sosial	
						6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia …… (dibuat dalam bentuk daftar)	597	Dinas Sosial	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ---------- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten (Fotocopy DPA)	1 ... x 100% 3	33.33	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Ada	Nakerin	
						2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% Realisasi Indikator-Target indikator -341200732 ---------- x 100% ---------- Realisasi 1329129018	-26	Nakerin/Bappeda dan Litbang	
						3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten	Jumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	Nihil	Nakerin	
	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	240 ---x 100 % 165642	0.14	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2023 12 ---------- x 100% ----- x 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2024 12	100.00	Nakerin	
						2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2024 9 ---------- x 100% ----- x 100 Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2024 10	90.00	Nakerin	
						3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2024 10 ---------- x 100% ----- x 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2024 240	4.17	Nakerin	
						4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2024 2 ---------- x 100% ----- x 100 Jumlah seluruh LPK pada tahun 2024 2	100	Nakerin	
						5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2024 2 ---------- x 100% ----- x 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun 2024 2	100	Nakerin	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
						6	Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah penganggur yang dilatih ……orang		240	Nakerin	
						7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2024 ---------- x 100% Jumlah orang yang dilatih tahun 2024	240 ... x 100% 240	100	Nakerin	
						8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2024 ---------- x 100% Jumlah lulusan pada tahun 2024	114 ... x 100% 240	47.50	Nakerin	
						9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 202 ---------- x 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2024	192 ... x 100% 240	80.00	Nakerin	
						10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	∑ CPMI dilatih ---------- x 100% ∑ CPMI terdaftar	9 ... x 100% 9	100.00	Nakerin	
						11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ……		0	Nakerin	
	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ---------- x 100 % Jumlah Tenaga kerja	11.172.450.000 ---x 100 % 165642	6.744.938	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas tahun 2024 ---------- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun 2024	3 ... x 100% 237	1.27	Nakerin	
						2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).	=3,29-(2,39+0,05) =……..	0,95	Nakerin	
	4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100 % Jumlah Perusahaan	1 ---x 100 % 237	0.42	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2024 ---------- x 100% jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	56 ... x 100% 179	31.28	Nakerin	
						2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2024 ---------- x 100% jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	0 ... x 100% 5	0.00	Nakerin	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	5	Nakerin	
					4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah 21 ---------- x 100% ... x 100% jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP dan PKB) 56	37.50	Nakerin	
					5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 245 ---------- x 100% ... x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor 237	103.38	Nakerin	
					6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	jumlah perusahaan yang berselisih 0 ---------- x 100% ... x 100% Jumlah perusahaan pada tahun 2024 237	0.00	Nakerin	
					7	Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja	Nihil	Nakerin	
					8	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan ..... Perusaahaan	Nihil	Nakerin	
					9	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan ..... Perselisihan	Nihil	Nakerin	
					10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan ..... Perselisihan	Nihil	Nakerin	
					11	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK ..... Perselisihan	Nihil	Nakerin	
					12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK ..... Orang	Nihil	Nakerin	
					13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite ..... Perselisihan	Nihil	Nakerin	
					14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang diberdayakan	ada/tidak	Tidak ada	Nakerin	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	jumlah perjanjian bersama 1 ----------100 X ... x 100% jumlah kasus perselisihan 4	25.00	Nakerin	
	5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---------- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar	80 ---x 100 % 623	12.84	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten .....Lowongan	0	Nakerin	
						2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota ..... Orang	623	Nakerin	
						3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten ..... BKK	4	Nakerin	
						4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten ..... Orang	NIHIL	Nakerin	
						5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja ..... Orang	1	Nakerin	
						6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten .....Lembaga	NIHIL	Nakerin	
						7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten ..... Perjanjian	8	Nakerin	
						8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER..... Penempatan	80	Nakerin	
						9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	∑CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi 9 ---------- x 100% ... x 100% ∑CPMI/CTKI 9	100.00	Nakerin	
						10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata ..... Orang	9	DPMPTSP Naker	
						11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	∑ Fasilitasi PMI yang dipulangkan 4 ---------- x 100% ... x 100% ∑PMI yang pulang 4	0.00	DPMPTSP Naker	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	∑ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja 0 ---------- x 100% ... x 100% ∑PMI/TKI 0	0.00	DPMPTSP Naker	
					13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	∑ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan 0 ---------- x 100% ... x 100% ∑ PMI/TKI purna dan keluarga 0	0.00	DPMPTSP Naker	
					14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibantukan	∑ LTSA yang terbentuk 0 ---------- x 100% ... x 100% Jumlah daerah kantong PMI/TKI 0	0.00	DPMPTSP Naker	

165642

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD 29.638.429.959 ---------- x 100 % --- x 100 % Jumlah seluruh belanja operasional dan Modal di APBD 1.199.594.652.329.6	2.47	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG ..... Lembaga	41	Dinas Sosial dan PPPA	
					2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten ..... Program	82 kegiatan	Dinas Sosial dan PPPA	
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi 59 ---------- x 100 % --- x 100 % Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten 59	100.00	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak ..... Media	1	Dinas Sosial dan PPPA	
					2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal ..... Lembaga	2	Dinas Sosial dan PPPA	
					3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	jumlah korban kekerasan anak yang dilayani 65 ----------100x ... x 100 % jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten 65	100%	Dinas Sosial dan PPPA	
					4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan ..... Lembaga	2	Dinas Sosial dan PPPA	
					5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah kabupaten (APBD kabupaten)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah kabupaten (APBD kabupaten)..... Lembaga	9	Dinas Sosial dan PPPA	
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 20 ---------- x 100 % --- x 100 % Jumlah penduduk perempuan 191.161	10.46	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan ..... Organisasi	3	Dinas Sosial dan PPPA	
					2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih ..... Kader	18	Dinas Sosial dan PPPA	
					3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan ..... Lembaga	2	Dinas Sosial dan PPPA	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten ..... Lembaga	2	Dinas Sosial dan PPPA	
						5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi ..... Kebijakan	2 Program	Dinas Sosial dan PPPA	
						6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi ..... Lembaga	2	Dinas Sosial dan PPPA	
						7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan 19 ----------100x --- x 100 % Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 19	100%	Dinas Sosial dan PPPA	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras)	Jumlah cadangan pangan Pemerintah kabupaten	22.22		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	ada	Dinas Pangan Perikanan	
			---------- x 100%	---x100%	17.63	2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	ada	Dinas Pangan Perikanan	
			Jumlah target cadangan pangan Pemerintah kabupaten yang ditetapkan	126		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	tidak ada	Dinas Pangan Perikanan	
						4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	tidak ada	Dinas Pangan Perikanan	
						5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada	Dinas Pangan Perikanan	
						6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	ada	Dinas Pangan Perikanan	
						7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	ada	Dinas Pangan Perikanan	
						8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	tidak ada	Dinas Pangan Perikanan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS			No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR ---------- x 100 % Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR	430.537.47 -- x 100 % 430537.47	100%	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----------x 100% jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	0 ... x 100% 0	#DIV/0!	DPMPTSP	
						2	SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	jumlah penerbitan SK Penetapan tanah obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee ----------x 100% Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	0 ... x 100% 0	#DIV/0!	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						3	SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee ----------x 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	0 ... x 100% 0	#DIV/0!	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----------x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	0 ... x 100% 0	#DIV/0!	Dinas PUPR dan Pertanahan	
						5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----------x 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncenakan dalam 1 tahun	0 ... x 100% 0	#DIV/0!	Dinas PUPR dan Pertanahan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS			No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1852 -- x 100% 314	589.81%		-	-		Dinas PUPR dan Pertanahan	
	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ---------- x 100 Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	222215,47 -- x 100% 222215,47	100%		-	-		DPMPTSP Naker	
	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha ---------- x 100 Jumlah penerima tanah obyek landreform	0 -- x 100% 1	0%		-	-		Dinas PUPR dan Pertanahan	
	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ---------- x 100 Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0 -- x 100% 1	0%			-		Dinas PUPR dan Pertanahan	
	6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ---------- x 100 % jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	16 -- x 100% 16	100%		-	-		Dinas PUPR dan Pertanahan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU)+(0,219 x IKL) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	 40.71 91.82 58.59	65.32	1	Hasil perhitungan terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan d. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Air (IKA) Nilai relatif = Ci/Lij $IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 Rata - Rata + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 Maksimum}{2}}$ Rumus Metode IP: 0≤ PIJ ≤1,0 → Baik (Memenuhi Baku Mutu) 1,0≤ PIJ ≤5,0 → Cemar Ringan 5,0≤ PIJ ≤10,0 → Cemar Sedang PIJ >1),0 → Cemar Berat $IKTL = 100 - \left((84{,}3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54{,}3}\right)$ IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)] dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	65.32 91.86 58.59	Perkim LH	
	2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani ---------- x 100% Total vol timbunan sampah kabupaten	27.054.77 47.943.05	56.43	1	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	ada ada tidak ada	Perkim LH Perkim LH Perkim LH	
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ---------- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	21 50	42.00	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 12 ---------- x 100% -- x 100 % Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi 12	 100.00	Perkim LH	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	Jumlah PPLHD yang ada 1 ---------- x 100% --- x 100 % Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten 66	1.52	Perkim LH	
						3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten	Jumlah MHA yang diakui 1 ---------- x 100% -- x 100 % Jumlah Usulan MHA 1	100.00	PMDPPKB	
						4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yg mendapatkan pelatihan 1 ---------- x 100% -- x 100 % Jumlah MHA yg ada 1	100.00	PMDPPKB	
						5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana 0 ---------- x 100% -- x 100 % Target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat 0	0	PMDPPKB	
						6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	Pengaduan masyarakat yg ditangani 5 ---------- x 100% -- x 100 % Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 5	100	Perkim LH	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
Administrasi Kependudukan dan Catatan	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP	281706		1	Penerbitan akta perkawinan	jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	170.922		disdukcapil	
			---------- x 100 %	... x 100%	98.08			----------100x	... x 100%	100.00		
			Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas	287235				Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	170.922			
						2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	5.560		disdukcapil	
								----------100x	... x 100%	100.00		
								peristiwa perceraian yang dilaporkan	5.560			
						3	Penerbitan akta kematian	jumlah akta kematian yang diterbitkan	24.878		disdukcapil	
								----------100x	... x 100%	100.00		
								peristiwa kematian yang dilaporkan	24.878			
						4	Penyajian data kependudukan	jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun	3		disdukcapil	
								----------100x	... x 100%	150.00		
								2 tahun	2			
	2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	95.439			-	-			disdukcapil	
			---------- x 100 %		93.48							
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	102.093								
	3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun yang sudah memiliki akta lahir	101.740				-			disdukcapil	
			----------		99.64							
			Jumlah anak usia 0 – 18 tahun	102.111								
	4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	40				-			disdukcapil	
			----------		97.56							
			Jumlah OPD	41								

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun 0 ---------- x 100 % Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun 2024) 1	0	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar nagari …….. Nagari	0	Dinas PMD PPKB	
					2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah nagari yang melakukan kerja sama antar nagari tahun berjalan dikurangi jumlah nagari yang melakukan kerja sama antar nagari tahun sebelumnya ……Nagari	0	Dinas PMD PPKB	
					3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan …… Lembaga	0	Dinas PMD PPKB	
					4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan ……Desa	0	Dinas PMD PPKB	
	2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun 2 ---------- x 100 % Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2024) 2	100.00	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa …… Desa	0	Dinas PMD PPKB	
					2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya …… Desa	0	Dinas PMD PPKB	
					3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan …… Lembaga	8	Dinas PMD PPKB	
					4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan …… Desa	2	Dinas PMD PPKB	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ $ASFR\ i = \frac{b_i}{p_i^f} x\ k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu Pi = Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = Kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, 1=2 untuk kelompok umur 20-24,……, i=7 untuk kelompok umur 45-49 K= Bilangan konstanta biasanya 1000 TFR Kabupaten Tanah Datar yaitu ……	……	0,18	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	tidak Ada	PMDPPKB	
						2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	29 tahun	Capil	
						3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	ASFRi= bi / pf X k ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	68	dinas Kesehatan	
						4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) 28162 ----------x100% -- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) 28267	99.63	PMDPPKB	
						5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	16	PMDPPKB	
	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ---------- x 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur	30239 --- x 100% 45162	66.96	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP 29 ----------x100% -- x 100% Jumlah faskes 29	100.00	PMDPPKB	
						2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB aktif 11044 ----------x100% -- x 100% Jumlah PUS 45162	24.45	PMDPPKB	
						3	Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	70	PMDPPKB	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
						4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern 2964 ----------x100% -- x 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan 4.661 (KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari)	63.59	Dinas Kesehatan	
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ---------- x 100 % Jumlas Pasangan Usia Subur	3.812 --- x 100% 45162	8.44	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	59.51%	PMDPPKB	
						2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI 12874 ----------x100% -- x 100% jumlah keluarga PBI 19840 Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah	64.89	PMDPPKB	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja -2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektvitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	(12/27)+(0*0)=0.44	0.44	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasiltas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia ----------x100% Jumlah fasiltas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	11 ---x100% 18	61.11	Dishub	
						2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----------x100% Jumlah kendaraan wajib uji	5277 ---x100% 7016	75.21	Dishub	
						3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ----------x100% Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten	Nihil ---x100% Nihil	0.00	Dishub	
						4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten ----------x100% Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten	853 ---x100% 1071	79.65	Dishub	
	2	V/C Ratio di jalan Kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten V (Volume Lalu Lintas) ---------- C (Kapasitas Jalan)	8620.9 ------ 62678.49	0.14	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten ----------x100% Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten	425 ---x100% 555	76.58	Dishub	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2023	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 41 ---------- 100% --x100% Jumlah PD 41	100	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 41 ----------x100% ------x100% Jumlah perangkat daerah 41	100	Diskominfo	
					2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo 41 ----------x100% ------x100% Jumlah perangkat daerah 41 Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	100	Diskominfo	
					3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	ya (daftar)	Diskominfo	
	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 13 ---------- x 100 % ---- x Jumlah Layanan Publik 17	76.471	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 53 ----------x100% ---x100% Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah daerah 53	100	Diskominfo	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2023	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 41 ----------x100% ---x100% Jumlah Perangkat Daerah 41	100	Diskominfo	
					3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. 41 ----------x100% ---x100% Jumlah Perangkat Daerah 41	100	Diskominfo	
					4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimpelementasikan secara elektronik. 30 ----------x100% ---x100% jumlah layanan 50	60.00	Diskominfo	
					5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik 50 ----------x100% ---x100% jumlah layanan 50	100.00	Diskominfo	
					6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 50 ----------x100% ---x100% jumlah sistem elektronik 50	100.00	Diskominfo	
					7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layananan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah 23 ----------x100% ---x100% Jumlah layanan publik dan layanan administrasi 50	46.00	Diskominfo	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2023	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 41 ----------x100% ---x100% Jumlah perangkat daerah 41	100	Diskominfo	
					9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat 41 ----------x100% ---x100% Jumlah perangkat daerah 41	100	Diskominfo	
					10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya 41 ----------x100% ---x100% Jumlah perangkat daerah 41	100	Diskominfo	
					11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai 75 ----------x100% ---x100% Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah 75	100	Diskominfo	
					12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city 41 ----------x100% ---x100% Jumlah perangkat daerah 41	100	Diskominfo	
					13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo 6 ----------x100% ---x100% Jumlah ASN pengelola TIK 14	42.86	Diskominfo	
					14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: • Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran •Penganggaran •Strategi •Peta Jalan • Arah Kebijakan •Cetak biru teknis/Peta rencana strategi	tidak ada	Diskominfo	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja - 2023	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
								2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab		Ada		
	3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ---------- x 100 % Jumlah penduduk	256323 256323	100.00	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kabupaten yang telah menyebarkan infromasi dan kebijakan pemerintah ----------x100% Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah kabupaten Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.	200 ---x100% 200	100.00	Diskominfo	
						2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ----------x100% Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah	7339 ---x100% 7339	100.00	Diskominfo	
						3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan infromasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP ----------x100% Diseminasi dan layanan informasi publik	18367 ---x100% 18367	100.00		

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**1**	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ---------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	16 .....X100% 120	13.33	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----------x100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	1 .....X100% 109	0.92	DKUKMP	
						2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----------x100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0 .....X100% 0	0	DKUKMP	
						3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	7 .....X100% 120	5.83	DKUKMP	
						4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----------x100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	7 .....X100% 110	6.36	DKUKMP	
						5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----------x100% Jumlah koperasi yang ada	50 .....X100% 120	41.67	DKUKMP	
						6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----------x100% Jumlah anggota koperasi yang ada	108 .....X100% 38161	0.28	DKUKMP	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
						7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----------x100% jumlah koperasi yang ada	1 .....X100% 120	0.83	DKUKMP	
						8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	-	0	DKUKMP	
						9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----------x100% jumlah koperasi yang ada	99 .....X100% 120	82.50	DKUKMP	
						10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ----------x100% jumlah koperasi yang ada	2 .....X100% 120	1.67	DKUKMP	
						11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----------x100% jumlah koperasi yang ada	0 .....X100% 120	0.00	DKUKMP	
						12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----------x100% jumlah koperasi yang ada	73 .....X100% 120	60.83	DKUKMP	
					0.46	13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----------x100% jumlah koperasi yang ada	4 .....X100% 120	3.33	DKUKMP	
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha Mikro yang menjadi wirausaha ---------- x 100 % Jumlah usaha Mikro keseluruhan	90 .....X100% 19628	0.459	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----------x100% Jumlah wirusaha yang ada	90 .....X100% 19.628	0.46	DKUKMP	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
					2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	19.628		DKUKMP	
							----------x100%	.....X100%	100.00		
							Jumlah usaha mikro yang ada	19.628			
					3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	30		DKUKMP	
							----------x100%	.....X100%	0.15		
							Jumlah usaha mikro yang ada	19.628			
					4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasiltasi standarisasi dan sertifikasi	120		DKUKMP	
							----------x100%	.....X100%	0.61		
							Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	19.628			
					5	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasiltasi pemasaran	30		DKUKMP	
							----------x100%	.....X100%	0.15		
							Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	19.628			
					6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	400		DKUKMP	
							----------x100%	.....X100%	2.04		
							jumlah usaha mikro yang ada	19.628			
					7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	150		DKUKMP	
							----------x100%	.....X100%	0.76		
							jumlah usaha mikro yang ada	19.628			

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	2106		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Dinas Parpora	
			---------- x 100 %	.. x 100%	2.21						
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	95386		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Parpora	
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten	5295		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	71	Dinas Parpora	
			---------- x 100 %	---- x 100	5.55	2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Parpora	
			jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	95386							
	3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (dibuat dalam daftar terpisah emas, perak, dan perunggu)		17 Emas	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	129	Dinas Parpora	
					14 Perak 16 Perunggu	2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	12	Dinas Parpora	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja -2023	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2024 - jumlah investasi tahun 2023) di kabupaten (231.977.032.017-219.171.688.558) 12.805.343.459 ---------- x 100 % .....X100% Jumlah investasi tahun 2023 di kabupaten 219.171.688.558	5.84	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	0	DPMPTSP	
					2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	0	DPMPTSP & Naker	
					3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	0	DPMPTSP & Naker	
					4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	0	DPMPTSP	
					5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	2	DPMPTSP	
					6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	6	DPMPTSP	
					7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	58	DPMPTSP	
					8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	35662	DPMPTSP	
					9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten	231.977.032.017	DPMPTSP	
					10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	8	DPMPTSP	
					11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	135	DPMPTSP	
					12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	16	DPMPTSP	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2023	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Statistik	1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100 % jumlah OPD	41 ---- x 100 % 41	100.00	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada	Diskominfo	
						2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	16	Diskominfo	
						3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	16	Diskominfo	
						4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	7	Diskominfo	
						5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	Diskominfo	
						6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral 32 ----------x100% ------ x100% Jumlah kegiatan statistik sektoral 32	100	Diskominfo	
						7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral 3 ----------x100% ------ Jumlah indikator statistik sektoral 3	100	Diskominfo	
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100 % jumlah PD	41 ---- x 100 % 41	100.00		---	---	---	Diskominfo	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS		Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja - 2022	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten	Jumlah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100 % Jumlah area penilaian	23.756 ---- x 100 645	3.68	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----------X 100% Jumlah Kegiatan Strategis yang ada	0 ------ 0	0	Diskominfo	
						2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----------X 100% Jumlah SE yang ada	14 ------ 50	28.00	Diskominfo	
						3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----------X 100% Jumlah SE yang ada	14 ------ x100% 50	28.00	Diskominfo	
						4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan ----------X 100% Jumlah titik pada PHKS	0 ------ 0	0	Diskominfo	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kebudayaan	**1**	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 68 ---------- x 100 % --x100%	100.00	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah OPK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	(16+0+35+0+25)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	(0+15+19)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah cagar budaya yang terdata 68		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	28 Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	733 Orang + disertifikasi 0 + Lembaga distandarisasi 0 + 29 lembaga + 0 Pranata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	68 objek- 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					6	Perlindungan cagar budaya kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	(0+0+0+3+0)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar kabupaten	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	0+0+0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					9	Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	68 CB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	(0+0+0+0)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (parpora)	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	... Orang 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (parpora)	
					12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (parpora)	
					13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	1 Tim (7 orang)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	1 Tim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	33 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	62,07%	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) 20.860 ---------- ------x100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 383.676	5.44	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
					2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite 20.337 ---------- ------x100% Jumlah penduduk di wilayahnya 383.676	5.30	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
					3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayah 41 ---------- ------x100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 383.676	0.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
					4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 63 ---------- ------x100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya 499	12.63	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
					5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat …… pemasyarakatan	111	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus sejumlah unsur pembangunan literasi mayarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) ∑ UPLM/ALM x 100 = ... UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan = UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan=	67,81	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya …… naskah	0	Pendidikan dan Kebudayaan	
					2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa …… naskah	0	Pendidikan dan Kebudayaan	
					3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya …… item	633	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T=a+i+s+j/4 T = Tingkat ketersediaan arsip **75.06** a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 100 i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip 100 s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 100 j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 0.25	75.06	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 25247 ----------x100% ------ Jumlah seluruh arsip aktif 25247	100.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
					2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip 17320 ----------x100% ------ x100% jumlah seluruh arsip inaktif 17320	100.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
					3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 9097 ----------x100% ------ Jumlah seluruh arsip statis 9097	100.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
					4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 127 ----------x100% ------ jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten 51.664	0.25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	**T** = (**m** + **b** + **g** + **a** + **c** + **i**)/**6** **T**= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban **m** = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK 1 **b** = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK 0 **g** = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK 100	50	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan	225	Dinas Perpustakaan	
					2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	NIHIL	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
					3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	961	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK 100 **c** = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK 100		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	NSPK autentifikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentifikasi Arsip Elektronik	439	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK 0		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	7.903	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
					6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kelautan dan Perikanan	**1**	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP) 11050.7 .....x 100	100.000	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Dinas Pangan dan Perikanan	
					2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasinal	Jumlah TPI yang operasional 0 ----------x100% --x100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten 0	0	Dinas Pangan dan Perikanan	
		Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	11050.7		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	0	Dinas Pangan dan Perikanan	
					4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan Pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek daninformasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	0	Dinas Pangan dan Perikanan	
					5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	8119,86	Dinas Pangan dan Perikanan	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun 2024 – Jumlah wisatawan tahun 2023) (39201-27146) 12.035 ---------- x 100 % ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun 2023 27.166	44.30	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	38	Dinas Parpora	
					2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	293	Dinas Parpora	
					3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten	0	PMPTSP Naker	
					4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	39201	Dinas Parpora	
					5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	26	Dinas Parpora	
					6	Jumlah event luar negeri yang Diikuti kabupaten	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten	0	Dinas Parpora	
					7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	70	Dinas Parpora	
					8	Persentase tenaga kerja disektor parwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi 19 ----------x100% ------ jumlah tenaga kerja pariwisata 609	3.12	Dinas Parpora	
					9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan 280 ---------- ------ jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan 609	45.98	Dinas Parpora	akumulasi

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6	Dinas Parpora	
	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun 2024 – Jumlah wisatawan tahun 2023) (1166652-1108151) 58501 ---------- x ------x100% Jumlah wisatawan tahun 2023 1.108.151	5.28		-	-		Dinas Parpora	
	3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual 28205 ---------- x 100 % ------x100% Jumlah kamar yang tersedia 206955	13.63		-	-		Dinas Parpora	
	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB 2.675.380.000.000 ---------- x 100 % Total PDRB Berlaku 17.496.030.000.000	15.29		-	-		Dinas Parpora	
	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata 8.792.545.870 ---------- x 100 % Total Realisasi PAD 163.268.531.406.86	5.39		-	-		Dinas Parpora	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun 341.421.55 ---------- x 100% -----x100% Luas Panen 58.254.02	5.86	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	203	Dinas Pertanian	
					2	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	199	Dinas Pertanian	
					3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas PMPTSP Naker	
					4	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan 199 ----------x100% -----x100% Jumlah prasarana yang dibangun 199	100	Dinas Pertanian	
					5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian	Jumlah usulan yang difasilitasi 17 ----------x100% -----x100% Jumlah usulan usaha pertanian 17	100	Dinas PMPTSP	
	2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2024 - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2023 946 ---------- x 100% -----x100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2023 597	158.46	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan hewan menular)	Jumlah area yang dapat ditanggulangi 1114 ----------x100% -----x100% Luas area terkena bencana 1114	100	Dinas Pertanian	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kehutanan	1	Kehutanan		100	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Ada/Tidak (Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan.)	Tidak ada	Perekonomian	
					2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	Tidak ada	Perekonomian	
					3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Tidak ada	Perekonomian	
					4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Tidak ada	Perekonomian	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Energi Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin 0 ---------- x 100 % ---- x 100 % Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi 1	0	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	1	Nakerin	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perdagangan	**1**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan 71 ---------- x 100 % -- x 100 % Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten 71	100.00	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			DKUKMP	
						a. Pusat perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja 43 ----------x100% ---X100% jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar 43	100		
						b. Toko swalayan	jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan <5 hari kerja 28 ----------x100% ---- x 100 % jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar 28	100	DKUKMP	
					2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG≤ 5 hari kerja 2 ----------x100% ---- x 100 % Jumlah permohonan penerbitan TDG 2	100	DKUKMP	
					3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG ---- x 100 %	Jumlah penerbitan TDG 13 ----------x100% ---- x 100 % Jumlah gudang yang ada di kabupaten 13	100	DKUKMP	
					4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :			DKUKMP	
						a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar 0			
						b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	----------x100% ---- x 100 %	0		
						c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	jumlah permohonan STPW untuk penerima warabala dari waralaba dalam negeri 0 b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima lanjutan warabala dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar 0 ----------x100% ---- x 100 % jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari warabala dalam negeri 0	0		

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus		Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
							c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :	0			
							Jumlah STPW untuk penerima lanjutan warabala dari warabala luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0			
							----------x100%	---- x 100 %	0		
							jumlah permohonan STPW untuk penerima warabala lanjutan dari warabala luar negeri	0			
					5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah kabupaten	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten	0		DKUKMP	
							----------x100%	---- x 100 %	0		
							jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer	0			
					6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1x24jam)	0		DKUKMP	
							----------x100%	---- x 100 %	0		
							jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	0			
					7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	K = (a + b) x 100%			DKUKMP	
							K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				
							a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)	0	52		
							sda				
							b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya	52			
					8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga	6,35%	6,35%	DKUKMP	
							antar waktu per komoditas bahan pokok				

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi 12.706.00 ---------- x --- x 100 % 100 % RDKK 34.596.00	36.73	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$x = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan 12.706.00 b = Target komisi pengawasan Pupuk dan 25.420 dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) 34.596.00	0.00014	Dinas Pertanian	
	3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun 2024 270 ---------- x --- x 100 % 100 % Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten 7454	3.62	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan 270 ----------x100% --- x 100 % Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten 7454	3.62	DKUKMP	
					2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasai dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku 0 ----------x100% --- x 100 % Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan 0	0.00	DKUKMP	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun 2024 - Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun 2023) (5.956-5556) 400 ---------- x 100 % ----- x 100 % Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023 5556	7.20	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan nihil ---------- ---- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk nihil	0	Nakerin	
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	15	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	0	Nakerin 100 100	
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ---------- x 100 % ----- x 100 Jumlah izin yang dikeluarkan 1	0.00	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan (NIB)	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 5556 ---------- ---- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 5556	100	Dinas PMPTSP Naker	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ---------- x 100 % ----- x 100 Jumlah izin yang dikeluarkan 1	0	1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	jumlah realisasi izin yang diterbitkan 0 ---------- ---- x 100 % jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 0	0	Nakerin	
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ---------- x 100 % ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 1	0			-			
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri :	tersedia	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten di SIINas 136 ---------- -- x 100 % Total populasi perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di kabupaten 5556	2.447804176	Nakerin	
			- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	tersedia						
			- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	tersedia						
			- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	0						
			2) Kelengkapan informasi industri meliputi :							
			- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	tersedia						
			- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	Tidak tersedia						
			- Informasi bahan bakar bakar/energi (10%)	Tidak tersedia						
			- Informasi Tenaga Kerja (10%)	tersedia						
			- Informasi Investasi (10%)	tersedia						

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS	Hasil	No	IKK OUTPUT	Rumus	Capaian Kinerja - 2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Transmigrasi	1	Transmigrasi		100	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya.....	NIHIL		
					2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya.....	NIHIL		
					3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	..... Permukiman	NIHIL		

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	HASIL	CAPAIAN KINERJA -2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----------'----- x 100% Jumlah APBD	469.044.939.723.00 ---- x 100 % 1.330.452.839.180.90	35.25	BPKD	
	2	Rasio PAD	Jumlah PAD ---------- x 100 % Jumlah Pendapatan pada APBD	163.268.531.406.86 ---- x 100 % 1.330.452.829.180.90	12.27	BPKD dan Bappenda	
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2 dengan nilai 2,797	2,797	Inspektorat	
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 dengan nilai 3,00	3	Inspektorat	
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ---------- x 100 % Jumlah belanja APBD	1.205.744.525.548.60 ---- x 100 % 1.365.213.503.621.60	88.32	BPKD	
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 Tahun Terakhir)	2015: WTP 2016: WTP 2017: WTP 2018: WTP 2019: WTP 2020: WTP 2021: WTP 2022: WTP 2023 WTP 2024 WTP	10	BPKD	
Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024 ---------- x 100 % Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2024	0 ---- x 100 % 465	0	Bagian PBJ	
	2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ---------- x 100 % Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	37 ---- x 100 % 465	7.96	Bagian PBJ	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	HASIL	CAPAIAN KINERJA -2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan ---------- x 100 % Total belanja modal dan operasional	102.185.438.446.00 ---- x 100 % 1.199.594.652.329.6	8.52	Bagian PBJ	
	4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n) - jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1) ---------- x 100 % jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1)	17.829.520.474.00 ---- x 100 % 164.761.246.192.00	10.82	Bagian PBJ	
Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai (diluar guru dan tenaga kesehatan)	1332 ---- x 100 % 1653	80.58	BKPSDM	
	2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai ASN fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai pemerintah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	441 ---- x 100 % 1653	26.68	BKPSDM	
	3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai Fungsional (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	176 ---- x 100 % 441	39.91	BKPSDM	
Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\{(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}})-1\}x100\%$	1.365.213.503.621.60 ---------- x 100 % 1.398.919.280.321.00	-2.41	BPKD	
	2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\{(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{total PAD dalam APBD}})-1\}x100\%$	163.268.531.406.86 ---------- x 100 % 152.635.540.000.00	6.97	BAPPENDA	

URUSAN	NO.	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	HASIL	CAPAIAN KINERJA -2024	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	100	BPKD	
	4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ---------- x 100 % Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	78.566.966.162.00 ---------- x 100 % 1.299.969.192.850.00	6.04	BPKD	
Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ---------- x 100 % Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	1365213503621.58 ---- x 100 % 1.444.187.319.890.00	94.53	BPKD	
	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ---------- x 100 % Total jumlah dokumen yang telah dirinci	37 ---- x 100 % 37	100.00	Diskominfo	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.3.1. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

Dalam RPJMD tersebut ditetapkan visi pembangunan daerah adalah "*Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*".

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran agar pencapaian masing-masing misi dapat terukur secara tahunan maupun lima tahunan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan konkuren pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021– 2026 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.2
Matriks Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja RPJMD
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

Misi 1 : Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	Meningkatkan aktivitas bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	1. Meningkatnya Pembangunan Keagamaan Masyarakat	1. Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda
			2. Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat
		2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif
Misi 2 : Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 2. Angka Pengangguran Terbuka 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB 2. Nilai Tukar Petani/ NTP
		2. Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah wirausaha baru
Misi 3 : Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Umur harapan hidup Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
		3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Angka Kemiskinan 2. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Misi 4 : Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai Destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (sektor akomodasi dan makan minum)	1. Peningkatan Daya Saing Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan
			2. Lama Tinggal Wisatawan
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Indeks reformasi birokrasi	1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK atas laporan keuangan
			2. Nilai SAKIP
			3. Indeks Pengawasan Kearsipan
			4. Manajemen resiko level 3
		2. Meningkatnya birokrasi yang kafabel	1. Indeks SPBE
			2. Indeks Profesionalitas ASN
			3. Skor dan status kinerja pemerintah daerah
		3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Terwujudnya infrastruktur berkualitas	2. Persentase Infrastruktur Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	1. Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase Bencana yang ditangani	1. Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1. Persentase Bencana yang ditangani

RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 menetapkan 10 Program Unggulan sebagai berikut:

1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun

Perkembangan ekonomi suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Beberapa permasalahan dalam ketenagakerjaan yang ditemui masyarakat antara lain terkait dengan tingginya tingkat pengangguran, penyediaan lapangan kerja yang terbatas, serta produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

Melalui program unggulan menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun, diharapkan kedepannya akan bermunculan lapangan kerja baru yang berasal dari meningkatnya pemberdayaan usahawan itu sendiri maupun peningkatan jumlah investor untuk menghidupkan industri yang cocok dengan alam dan potensi Tanah Datar sehingga membuka lapangan kerja baru. Selain bertujuan untuk mengurangi pengangguran, program ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan kesejahteraan masyarakat karena akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan barang penting di Kabupaten Tanah Datar.

2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah

Kinerja di sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar. Kinerja ini perlu peningkatan dari tahun ketahun. Salah satu yang mempengaruhi kinerja pertanian adalah biaya produksi, untuk menekan biaya produksi ini akan dilakukan efesiensi dalam pengelolaan alsintan, khususnya dalam proses pembajakan sawah. Dengan mengefesienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah diharapkan biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh petani tidak terlalu besar tetapi mendapatkan keuntungan yang meningkat.

3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi

Beberapa hal lain yang juga mempengaruhi pendapatan petani adalah terjadinya musibah baik berupa gagal panen maupun kematian ternak, selain itu kemudahan mendapatkan pupuk juga menjadi poin penting dalam usaha meningkatkan usaha pertanian. Dengan adanya pemberian kuota asuransi tani dan ternak diharapkan petani yang mengalami musibah gagal panen atau peternak yang hewan ternaknya

mati akan dilakukan penggantian melalui mekanisme asuransi. Kemudian pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kuota kartu tani guna mendapatkan pupuk bersubsidi, bibit dan bantuan pertanian lainnya.Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk memberikan perlindungan bagi petani/kelompok tani yang mengalami gagal panen akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kejadian bencana alam banjir serta kekeringan dengan target 1.000 Ha.

4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh ibukota kabupaten

Administrasi Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pada era baru ini paradigma pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, kepada masyarakatnya sudah mulai bergeser. Dimana dulunya masyarakat harus hadir di tempat lokasi pelayanan yang diberikan pemerintah, harus berpindah dari satu pelayanan ke pelayanan berikutnya, harus mengantri, memakan waktu yang cukup lama, bahkan juga tenaga dan biaya yang tentunya tidak sedikit bila harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Hal tersebut sekarang sudah mulai di minimalisir dimana salah satu cara dan solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar masyarakat yang berada cukup jauh dari pusat pelayanan adalah dengan menghadirkan sebuah konsep yang dinamakan: "Pelayanan Publik Tanah Datar di Ujung Jari". "Tanah Datar di Ujung Jari" adalah sebuah program kerja yang didesain untuk mendekatkan pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar kepada masyarakat diseluruh nagari baik pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang diberikan pemerintah daerah atau dari kantor wali nagari dari rumah melalui telepon pintar *smartphone.*

5. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfiz telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari RPJMD periode sebelumnya. Salah satu program yang penting dan sangat mendukung keberhasilan kegiatan ini adalah peningkatan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz. Pelaksanaan dari kegiatan ini pemberian insentif sehingga guru TPA dan Tahfiz lebih fokus mengajar anak-anak didiknya menjadi hafiz

dan hafizah selain itu hal yang sangat penting adalah peningkatan anggaran untuk operasional rumah tahfiz. Kedepan diharapkan akan lahir satu rumah satu tahfiz.

6. **Satu nagari satu *event* untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari**

Perkembangan pariwisata masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung. yang sampai saat ini masih belum tergantikan posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, bukan berarti pengembangan pariwisata hanya difokuskan pada Istano Basa Pagaruyung saja.

Pada periode RPJMD ini pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif dengan merancang event-event pariwisata dan olah raga berbasis kearifan lokal masing-masing nagari dan kecamatan. Dengan adanya event-event ini diharapkan akan memacu aktifnya sanggar-sanggar nagari, klub olah raga dan UMKM yang ada.

7. **Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan**

Kabupaten Tanah Datar adalah tempat asal usul orang Minangkabau atau dikenal sebagai Luhak Nan Tuo. Dengan demikian, upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjaga identitas sebagai orang Minangkabau. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar secara tipikal adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau. Secara empiris kita dapat melihat dari tingkat kepatuhan masyarakat kepada para Ninik Mamak/Penghulu/Pemangku Adat yang masih sangat kuat. Hal ini juga ditopang oleh keberadaan lembaga-lembaga adat di lingkungan masyarakat, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga-lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Dalam rangka mendukung peran penting lembaga adat maka pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan biaya operasional untuk KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang sehingga lebih fokus untuk mendidik anak kamanakan dalam memahami adat dan budaya minangkabau. Hal ini penting untuk mengukuhkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat kebudayaan minangkabau.

8. Membangun jaringan telekomunikasi

Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga ke daerah yang dulunya tidak terjangkau sekalipun. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah jaringan komunikasi (tower penyedia jasa komunikasi seluler) yang terus meningkat setiap tahun. Rasio wartel/warnet cenderung mengalami stagnan dalam 5 tahun terakhir. Kondisi geografis seringkali menjadi faktor utama minimnya sinyal yang ada di suatu tempat. Bahkan tidak jarang semakin sulit medan dan kondisi geografisnya, sinyal komunikasi hilang sama sekali. Contohnya saja, suatu tempat yang terpencil di tengah hutan atau di wilayah pegunungan. Sinyal akan sulit didapatkan karena tidak adanya sarana pendukung untuk menangkap sinyal yang ada seperti BTS dan kabel optik. Terlebih bagi daerah dengan kondisi geografis terjal, akan sulit untuk dibangun sebuah BTS mengingat sulitnya material yang dibawa menuju tempat tersebut. Dengan kondisi topografi Kabupaten Tanah Datar yang berbukit dan bergelombang tidak semua daerah dapat dijangkau oleh sinyal sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah daerah akan membangun sarana dan prasarana pendukung telekomunikasi guna mengatasi *blank spot* di daerah yang belum mempunyai akses jaringan komunikasi dan internet.

9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer

ASN merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahaan. Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah kesejahteraan dimana penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. bahwa ASN berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya serta berhak memperoleh jaminan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan publik maka diperlukan profesionalisme ASN sesuai dengan bidang tugas, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan diklat ataupun bimtek bagi ASN guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

10. Perbaikan irigasi

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Manfaat irigasi umumnya digunakan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian secara luas termasuk di dalamnya

kebutuhan, peternakan, dan perikanan. Walaupun demikian kebutuhan irigasi untuk tanaman padi masih mendominasi kebutuhan irigasi secara menyeluruh. Sektor pertanian di Kabupaten Tanah Datar merupakan sektor terbesar dalam penyumbang PDRB hampir 29%, artinya masyarakat Kabupaten Tanah Datar menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Guna meningkatkan hasil pertanian perlu didukung dengan membangun jaringan irigasi yang baik untuk melayani lahan persawahan yang belum terjangkau oleh aliran air maupun lahan sawah tadah hujan sehingga pola tanam dapat lebih ditingkatkan, dengan demikian kesejahteraan petani akan meningkat.

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2022 memuat tema pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tema dan Prioritas Pembangunan

Tema	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Program Unggulan Daerah**
Prioritas 1	Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya
Prioritas 2	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi
Prioritas 3	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian
Prioritas 4	Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah
Prioritas 5	Peningkatan kualitas SDM
Prioritas 6	Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup
Prioritas 7	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berkualitas

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi misi dan merealisasikan 10 Program Unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat, pada tahun 2024 telah disusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun

2021, dan berdasarkan Perubahan APBD TA 2024 telah disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tanpa mengubah indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis			Indikator	Target pada PK 2024	Target pada Perubahan PK 2024
MISI I : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA					
1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1.	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	10.000	10.000
		2.	Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	11.540.498.673	11.540.498.673
2.	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS SBK	3.	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	95%	95%
MISI II : MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA YANG BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI DAN UMKM					
3.	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian	4.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,19%	30,19%
		5.	Nilai Tukar Petani/NTP	> 100	> 100
4.	Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif	6.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14%	14%
		7.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,95%	13,95%
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	8.	Jumlah wirausaha baru	1.000	1.000
MISI III : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING					
6.	Meningkatnya mutu pendidikan	9.	Rata-rata lama sekolah	9,02	9.02
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10.	Umur harapan hidup	74,19	74,19

Sasaran Strategis			Indikator	Target pada PK 2024	Target pada Perubahan PK 2024
		11.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%	14%
8.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	12.	Angka kemiskinan	4,06	4,06
		13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	60
		14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,9	98,9
MISI IV : PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERBASIS ADAT, BUDAYA DAN SUMBER DAYA ALAM					
9.	Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	15.	Jumlah kunjungan wisatawan	1.200.000 Orang	1.200.000 Orang
		16.	Lama tinggal wisatawan (hari)	2	2
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN					
10.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	17.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP
		18.	Indeks Pengawasan Kearsipan	B	B
		19.	Nilai SAKIP	71 (BB)	71 (BB)
11.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	20.	Indeks SPBE	3,22	3,22
		21.	Indeks Profesionalitas ASN	79,8	79,8
		22.	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,2	3,2
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95

Sasaran Strategis			Indikator	Target pada PK 2024	Target pada Perubahan PK 2024
MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN					
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	24.	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	76,78%	76,78%
14.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
15.	Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	26.	Persentase bencana yang ditangani	100%	100%

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Permenpan RB No 53 Tahun 2014, menyesuaikan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung Prioritas Pembangunan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3. Program penataan bangunan gedung
4. Program Penyelenggaraan Jalan

C. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan untuk mewujudkan 10 Program Unggulan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, telah dialokasikan anggaran pada APBD Pemeirintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Anggaran Pembangunan Tahun 2024

No	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	79.078.206.452	81.009.046.452	1.930.840.000
2.	Program Pengembangan Kurikulum	33.577.500	33.577.500	0
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.931.379.173	23.938.027.461	4.006.648.288
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	885.487.500	865.487.500	(20.000.000)
5.	Program Pengembangan	553.425.000	850.925.000	297.500.000

No	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Kesenian Tradisional			
6.	Program Pembinaan Sejarah	21.262.500	21.293.700	31.200
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.155.000	50.155.000	0
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53.799.940.821	57.214.600.776	3.414.659.955
9.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	568.329.400	568.329.400	0
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.050.930.092	3.600.930.092	550.000.000
11.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.593.640.695	14.331.345.595	1.737.704.900
12.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.502.184.308	1.418.184.308	(84.000.000)
13.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	821.597.500	846.597.500	25.000.000
14.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	977.309.700	1.345.309.700	368.000.000
15.	Program Penataan Bangunan Gedung	1.803.793.750	3.262.769.914	1.458.976.164
16.	Program Penyelenggaraan Jalan	69.010.099.770	91.980.158.682	22.970.058.912
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	41.192.250	41.192.250	0
18.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	827.793.280	732.809.452	(94.983.828)
19.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	14.595.000	14.595.000	0
20.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.300.000	10.300.000	0
21.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	299.618.400	299.618.400	0
22.	Program Penatagunaan Tanah	23.000.000	23.000.000	0
23.	Program Pengembangan Perumahan	62.500.000	62.500.000	0
24.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.000.000	1.000.000	0
25.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000	2.08.000.000	8.000.000
26.	Program Pengendalian	1.413.552.500	1.413.552.500	0

No	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
27.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	352.042.940	424.442.940	72.400.000
28.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	3.500.000	3.500.000	0
29.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.250.000	1.250.000	0
30.	Program Pengelolaan Persampahan	5.143.402.733	5.984.787.233	841.384.500
31.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	971.992.455	1.023.264.955	51.272.500
32.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.738.213.180	1.570.841.080	(167.372.100)
33.	Program Penanggulangan Bencana	511.465.299	1.492.881.799	981.416.500
34.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	12.000.000	158.945.000	146.945.000
35.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.991.233.276	28.039.238.476	(1.951.994.800)
36.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.200.000	26.200.000	25.000.000
37.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.499.500	1.499.500	0
38.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	537.211.520	871.811.520	334.600.000
39.	Program Pemberdayaan Sosial	109.119.600	79.119.600	(30.000.000)
40.	Program Rehabilitasi	15.035.008.922	18.324.080.552	3.289.071.630

No	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Sosial			
41.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	588.226.600	748.167.298	159.940.698
42.	Program Penanganan Bencana	56.850.000	56.850.000	0
43.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	12.000.000	18.800.000	6.800.000
44.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	453.727.800	523.727.800	70.000.000
45.	Program Perlindungan Perempuan	76.819.800	81.619.800	4.800.000
46.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7.559.800	7.559.800	0
47.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15.089.700	15.089.700	0
48.	Program Perlindungan Khusus Anak	376.564.200	377.866.700	0
49.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	429.190.700	477.294.700	48.104.000
50.	Program Penempatan Tenaga Kerja	52.876.800	52.876.800	0
51.	Program Hubungan Industrial	23.104.000	0,00	0
52.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3.000.000	3.000.000	0
53.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	11.566.009.580	11.373.087.080	(192.922.500)
54.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	37.024.000	181.009.000	143.985.000
55.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	33.299.200	33.299.200	0
56.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.462.400	4.462.400	0
57.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	331.385.547	356.385.547	25.000.000
58.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	200.000.000	200.000.000	0
59.	Program Pendaftaran Penduduk	373.330.400	385.090.602	11.760.202
60.	Program Pencatatan Sipil	131.942.000	131.942.000	0
61.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000	8.200.000	0
62.	Program Pengelolaan	892.000	892.000	0

No	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Profil Kependudukan			
63.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.500.000	1.500.000	0
64.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	41.413.500	151.413.500	110.000.000
65.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.253.230.820	3.660.830.820	407.600.000
66.	Program Pengendalian Penduduk	9.408.230	9.408.230	0
67.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.636.034.692	4.700.834.692	64.800.000
68.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.330.438.750	2.330.438.750	0
69.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.118.152.160	13.203.952.160	85.800.000
70.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	893.092.584	1.699.092.584	806.000.000
71.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	815.965.682	835.965.682	20.000.000
72.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	61.664.400	71.664.400	10.000.000
73.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.000.000	3.000.000	0
74.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	7.275.000	12.275.000	5.000.000
75.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	192.000.000	192.000.000	0
76.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	497.625.236	497.625.236	0
77.	Program Pengembangan UMKM	602.056.820	602.056.820	0
78.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	255.357.819	268.557.819	13.200.000
79.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	54.259.530	80.759.530	26.500.000
80.	Program Pengembangan Ekspor	1.500.000	1.500.000	0
81.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	62.028.520	77.028.520	15.000.000

No	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
82.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	87.748.800	103.198.800	15.450.000
83.	Program Promosi Penanaman Modal	117.325.000	152.325.000	35.000.000
84.	Program Pelayanan Penanaman Modal	506.692.420	507.932.420	1.2
85.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	791.987.000	791.987.000	0
86.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.757.500	15.757.500	0
87.	Program Pembinaan Perpustakaan	323.194.100	324.694.100	1.500.000
88.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	4.607.500	4.607.500	0
89.	Program Pengelolaan Arsip	21.173.580	50.983.580	29.810.000
90.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	5.732.500	9.122.500	3.390.000
91.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	30.000.000	45.000.000	15.000.000
92.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.571.741.600	1.941.741.600	370.000.000
93.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	0
94.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.412.777.320	6.442.777.320	30.000.000
95.	Program Pemasaran Pariwisata	2.539.000.000	2.449.000.000	(90.000.000)
96.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	31.000.000	46.000.000	15.000.000
97.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.769.120.210	16.166.620.210	397.500.000
98.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.126.287.550	6.559.114.681	432.827.131
99.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.278.858.350	2.278.858.350	0
100.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	238.263.000	263.263.000	25.000.000
101.	Program Penyuluhan	1.429.590.400	1.329.590.400	(100.000.000)

No	Program	APDB 2024	APBD-P 2024	+/-
	Pertanian			
102.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.401.049.348	5.691.049.348	290.000.000
103.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	510.765.886	644.215.886	133.450.000
104.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	33.923.436.012	26.098.104.212	(7.825.331.800)
105.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	355.288.700	385.788.700	30.500.000
106.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	210.219.725	362.720.725	152.501.000
107.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	338.727.500	408.727.500	70.000.000
108.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	169.722.536.951	171.748.383.577	2.025.846.626
109.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.061.544.729	1.710.967.903	649.423.174
110.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	688.061.150	841.557.127	153.495.97
111.	Program Kepegawaian Daerah	1.112.828.214	1.041.792.614	(71.035.600)
112.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	379.174.751	672.674.751	293.500.000
113.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	10.000.000	90.000.000	80.000.000
114.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	636.674.812	614.455.611	(22.219.201)
115.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	36.745.402	35.845.402	(900.000)
116.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.550.000	1.550.000	0
117.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.392.700.312	1.396.593.912	3.893.600
118.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	485.551.713	515.051.713	29.500.000
	JUMLAH	1.398.919.280.321	1.444.187.319.890	45.268.039.569

2.3.2 PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Tanah Datar Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tanah Datar merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 98,65% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis			Indikator	Target 2024	Target Perubahan 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian
MISI I : MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA							
1.	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1.	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	10.000	10.000	10.174	101,74%
		2.	Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	11.540.322.486	11.540.322.486	12.266.406.140	106,29%
MISI II : MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA YANG BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI DAN UMKM							
2.	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS SBK	3.	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	95%	95%	96.39%	101.46%
3.	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian	4.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,19%	30,19%	27,18%	90.03%
		5.	Nilai Tukar Petani/NTP	> 100	> 100	102,96	102,96%
4.	Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif	6.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14%	14%	10,38%	74,14%

		7.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,95%	13,95%	14,21%	101,86%
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	8.	Jumlah wirausaha baru	1.000	1.000	1061	106,1%
Sasaran Strategis			**Indikator**	**Target 2024**	**Target Perubahan 2024**	**Realisasi 2024**	**Tingkat Capaian**
MISI III : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING							
6.	Meningkatnya mutu pendidikan	9.	Rata-rata lama sekolah	9,02	9,02	9,29	102,99%
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10.	Umur harapan hidup	74,19	74,19	74,26	100.09%
		11.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%	14%		
8.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	12.	Angka kemiskinan	4,06	4,06	4,28	94,85%
		13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	60	59.46*	99.10%
		14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,9	98,9	97.73*	98.82%
MISI IV : PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERBASIS ADAT, BUDAYA DAN SUMBER DAYA ALAM							
9.	Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	15.	Jumlah kunjungan wisatawan	1.200.000	1.200.000	1.205.853	100,49%
		16.	Lama tinggal wisatawan (hari)	2	2	1	50%
MISI V : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN							

10.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	17.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100%
		18.	Indeks Pengawasan Kearsipan	B	B	BB	150%
		19.	Nilai SAKIP	71 (BB)	71 (BB)	67,60 (B)	95,21%
Sasaran Strategis			**Indikator**	**Target 2024**	**Target Perubahan 2024**	**Realisasi 2024**	**Tingkat Capaian**
11.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	20.	Indeks SPBE	3,22	3,22	2,81	87,27%
		21.	Indeks Profesionalitas ASN	79,8	79,8	84,56	105,96%
		22.	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,2	3,2	3,2*	100%
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95	95,27	100,28%
MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN							
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	24.	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	76,78%	76,78%	73.16%	95.29%
14.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72	65,32	90,72%
15.	Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	26.	Persentase bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut di atas dapat diketahui:

1. Capaian realisasi di atas 100% dengan kategori "Sangat Memuaskan" sebanyak 12 indikator (46,15%).
2. Capaian realisasi sampai dengan 100% dengan kategori "Sangat Baik" sebanyak 12 indikator (46,15%).
3. Capaian realisasi sampai dengan 70% dengan kategori "Sedang" sebanyak 1 indikator (3,85%).

4. Capaian realiasi sampai dengan 55% dengan kategori "Kurang Baik" sebanyak 1 indikator (3,85%).

Secara rata-rata, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 98.65% masuk ke dalam kategori "Sangat Baik", yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran dan indikator kinerja. Berikut ini disajikan analisis capaian kinerja per indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
1.	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	10.000	10.174	101,74%
2.	Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat	11.540.322.486	12.266.406.140	106,29%

I.1 Jumlah Hafiz/Hafizah yang Diwisuda

Dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 ditetapkan target hafiz/hafizah yang diwisuda sebanyak 1.000 hafiz/hafizah per tahun. Berdasarkan data Dinas Sosial PPPA, pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 1.000 hafiz/hafizah diwisuda dengan capaian 100%. Berdasarkan formulasi penghitungan indikator kinerja sasaran I.1 yaitu jumlah hafiz/hafizah diwisuda (hafal 1 – 2 juz), pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 1000 Hafiz/Hafizah dengan capaian 100%. Dalam perkembangannya capaian indikator kinerja jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda juga memperhitungkan kategori hafal lebih dari 2 juz. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 336 Orang hafiz/hafizah yang hafal dengan kategori lebih dari 2 juz tersebut.

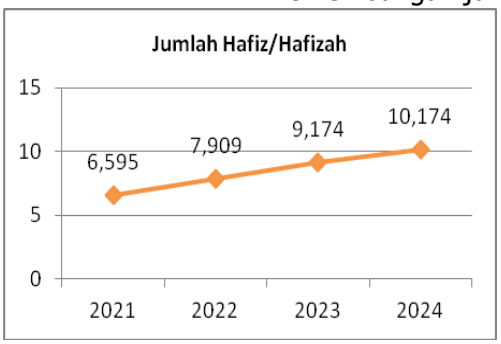
Secara akumulasi, jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda sampai dengan tahun 2024 sebanyak 10.174 hafiz/hafizah. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD yang diwisuda sampai dengan tahun 2024 sebanyak 9.000 hafiz/hafizah, berdasarkan data capaian kinerja tersebut jumlah ini sudah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 113,04%. Berikut perkembangan data jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda tahun 2021-2024.

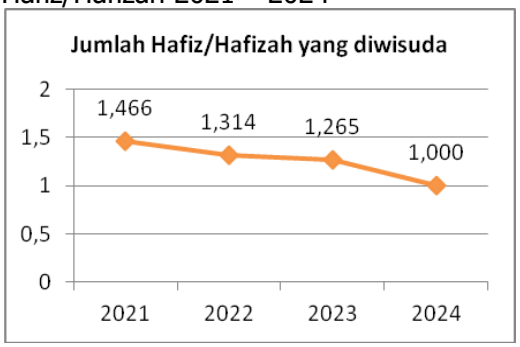
Tabel 2.7
Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda 2021 – 2024

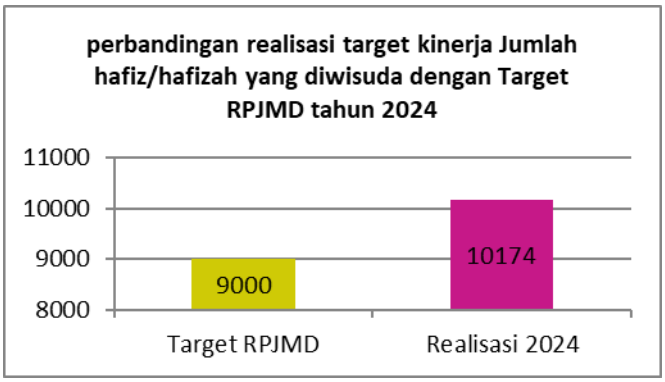
Kategori	2021	2022	2023	2024
1 – 2 Juz	1	956	1	664
3 juz	466*)	206	144	198
4 juz	n/a	73	48	79
5 juz	n/a	68	50	45
10 juz	n/a	9	17	7
15 juz	n/a	2	2	4
20 juz	n/a	n/a	2	2
30 juz	n/a	n/a	2	1
JUMLAH	1.466*)	1.314	1.265	1000

Tahun	Akumulasi Jumlah Hafiz/Hafizah
2021	6.595
2022	7.909
2023	9.174
2024	10.174

Grafik 2.1
Perkembangan jumlah Hafiz/Hafizah 2021 – 2024







Faktor pendukung capaian kinerja indikator hafiz/hafizah yang diwisuda adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan rumah tahfiz serta jumlah guru tahfiz yang semakin meningkat, sampai dengan tahun 2024 terdapat 240 TPA dan 110 rumah tahfiz binaan Pemerintah Daerah, dengan jumlah guru tahfiz lebih dari 1.000 orang dengan jumlah siswa mencapai lebih 16.000 orang,
2. Penyelenggaran Program Gerakan Wakaf 1.000 Hafiz/Hafizah ke IX tahun 2024.
3. Pemberian reward kepada hafiz/hafizah yang hafal Alquran lebih dari 10 juz, sebagai contoh hadiah Umrah untuk hafiz/hafizah yang hafal Alquran 15 juz.
4. Gerakan Pemasangan Stiker "Satu Rumah Satu Hafiz", sampai dengan tahun 2024 telah memasang stiker sebanyak 6.275 buah, yang berarti jumlah rumah yang telah memiliki Hafiz/Hafizah di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 6.275 rumah.
5. Pembagian Kartu Tanda Anggota (KTA) Guru Tahfiz. Pada tahun 2024 telah disiapkan sebanyak 722 Kartu untuk diserahkan kepada guru-guru tahfiz. Pemegang KTA Guru Tahfiz memperoleh keuntungan atau fasilitas dari pemerintah, di antaranya adalah pemegang KTA dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai pengajar tahfiz, mendapatkan fasilitas kesehatan prioritas bagi yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah daerah, serta mendapatkan prioritas untuk menerima manfaat dari program-program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
6. Program "Maghrib Menghantar Berkah", yaitu mengaji bersama para penghafal Alquran yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Tanah Datar, diawali dengan sholat Maghrib berjamaah, Tasmi' Alquran, dialog dengan Bupati Tanah Datar, dan ditutup dengan sholat Isya' berjamaah. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 55 rumah tahfiz telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini.

Sasaran strategis meningkatnya keagamaan masyarakat dengan indikator Julmlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda diharapkan memiliki dampak menciptakan generasi muda yang mencintai Al-Quran dan melakukan aktifitas positif melalui pembelajaran Al-Quran sehingga diharapkan akan memperbaiki akhlak generasi muda dan menjadi benteng terhadap pengaruh negatif perkembangan zaman. Untuk mendukung indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program

Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan PPPA dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah.





Kegiatan Wakaf 1.000 Hafiz ke-VII Tahun 2024 di Istano Basa Pagaruyung



"Maghrib Menghantar Berkah" di rumah dinas Bupati Tanah Datar



"Maghrib Menghantar Berkah" di rumah dinas Bupati Tanah Datar



"Maghrib Menghantar Berkah" di rumah dinas Bupati Tanah Datar



"Maghrib Menghantar Berkah" di rumah dinas Bupati Tanah Datar

I.2 Jumlah Peningkatan Nilai Zakat

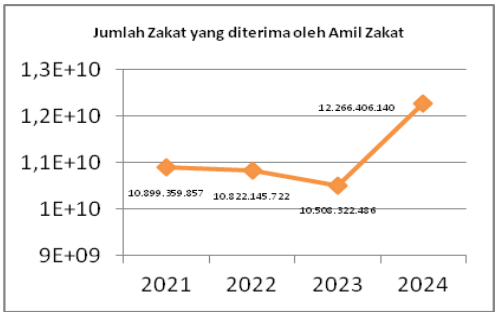
Indikator "Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat" pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.11.540.322.486,- berdasarkan data Bagian Kesra Setda Kabupaten Tanah Datar yang bersumber dari Badan Amil Zakat (BAZ) Tanah Datar, zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp.12.266.406.140,- berdasarkan data tersebut tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 106,29%.

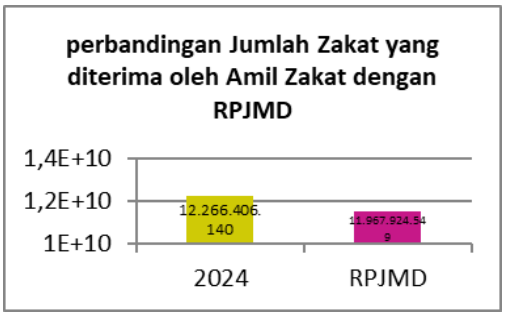
Berdasarkan hasil survei Baznas RI, potensi zakat di Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 29 miliar rupiah. Dari potensi tersebut, 10,51 miliar rupiah terkumpul di Baznas Tanah Datar dan sisanya diperkirakan disalurkan secara mandiri oleh para muzakki. Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain:

1. Menggalakkan pembayaran Zakat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagian besar zakat yang terkumpul bersumber dari zakat yang dibayarkan oleh ASN. Di samping itu, zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Tanah Datar juga berasal dari zakat pegawai pada instansi vertikal, badan usaha, dan lainnya.
2. Sosialisasi pengelolaan zakat bagi seluruh Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
3. Pendampingan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di nagari untuk mengoptimalkan pelaksanaan 5 Program Baznas, yaitu bantuan kesehatan bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, bantuan modal serta bantuan dakwah dan advokasi.
4. Membuka Konter Zakat dan Layanan Muzakki.
5. Membentuk relawan fundraising Zakat

Berikut adalah perkembangan penerimaan zakat tahun 2021 – 2024:

Grafik 2.2
Perkembangan Penerimaan Zakat Tahun 2021 – 2024







"Sosialisasi Pengelolaan Zakat Untuk Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar



Penyerahan Zakat Komsumtif Lebaran Tahun 2023

Sasaran Strategis 2: **Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS SBK**				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
3.	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	95%	96.39%	101,46%

Untuk mengukur capaian indikator "Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif" digunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Lembaga\ adat\ dan\ budaya\ yang\ aktif = \frac{Jumlah\ lembaga\ adat\ dan\ budaya\ yang\ aktif}{Jumlah\ seluruh\ lembaga\ adat\ dan\ budaya}\ x\ 100\%$$

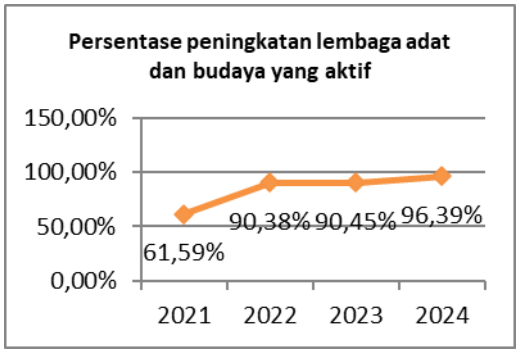
Data Peningkatan Lembaga Adat dan Budaya yang Aktif di Tanah datar adalah sebagai berikut:

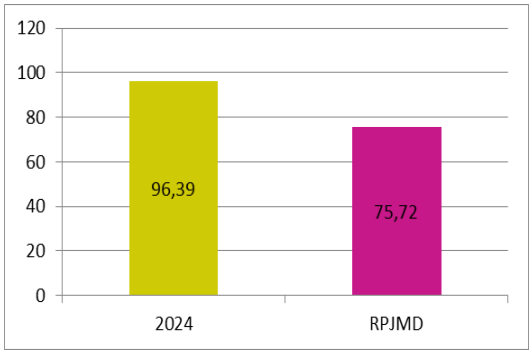
Tabel 2.8
Peningkatan Lembaga Adat dan Budaya yang Aktif

No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Lembaga Budaya**	**Lembaga Budaya Aktif**	**Keterangan**
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	243 Lembaga budaya/sanggar seni	225 Lembaga budaya/ sanggar seni	Seni Tari, Pagelaran, Qasidah, Silat, Dan Kegiatan Budaya Lainnya
2	Dinas PMD PPKB	90 Lembaga budaya	90 Lembaga budaya	Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan dan Kabupaten Tanah Datar
3	Dinas Sosial dan PPPA	90 Lembaga budaya	90 Lembaga budaya	Bundo Kanduang Kecamatan , Kabupaten dan Nagari
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	75 Lembaga budaya	75 Lembaga budaya	Sanggar Seni Pertunjukan
	Jumlah	**498 Lembaga budaya**	**480 Lembaga budaya**	

Dengan demikian, secara keseluruhan, terdapat 498 lembaga adat dan budaya, dan sebanyak 480 (96,39%) di antaranya masih aktif melaksanakan kegiatan. Berikut adalah perkembangan capaian indikator "Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif" tahun 2021 – 2024:

Grafik 2.3
Persentase Lembaga Adat dan Budaya yang Aktif





Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK", yang dilakukan melalui fasilitasi lembaga adat budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar agar aktif dalam melestarikan adat dan budaya. Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan program unggulan daerah Satu Nagari Satu Event yang bertujuan melestarikan budaya, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui program ini, keberadaan sanggar seni dan budaya menjadi lebih hidup karena mendapatkan tempat untuk mengekspresikan diri melalui pementasan berbagai kesenian dan budaya yang berkembang di masing-masing nagari, seperti seni tari, sholawat dulang, randai, alu katentong, talempong, pasambahan, kesenian Dikia Mundam, dan lain sebagainya. Pada tahun 2024, sebanyak 22 nagari turut serta menyukseskan event ini. Dari 22 nagari tersebut, 9 nagari telah melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2023 dan kembali berpartisipasi dalam event ini pada tahun 2024. Sebanyak 13 nagari baru mulai berpartisipasi menyemarakkan event tersebut di tahun 2024.
2. Peningkatan kompetensi dan pembinaan lembaga KAN serta Fasilitasi kegiatan LKAAM Kabupaten Tanah Datar oleh Dinas PMD PPKB
3. Pembangunan Balai Adat Nagari Andaleh Kecamatan Sungayang.
4. Program Niniak Mamak turun ke sekolah, pada tahun 2024 dilaksanakan

pada empat sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Pembinaan terhadap 8 komunitas budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pembinaan terhadap 20 komunitas kesenian.
7. Pembinaan seni melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang pada tahun 2024 dilaksanakan di empat sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Pemberian bantuan peralatan seni dan budaya kepada 18 kelompok seni dan budaya.
9. Penyelenggaraan Atraksi seni budaya (seni kreatif) secara rutin yang dilaksanakan di Lapangan Cindua Mato oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

















Sasaran Strategis 3: **Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian**				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
4.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,19%	27,18%	90.03%
5.	Nilai Tukar Petani/NTP	> 100	102.96*)	102.96%

*) Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024

III.1 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

PDRB Kabupaten Tanah Datar dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Berdasarkan harga konstan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 3.151,72 milyar, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 3.140,34 milyar atau tumbuh sebesar 0.36%. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih tercatat sebagai penyokong perekonomian utama di Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 27,18%.

Capaian indikator "Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB" dan "Nilai Tukar Petani" dihitung dengan cara sebagai berikut:

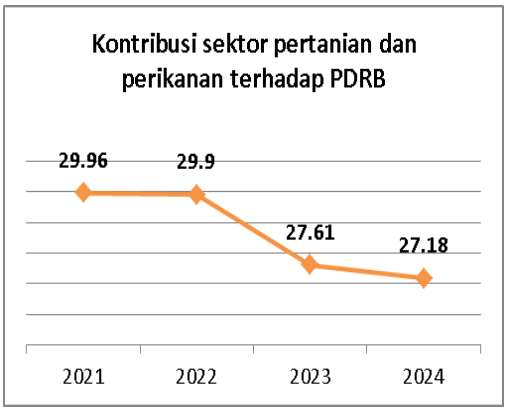
$Kontribusi\ sektor\ pertanian\ dan\ perikanan\ thd\ PDRB\ = \frac{PDRB\ Sektor\ pertanian/perikanan}{Jumlah\ PDRB}\ x\ 100\%$
$Nilai\ Tukar\ Petani\ = data\ BPS$

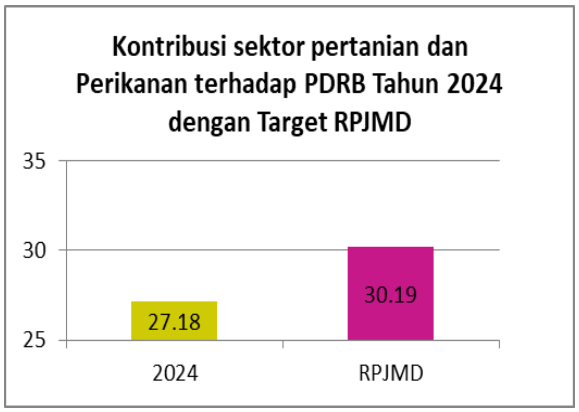
Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, total nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2024 sekitar Rp. 17.496,03 miliar. Sebagai salah satu daerah agraris di Sumatera Barat, PDRB Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh sektor pertanian. Meningkatnya produk pertanian mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan

memberikan dukungan kuat terhadap meningkatnya nilai tambah sektor Pertanian. Dengan demikian, harapan perekonomian Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan masih tergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. PDRB Tanah Datar masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2024 target indikator kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB sebesar 30,19% dengan realisasi 27,18% dan tingkat capaian sebesar 90,03%. Hal ini menunjukan bahwa terjadinya pertumbuhan pada sektor perekonomian lainnya di Kabupaten Tanah Datar seperti sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (8.75%), jasa lainnya (8,37%) dan penyediaan akomodasi makan minum (6,28%).

Berikut ini adalah perkembangan capaian kinerja indikator "Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB" dalam kurun waktu 2021 – 2024:

Grafik 2.4
Perkembangan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB



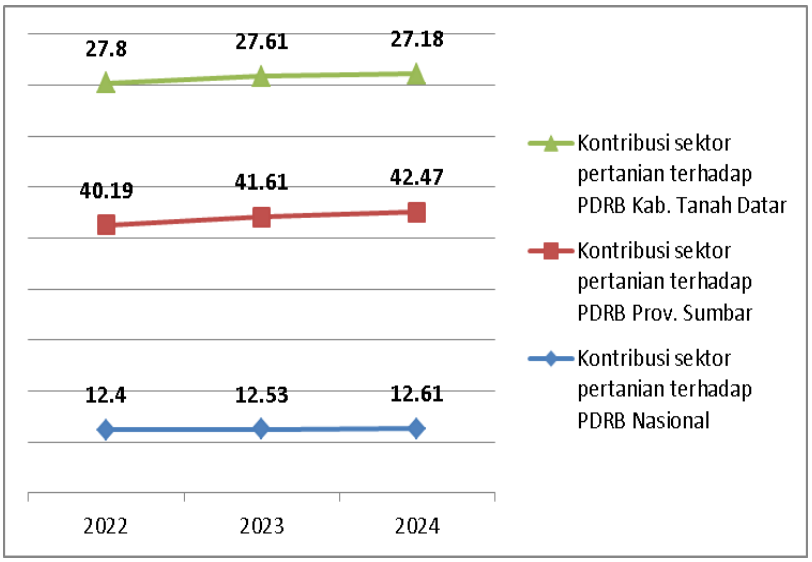


Berdasarkan grafik tersebut di atas, kontribusi sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2024 semakin menurun setiap tahunnya. Namun jumlah PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp 11,38 miliar.

Berikut perbandingan Kontribusi dan nilai PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi dan Nasional tahun 2022-2024.

Grafik 2.5

Perbandingan Kontribusi dan nilai PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi dan Nasional tahun 2022-2024.



Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar didukung oleh produksi sektor pertanian dan perikanan, berikut ini adalah data produksi pertanian tahun 2021 – 2024:

Tabel 2.9
Produksi Pertanian Tahun 2021 – 2024

No.	Komoditi Pertanian	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan (ton)	343.120,84	327.777,46	332.146,58	287.516,35
2.	Peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)	48.737,32	52.223,89	47.871,49	42.562,86
3.	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	18.428,55	18.577,69	18.764,52	18.863,75
4.	Peningkatan produksi peternakan (kg)	15.936,07	15.356,07	17.580,53	16.812,94
5.	Peningkatan populasi ternak (ekor)	2.642.918	2.779.006	2.805.268	2.850,182
6.	Peningkatan produksi perikanan (ton)	12.084,50	12.827,81	13.002,81	11.050,70
	a. Perikanan budidaya (ton)	9.782,54	10.062,30	10.131,79	8.119,86
	b. Perikanan tangkap (ton)	2.301,95	2.765,51	2.871,02	2.930,84

Analisa target dan capaian kinerja komoditi pertanian dan perikanan tahun 2024 :

a. Tanaman Pangan

Peningkatan produksi tanaman pangan dihitung dari jumlah produksi 3 (tiga) komoditi tanaman pangan utama yaitu: padi, jagung, dan kacang tanah. Rata-rata capaian target

peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2024 adalah sebesar 333.872,71 ton dengan realisasi total sebesar 287.516,35 ton (91,71%).

Tabel 2.10
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan produksi tanaman pangan (ton)			
	a. Padi	307.000,00	259.048,21	84,34
	b. Jagung	26.327,71	21.881.22	83,11
	c. Kacang tanah	545,00	586,91	107,69
	T o t a l	**333.872,71**	**281.516,34**	**91,71**

Realisasi produksi padi tahun 2024 sebesar 259.048,21 ton (84,34%) dan produksi jagung sebesar 21.881.22 ton (83,11%) belum mencapai target yang ditetapkan sementara kacang tanah sebesar 586,91 ton (107,69%) sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2024 281.516,34 ton, lebih rendah dibandingkan dengan capaian produksi pangan tahun 2023 332.146,57 ton atau mengalami penurunan sebesar 15,24%.

Berikut faktor penyebab tidak tercapainya target peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024:

1. Penurunan produksi padi disebabkan oleh terjadinya banjir bandang pada tanggal 8 April 2024 di Kecamatan Tanjung Baru dan Banjir Bandang pada tanggal 11 Mei 2024 yang mengakibatkan rusaknya lahan sawah di Kabupaten Tanah Datar seluas 335 Ha. Selain itu adanya serangan hama tikus pada lahan petani di Kabupaten Tanah Datar.
2. Penurunan produksi jagung dipengaruhi adanya penurunan luas tanam yang menyebabkan terjadinya penurunan luas panen. Penurunan luas tanam dipengaruhi adanya kenaikan harga benih jagung dan ketersediaan bantuan benih jagung kepada kelompok tani/ petani. Untuk penanaman jagung, petani masih sangat bergantung kepada bantuan benih yang diberikan.

b. Tanaman Hortikultura

Peningkatan produksi tanaman hortikultura dihitung dari produksi 4 (empat) komoditi hortikultura utama yaitu: cabe, tomat, bawang merah dan Jeruk. Rata-rata capaian target peningkatan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2024 adalah sebesar 48.350,21 ton dengan realisasi total belum mencapai target yang ditetapkan dan hanya sebesar

42.562,86 ton (88,70%). Untuk capaian peningkatan produksi tanaman hortikultura tahun 2024 42.562,86 ton, lebih rendah dibandingkan dengan capaian produksi hortikultura tahun 2023 47.871,49 ton mengalami penurunan sebesar 11,09%.

Tabel 2.11
Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)			
	a. Cabe	19.569,50	14.249,31	72,81
	b. Tomat	19.279,81	20.261,50	105,09
	c. Bawang merah	4.118,10	4.784,19	116,17
	d. Jeruk	5.382,80	3.267,86	60,71
	T o t a l	**48.350,21**	**42.562,86**	**88,70**

Realisasi target produksi untuk 3 komoditi cabe sebesar 14.249,31 ton (72,81) belum mencapai target, tomat sebesar 20.261,50 ton (105,09%) dan bawang merah sebesar 4.784,19 ton (116,17%) telah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan jeruk sebesar 3.267,86 ton (60,71%) belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara umum faktor yang meneyebabkan terjadinya penurunan produksi komoditi pertanian (hortikultura) disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

a. Adanya erupsi Gunung Merapi pada bulan Desember 2023 dan masih berulang sampai akhir tahun 2024 sehingga abu vulkanik yang keluar dari erupsi Gunung Marapi menyebabkan banyak tanaman masyarakat yang mati dan gagal panen terutama tanaman cabe dan jeruk.
b. Alih fungsi lahan pertanian terutama sawah untuk pembangunan diluar sector pertanian.
c. Terbatasnya kuota pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk non subsidi
d. Adanya serangan hama dan penyakit tanaman

c. Tanaman Perkebunan

Peningkatan produksi tanaman perkebunan dihitung dari jumlah produksi 4 (empat) komoditi perkebunan utama yaitu: karet, kakao, tebu, kopi dan casiavera. Rata-rata capaian realisasi produksi komoditi perkebunan pada tahun 2024 sebesar 18.863,75 ton telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian target produksi sebesar 18.858,28 ton (100,05%). Untuk capaian peningkatan produksi tanaman perkebunan tahun 2024 18.863,75 ton, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian produksi tanaman perkebunan tahun 2023 18.764,52 ton mengalami peningkatan sebesar 0,53%.

Tabel 2.12
Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)			
	a. Karet	7.265,22	7.266,75	100,02
	b. Kakao	4.153,54	4.154,00	100,01
	c. Tebu	4.983,90	4.985,00	100,02
	d. Kopi	1.358,56	1.360,00	100,11
	e. Casiavera	1.097,06	1.098,00	100,09
	T o t a l	**18.858,28**	**18.863,75**	**100,05**

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dengan rincian kegiatan Penyediaan pupuk (NPK) untuk sarana produksi perkebunan sebanyak 3.384 Kg dan bantuan sarana pertanian untuk petani tembakau berupa hansprayer, chainsaw dan mesin potong rumput.
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Hortikulturan dan Perkebunan dengan rincian kegiatan Bantuan pupuk NPK dan Kompos untuk tanaman kopi dan tebu sebanyak 13.000 Kg.

d. Produksi Peternakan

Peningkatan produksi peternakan terdiri dari jumlah produksi 5 (lima) jenis komoditi peternakan yaitu produksi daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam dan telur. Rata-rata capaian realisasi indikator kinerja peningkatan produksi peternakan sebesar 16.812.940 kg belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 17.668.000 kg dengan tingkat capaian 98,08%. Untuk capaian peningkatan produksi peternakan (daging) tahun 2024 16.812.940 Kg, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian produksi peternakan tahun 2023 16.479.912,27 Kg mengalami peningkatan sebesar 1,67%. Untuk capaian peningkatan populasi peternakan (unggas) tahun 2024 2.850.182 ekor, lebih tinggi

dibandingkan dengan peningkatan populasi peternakan tahun 2023 2.805.268 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 1,60%.

Tabel 2.13
Produksi Peternakan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Peningkatan produksi peternakan (kg)			
	a. Daging sapi	1.428.250	1.461.530	102,33
	b. Daging kerbau	131.030	120.620	92,06
	c. Daging kambing	179.400	190.050	105,94
	d. Daging ayam	5.231.440	5.086.440	96,88
	e. Telur	10.698.230	9.972.290	93,21
	T o t a l	**17.668.000**	**16.812.940**	**98,08**

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Peternakan ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prsarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan dengan rincian kegiatan Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ternak dan RPH.
2. Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten/kota Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Penyakit hewan Zoonosis dengan uraian kegiatan Pelaksanaan penjaringan/penangkapan hewan penular rabies terutama anjing liar di beberapa lokasi. Dengan anggaran tersedia penjaringan/ penangkapan dan eliminasi HPR hanya terlaksana pada 8 Nagari dari 75 Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Antara lain pada Nagari Simabur yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024, Nagari Batu Basa pada tanggal 7 Februari 2024, Nagari Cubadak pada tanggal 7 Mei 2024, Nagari Batipuh Ateh pada tanggal 8 Mei 2024, Nagari Labuah pada tanggal 4 Juni 2024, Nagari Sawah Tangah pada tanggal 16 Juli 2024 dan Nagari Tabek Patah pada tanggal 17 Juli 2024. Jumlah HPR yang dapat tereliminasi sebanyak 300 ekor.
3. Kegiatan Pengawasan dan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Sub Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Lintas Daerah kabupaten/Kota dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan

hewan dan produk hewan serta penyemprotan desinfektan pada 6 pintu masuk Kabupaten Tanah Datar yaitu:

1) Kubu Kerambil, Kecamatan Batipuh
2) Ombilin, Kecamatan Rambatan
3) Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting
4) Sitangkai, Kecamatan Lintau Buo
5) Simpang Baso, Kecamatan Tanjung Alam
6) Kecamatan Lintau Buo Utara

4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan rincian kegiatan Pengambilan, dan pengiriman dan pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan dan terlaksananya pengambilan sampel medis veteriner.
5. Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan. Sampel bahan pangan yang diambil berupa daging sapi, daging ayam, telur ayam dan bakso. Pengambilan dilaksanakan pada beberapa pasar, antara lain pasar Batusangkar, pasar Padang Ganting, pasar Balai Tangah, pasar Sungai Tarab, pasar Tabek Patah untuk sampel daging sapi, daging ayam, telur ayam.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Populasi Ternak ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/pakan dengan uraian kegiatan pengadaan obat- obatan ternak 300 liter, plastik glove 4.000 lembar, plastik sheet 2.500 batang, N2 cair 800 liter dan BOP Petugas IB untuk 1.250 ekor.
2. Sub Kegiatan Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dengan melaksanakan obat-obatan ternak 6 botol dan pakan ternak 1 paket, Pengadaan konsentrat sebanyak 3.240 Kg.
3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan Pengadaan benih/bibit ternak yang bersumber dari Daerah Kabupaten/Kota lain. Dengan rincian kegiatan pengadaan kambing 48 ekor, itik 160 ekor, ayam 338 ekor, sapi 6 ekor, mesin tetas 2 unit, bahan kandang 1 paket, telur tetas 600 butir, bahan pengolahan pakan kambing, itik dan ayam kampung 3 paket, SL (Kambing, ayam dan itik) 3 paket (60 orang) dan pengadaan obat-obatan 1 paket.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kegiatan Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/kota sub kegiatan pelayanan jasa medik veteriner dengan uraian kegiatan pelayanan medis.

Adapun penurunan tingkat produksi ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan produksi ternak komoditi daging kerbau dan daging ayam disebabkan dengan kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging kerbau.
2. Sementara penurunan produksi ternak komoditi ternak besar dan ternak kecil disebabkan adanya bencana erupsi Gunung Marapi yang mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pakan ternak, sehingga banyak ternak masyarakat yang mati karena kekurangan bahan makanan dan juga termakan abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi, selain itu bencana banjir Bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 menyebabkan banyak ternak petani yang hanyut terbawa arus banjir.

e. Produksi Perikanan

Peningkatan kinerja bidang perikanan diukur dari indikator peningkatan produksi perikanan. Tolak ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan berasal dari peningkatan jumlah poduksi komoditi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap di danau dan perairan umum lainnya.

Tabel 2.14
Produksi Perikanan Tahun 2022 - 2024

No.	Indikator Kinerja	2022	2023	2024		
				Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan produksi perikanan (ton)	12.827,81	13.002,81	11.050,70	11.050,70	100
	a. Perikanan budidaya (ton)	10.062,30	10.131,79	8.125,54	8.119,86	99,93
	b. Perikanan tangkap (ton)	2.765,51	2.871,02	2.925,16	2.930,84	100,19

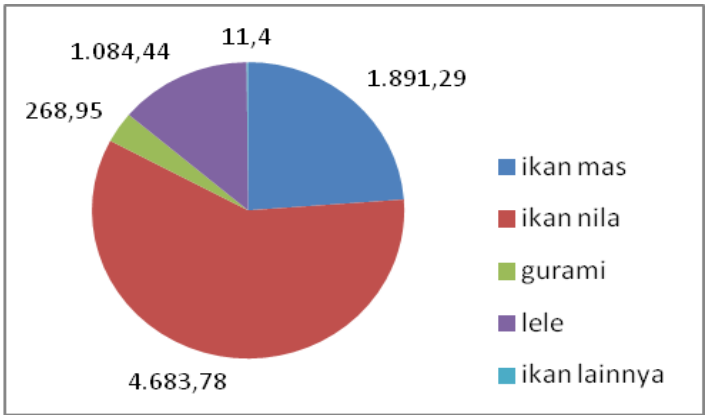
Produksi perikanan terdiri atas produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Peningkatan produksi perikanan budidaya sebagian besar bersumber dari produksi ikan nila dan ikan mas, dua komoditi yang paling tinggi permintaannya karena tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi dua jenis ikan tersebut. Sementara, budidaya jenis ikan yang lain tidak begitu tinggi produksinya, sebagai contoh ikan gurami karena masa

pembudidayaannya yang lama sehingga masyarakat beralih ke jenis ikan lain yang lebih pendek masa budidayanya. Berikut adalah data produksi ikan budidaya pada tahun 2022 – 2024:

Tabel 2.15
Produksi Ikan Budidaya 2021 – 2024

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (dalam ton):			
Ikan Mas	3.315,40	3.282,80	1.891,29
Ikan Nila	4.756,90	5.055,90	4.683,78
Gurami	646,05	478,37	268,95
Lele	1.327,74	1.309,99	1.084,44
Ikan lainnya	16,17	4,76	11,40

Grafik 2.6
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 (dalam ton)



Terlihat bahwa produksi ikan mas, ikan nila, ikan gurame dan ikan lele mengalami penurunan yang disebabkan adanya bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar yang mengakibatkan banyak nya kolam masyarakat yang mengalami kerusakan. Hasil perikanan tangkap sebagian besar berasal dari hasil tangkapan ikan bilih. Produksi perikanan tangkap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 s/d 2024 terjadi peningkatan produksi ikan bilih karena adanya pelarangan penggunaan alat tangkap bagan dan penggunaan KJA (Keramba Jaring Apung) di Danau Singkarak sehingga meningkatnya populasi ikan bilih di Danau Singkarak. Pembangunan perikanan dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Program pengelolaan perikanan budidaya dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan

meningkatkan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM pembudidaya ikan baik teknis dan maupun manajerial serta fasilitasi terhadap akses teknologi. Program pengelolaan perikanan tangkap dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan upaya utamanya adalah pemberdayaan nelayan kecil, meningkatkan sarana prasarana serta peningkatan kelestarian sumber daya perikanan.

Peningkatan Produksi Perikanan







Meningkatkan kesejahteraan petani di daerah memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup berbagai aspek mulai dari dukungan pemerintah, inovasi teknologi, hingga peningkatan akses pasar. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat membantu:

a. Akses terhadap Modal dan Pembiayaan
   - Memperkenalkan program pinjaman dengan bunga rendah atau hibah untuk petani agar mereka dapat membeli alat pertanian modern, benih unggul, atau bahan bakar yang dibutuhkan dalam produksi.
   - Mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan embiayaan

yang lebih mudah diakses oleh petani, terutama yang belum bankable.

b. Peningkatan Akses terhadap Teknologi
   - Menyediakan pelatihan mengenai teknologi pertanian terkin, seperti system irigasi modern, penggunaan drone untuk pemantauan ahan, atau aplikasi untuk manajemen hasil pertanian.
   - Mendorong adopsi pertanian cerdas *(Smart farming)* yang dapat meningkatkan produktivitas dengan menggunakan data dan analisis.

c. Diversifikasi produk dan penyuluhan
   - Mendorong petani untuk melakukan diversifikasi produk pertanian agar tidak terlalu bergantung pada satu komoditas yang mungkin rentan terhadap fluktuasi harga
   - Menyediakan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola tanah dan memanfaatkan produk sampingan pertanian (seperti kompos atau produk olahan)

d. Perbaikan Infrastruktur
   - Meningkatkan infrastruktur pertanan seperti jalan yang baik, penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai, dan jaringan distribusi yang efisien agar hasil pertanian lebih mudah dijual dengan harga yang lebih tinggi.
   - Membangun fasilitas pengolahan produk pertanian lokal agar petani dapat menambah nilai jual dari hasil pertanian mereka.

e. Akses Pasar yang Lebih Baik
   - Memfasilitasi petani agar dapat menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas dengan menghubungkan mereka dengan distributor atau pemasaran berbasisi digital.
   - Menyediakan pelatihan tentang cara mengolah pemasaran produk dan membuat kemasan yang menarik untuk pertanian mereka.

f. Perlindungan Sosial dan Asuransi
   - Membangun sistem asuransi pertanian yang melindungi petani dari kerugian akibat bencana alam atau gagal panen.
   - Menyediakan program jaminan sosial bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di luar pendapatan utama mereka.

b. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
   - Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat dalam pengembangan agribisnis, misalnya dengan

menciptakan kemitraan antara petani dan perusahaan untuk mempermudah pemasaran produk.

Dengan kombinasi pendekatan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat secara signifikan, menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah tersebut.

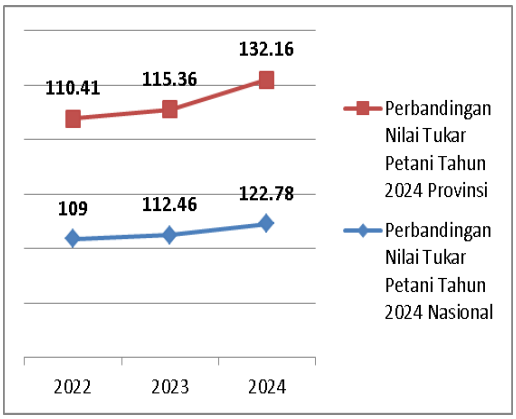
III.2 Nilai Tukar Petani

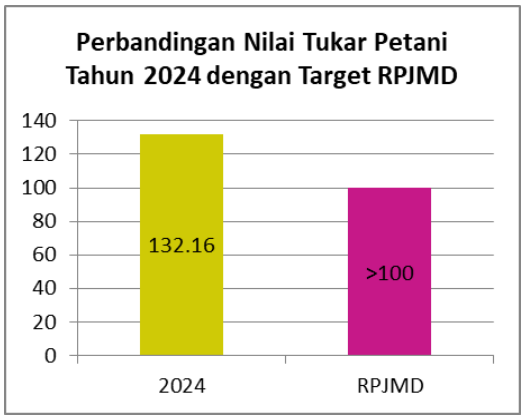
Capaian indikator NTP diukur dengan menggunakan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS, NTP Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebesar 132,16 (>100) yang diperoleh dari hasil pemantauan harga-harga di pedesaaan seluruh kabupaten di Sumbar (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) pada Desember 2024. NTP>100 mengindikasikan Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan. Artinya daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal telah cukup baik.

Perbandingan Nilai Tukar Petani Nasional pada bulan Desember 2024 sebesar 122,78 dan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2024 sebesar 132,16. Analisis perkembangan data capaian kinerja daerah dengan provinsi dan nasional tahun 2022-2024.

NTP	2022	2023	2024
Sumatera Barat	110,41	115,36	132,16
Nasional	109	112,46	122,78

Grafik 2.7
Nilai Tukar Petani 2024





Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 untuk mencapai NTP >100 sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Kacang Tanah), hortikultura (Cabe, Tomat, Bawang dan jeruk), Tanaman Perkebunan (Karet, Tebu, Kopi dan Cassiavera), Produksi Peternakan (Daging Sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Daging Ayam dan Telur) dan populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas).
2. Penerapan dan Pengawasan pupuk bersubsidi berupa pelatihan penyusunan RDk bagi petani dan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi.
3. Penerapan Teknologi Tanaman Pangan berupa kajian varietas padi unggul local dan pengembangan varietas padi unggul local.
4. Penerapan mekanisme pertanian berupa pengadaan alsintan, bimtekpenggunaan alsintan, penerapan penggunaan alsintan.
5. Penanganan dan Pengendalian OPT berupa Sarana dan Prasarana pengendalian OPT, kecamatan yang melaksanakan pengendalian OPT,Pertemuan SL-Pengendalian Hama Terpadu.
6. Peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian dan petani berupa training penyuluh pertanian, pendampingan penyuluh terhadap kelompok tani, pelatihan kelompok tani, pembinaan kelompok tani.
7. Meningkatnya ketersediaan bibit unggul berupa penangkar yang dibina, bantuan bibit unggul hortikultura ,pemurnian varietas unggul.
8. Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber air berupa pembangunan/rehabilitasi dam parit, pembangunan/rehabilitasi embung, pembangunan irigasi air tanah,

pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

9. Pengendalian alih fungsi LP2B berupa Diseminasi LP2B, kajian LP2B, dan dokumen Penyusunan Naskah Akademik LP2B.

Sasaran Strategis 4: **Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif**				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
6.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14%	10,38%	74,14%
7.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,95%	14,21%	101,86%

IV.1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Target indikator Kontribusi sektor industry terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 14% dengan capaian sebesar sebesar 10,38% dan tingkat capaian sebesar 74,14%. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 sebesar 10,38% atau sebesar Rp. 1.201,10 Miliar menurut PDRB harga berlaku.

Berikut rumus perhitungan capaian indikator Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

$Kontribusi\ sektor\ industri\ thd\ PDRB = \frac{PDRB\ Sektor\ industri}{Jumlah\ PDRB}\ x\ 100\%$
$Kontribusi\ sektor\ perdagangan\ thd\ PDRB = \frac{PDRB\ Sektor\ perdagangan}{Jumlah\ PDRB}\ x\ 100\%$

Sektor industri berdasarkan data BPS adalah penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Berdasarkan data Dinas KUKMP Tahun 2024, jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah berdasarkan adalah sebagai berikut:

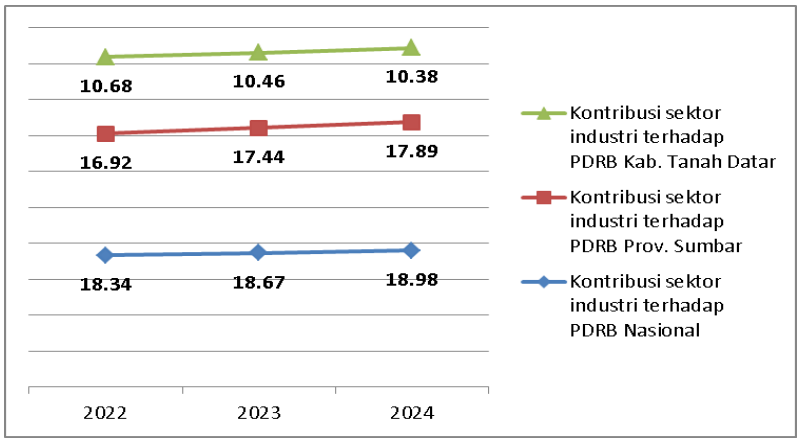
Tabel 2.16
Data Industri Kecil dan Menengah
2021 - 2024

No	Jenis Industri	2021	2022	2023	2024
1.	Pangan	1.738	1.882	2.271	3.356
2.	Sandang dan Kulit	754	796	839	1.061
3.	Kerajinan	205	221	318	481
4.	Kimia dan Bangunan	149	149	170	319
5.	Logam, Mesin dan Elektronika	56	56	106	339
	Jumlah	**2.902**	**3.104**	**3.704**	**5.556**

Berikut perbandingan Kontribusi dan nilai PDRB Sektor Industri Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi dan Nasional tahun 2022-2024

Grafik 2.8

Perbandingan Kontribusi dan nilai PDRB Sektor Industri Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi dan Nasional



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Tanah Datar adalah dengan meningkatkan daya saing industri daerah melalui:

1. Peningkatan SDM dan daya saing IKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian antara lain Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha, Pelatihan teknis dan/atau pendampingan produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk, Pendampingan Persiapan Dokumen GMP dan HACCP, Pendampingan Persiapan Dokumen ISO 9001, serta sosialisasi sertifikasi Halal dan TKDN yang diikuti oleh sebanyak 140 IKM.
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM yang meliputi Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM dan Layanan Proses Bisnis Sentra IKM yang diikuti 100 IKM.
3. Pelaksanaan Penyusunan Informasi dan Analisis Pasar IKM Ekspor yang diikuti oleh 15 Pelaku IKM.
4. Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi Halal bagi 50 pelaku IKM.
5. Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi TKDN bagi 140 pelaku IKM.
6. Fasilitasi Penerbitan HKI bagi 3 Pelaku IKM
7. Jumlah IKM formal pada tahun 2024 sebanyak 291 unit.
8. Fasilitasi penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha oleh

Dinas PMPTSP.

9. Penyelenggaran pelatihan oleh Dinas KUKMP yang diikuti oleh 30 UMKM.
10. Pelaksanaan pembangunan sentra olahan komoditi hortikultura di Kecamatan Salimpaung.
11. Fasilitasi standarisasi produk dan pelaku IKM (Sertifikat halal, Sertifikat TKDN dan HKI merek)
12. Fasilitasi penerbitan NIB bagi pelaku usaha
13. Fasilitasi promosi produk IKM (promosi pameran Dekranasda Provinsi, Inacraft, Bazar Cindua Mato) Bantuan peralatan bagi kelompok IKM)
14. Bantuan peralatan bagi kelompok IKM

Gambar
Kegiatan Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi dan Pelatihan Pengembangan dan Diversifikasi Produk



Peningkatan industri komoditas unggulan daerah memerlukan strategi yang terpadu, dengan fokus pada penguatan daya saing, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, serta pengembangan sektor-sektor pendukung. Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan industri komoditas unggulan daerah:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
    a. Pelatihan dan Pendidikan
       Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani, produsen, atau pelaku industri untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan produksi, pemrosesan, dan pemasaran komoditas unggulan.
    b. Penerapan Teknologi Tepat Guna

Mengadopsi teknologi pertanian atau industri yang lebih efisien untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, seperti penggunaan alat pertanian modern, teknik pengolahan yang lebih baik, dan penerapan sistem manajemen berbasis data.

c. Pemanfaatan Benih atau Bibit Unggul

Mendorong penggunaan benih atau bibit unggul yang memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap penyakit dan perubahan iklim, serta roduktivitas yang lebih baik.

2. Diversifikasi Produk dan Pengolahan

a. Pengembangan Produk Olahan

Memanfaatkan hasil komoditas unggulan untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah, seperti pengolahan pangan, kerajinan, atau produk lainnya yang lebih bervariasi dan siap saji.

b. Inovasi Produk

Mendorong inovasi dalam produk turunan, seperti pengembangan varian baru, kemasan yang lebih menarik, serta produk yang ramah lingkungan dan sesuai dengan tren pasar saat ini.

3. Peningkatan Akses Pasar dan Pemasaran

a. Memperluas Akses Pasar Lokal dan Global

Membantu pelaku industri dalam memasarkan produk mereka, baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional melalui pameran, perdagangan daring, atau melalui kerjasama dengan perusahaan besar.

b. Pemasaran Digital

Mendorong penggunaan platform e-commerce atau media sosial untuk memasarkan produk komoditas unggulan secara lebih luas, serta menjangkau konsumen yang lebih banyak, terutama di pasar global.

c. Kemitraan dengan Industri Besar

Membentuk kemitraan dengan perusahaan besar yang memiliki jaringan distribusi yang luas, guna memperkenalkan produk komoditas unggulan ke pasar yang lebih besar.

4. Perbaikan Infrastruktur dan Logistik
    a. Peningkatan Infrastruktur
       Membangun atau memperbaiki infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas distribusi lainnya untuk memudahkan proses produksi dan distribusi komoditas unggulan.
    b. Sistem Rantai Pasok yang Efisien
       Mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien agar produk dapat sampai ke konsumen dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang terjaga.
5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pemerintah
    a. Fasilitasi Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta
       Menyusun kebijakan yang mendukung kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, misalnya dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan komoditas unggulan.
    b. Peningkatan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung
       Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang lebih ramah bagi industri komoditas unggulan, seperti insentif pajak, pelatihan, dan program dukungan lainnya.
6. Pengembangan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
    a. Praktik Pertanian atau Industri Ramah Lingkungan
       Mendorong penerapan praktik produksi yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik atau penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri pengolahan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.
    b. Pemeliharaan Keanekaragaman Hayati
       Menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati untuk memastikan keberlanjutan komoditas unggulan, baik untuk kebutuhan pasar maupun untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem.
7. Pemberdayaan dan Penguatan Koperasi atau Kelompok Usaha
    a. Penguatan Koperasi dan Kelompok Usaha
       Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi atau kelompok usaha yang mengelola komoditas unggulan agar dapat mengakses sumber daya, pelatihan, serta pasar dengan lebih mudah.

b. Pendampingan dan Dukungan Teknis
   Memberikan pendampingan teknis dan bisnis kepada koperasi atau kelompok usaha agar mereka dapat mengelola usaha dengan baik dan berkelanjutan.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara komprehensif, diharapkan industri komoditas unggulan daerah dapat berkembang dengan pesat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

IV.2 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah sebesar 14,21% angka ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Tanah Datar terjadi peningkatan pada sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan senilai Rp. 1.599,46 Miliar.

Untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya melalui Dinas KUKMP sebagai berikut:

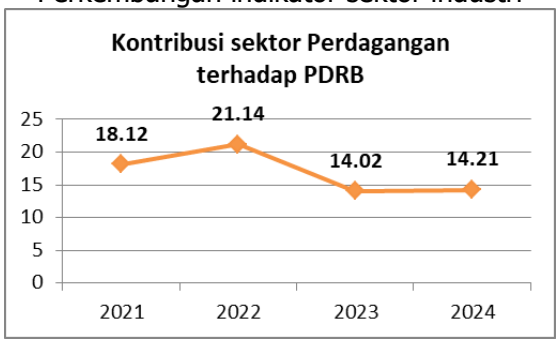
1. Melakukan pengelolaan pasar serikat C Batusangkar yang memfasilitasi 257 pedagang dan pembinaan terhadap Pasar Nagari. Kegiatan ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Pemantauan harga 15 bahan pokok dan 9 barang penting pada Pasar Rakyat dan distributor utama untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah. Kegiatan ini didukung oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
3. Dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan produk dan komoditi unggulan Daerah melalui pemasaran digital, pada tahun 2024 Dinas KUKMP memfinalisasikan Website Etalase Digital Produk dan komoditi kebanggaan (EPIK) Kabupaten Tanah Datar. Sejalan dengan hal tersebut juga dilakukan Fasilitasi dan evaluasi 30 peserta yang sudah mendapatkan pelatihan ekspor pada tahun 2021-2023 dalam rangka penguatan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor. Kegiatan ini didukung oleh program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
4. Melaksanakan pengawasan perdagangan sesuai kewenangan daerah yang meliputi pengawassan tertib niaga, pengawasan metrologi legal, barang dan

jasa pada Pasar Nagari, Pelaku Usaha SPBU/Pertashop, agen dan pangkalan LPG 3 kg, distributor dan pengecer pupuk dan pestisida bersubsidi, pelaku usaha barang dalam keadaan terbungkus serta edukasi dan literasi peraturan perdagangan kepada siswa SMP dan Pelaku Usaha Mikro. Kegiatan ini didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

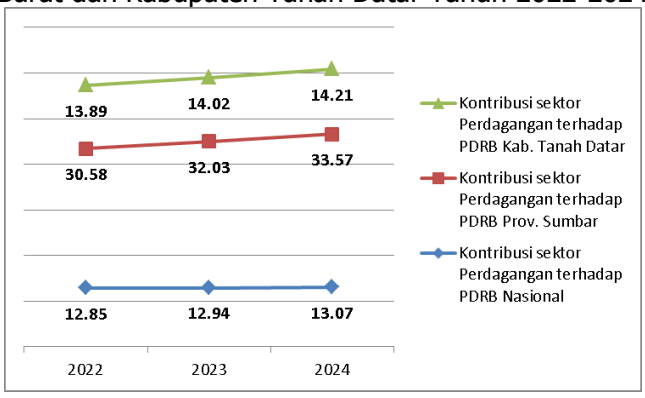
5. Penyelenggaraan pelayanan publik wajib daerah berupa tera/tera ulang terhadap 270 alat-alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di pasar serikat C Batusangkar dan 16 SPBU/Pertashop untuk memastikan terjaminnya kebenaran ukuran bagi konsumen/masyarakat. Kegiatan ini didukung oleh program Kegiatan ini didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Berikut ini adalah perkembangan PDRB sektor sektor perdagangan serta perkembangan kontribusinya pada PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2024:

Grafik 2.9
Perkembangan indikator sektor industri



Grafik 2.10
Perbandingan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024



Gambar Pasar Serikat C Batusangkar









Sasaran Strategis 5: **Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
8.	Jumlah wirausaha baru	1.000	1061	106,10%

Capaian indikator "Jumlah wirausaha baru" diukur dengan cara menghitung jumlah wirausaha baru setiap tahunnya:

$$Jumlah\ wirausaha\ baru = jumlah\ wirausaha\ baru\ setiap\ tahunnya$$

Jumah wirausaha baru yang tercipta selama tahun 2024 adalah sebanyak 1061 orang, yang terdiri dari urusan Tenaga Kerja, Urusan Koperasi dan UMKM, Urussan Pertanian dan Urusan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17
Jumlah Wirausaha Baru Tahun 2024

a. Urusan Tenaga Kerja	224
b. Urusan Koperasi dan UMKM	90
c. Urusan Pertanian	810
d. Urusan Pariwisata	27
Jumlah	1061

Upaya menumbuhkan wirausaha baru ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah pengangguran, sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas KUKMP pada tahun 2024 terdapat 2.971 wirausaha yang diterbitkan Nomor Induk Berusaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perdagangan. Wirausaha baru pada urusan Koperasi dan UMKM difasilitasi dalam bentuk pelatihan sebanyak 3 angkatan yang diberikan terhadap 90 Pelaku Usaha Mikro yang terdiri dari Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM untuk 30 orang Pelaku Usaha Mikro, pelatihan manajemen produksi bagi UMKM untuk 30 orang Pelaku Usaha Mikro, pelatihan digitalisasi pemasaran produk UMKM bagi pelaku Usaha Mikro.

Berdasarkan data BPS Tahun 2024, tercatat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanah Datar sebesar 217,07 ribu jiwa, dengan rincian 205.564 jiwa bekerja dan 11.506 jiwa pengangguran terbuka, dan bukan angkatan kerja 87,66 ribu jiwa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat menurunkan jumlah pengangguran adalah dengan meningkatkan kompetensi para calon tenaga kerja (pencari kerja) untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada lapangan usaha yang tersedia. Kesempatan kerja menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor industri pengolahan. Salah satu peluang untuk menciptakan wirausaha baru adalah melalui peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri pengolahan.

Beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya menumbuhkan wirausaha baru antara lain:

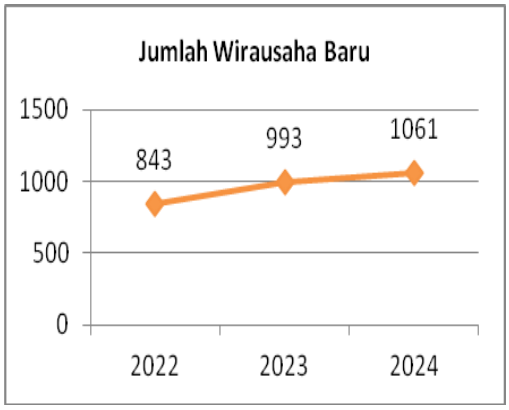
1. Fasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
2. Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan pembuatan souvenir, pembuatan kue dan roti, pemasangan jaringan listrik, Teknik informatika computer, menjahit, digital marketing, servis motor konvensional, manajemen pemasaran dan manajemen usaha yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTS Naker. Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 304 pencari kerja.

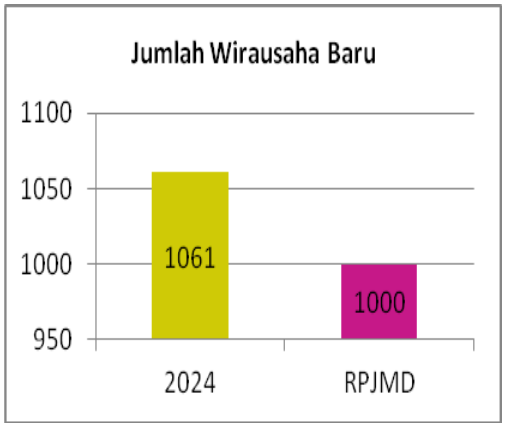
3. Pelatihan kompetensi yang bersumber dari APBN, seperti pelatihan practical office, asisten pembuat pakaian, pembuatan roti dan kue, pemasangan instalasi listrik yang dilaksanakan oleh BLK Batusangkar.
4. Pelatihan keterampilan dasar bagi calon wirausaha baru yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Naker.
5. Memfasilitasi pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemenaker RI di Padang.
6. Pelatihan tenun, menjahit, sulaman, mendesain motif yang dilaksanakan oleh Dinas KUKMP.

Pelatihan berbasis kompetensi secara khusus dilaksanakan untuk mengubah pola pikir generasi muda untuk tidak lagi menjadi pekerja, melainkan menjadi orang yang membuka lapangan kerja.

Grafik berikut menggambarkan kondisi/capaian indikator "Jumlah wirausaha baru":

Grafik 2.11
Capaian Indikator Jumlah Wirausaha Baru









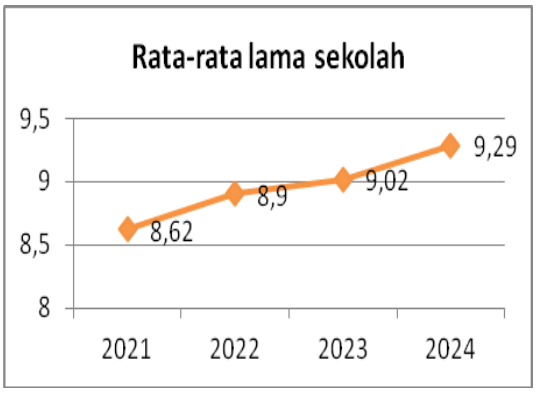
Pelatihan Jumlah Wirausaha Baru 2024

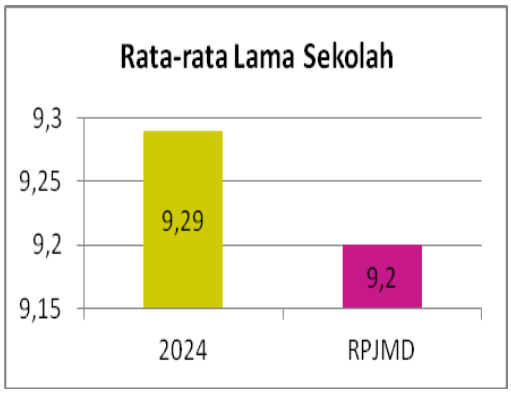
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya mutu Pendidikan				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
9.	Rata-rata lama sekolah	9,02	9,29	102,99%

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar adalah "Rata-rata Lama Sekolah", yaitu rata-rata lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh sekelompok orang dewasa (<25 tahun) di suatu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026, Rata-rata lama sekolah juga digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Datar adalah 9,29 tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Datar baru bisa menikmati Pendidikan sampai dengan kelas 3 SLTP. Angka tersebut sudah sama dengan target program wajib belajar 9 tahun dan sudah memenuhi target RPJMD sebesar 9,2 tahun. Jika dilihat dari kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, angka ini meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah perkembangan capaian indikator rata-rata lama sekolah:

Grafik 2.12
Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 – 2024





Untuk mendukung capaian target kinerja indikator Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah didukung oleh upaya yang dilakukan, antara lain:

1. Akreditasi Sekolah

   Akreditasi sekolah merupakan salah satu alat ukur peta mutu Pendidikan pada setiap satuan Pendidikan berdasarkan standar nasional Pendidikan. Hasil akreditasi mencerminkan potret setiap butir standar Pendidikan, yang terdiri dari standar

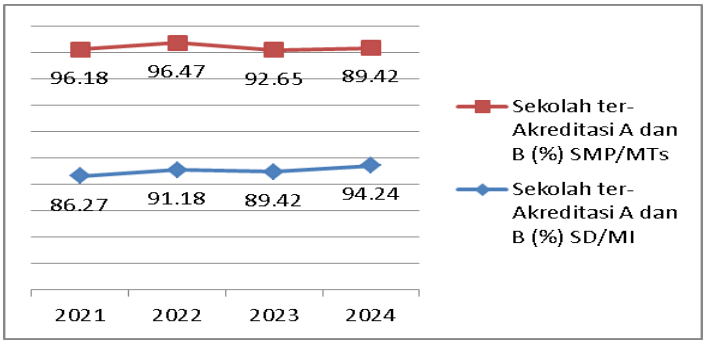
kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian Pendidikan. Akreditasi ideal adalah "A", namun demikian pencapaian nilai "B" sudah menunjukkan pencapaian sesuai standar nasional. Berikut ini adalah data jumlah SD/MI dan SMP/MTs dan akreditasinya yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

Tabel 2.18
Jumlah Sekolah dan Akreditasinya

NO	JENJANG	PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH 2024				BELUM TERAKREDITASI	JUMLAH
		A	B	C	D		
1	SD	106	185	7	0	8	306
2	MI	3	1	3	0	0	7
	JUMLAH	**109**	**186**	**10**	**0**	**8**	**313**
3	SMP	19	32	6	0	1	57
4	MTs	14	28	1	1	3	47
	JUMLAH	**33**	**60**	**7**	**1**	**3**	**104**
	TOTAL	**142**	**246**	**17**	**1**	**11**	**417**

Sumber Data: LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024

Grafik
Perkembangan Data Sekolah Terakreditsi A dan B
Tahun 2021-2024 (dalam %)



2. Tenaga Pendidik (Guru)

Berdasarkan data BPS Tanah Datar Tahun 2024, di Kabupaten Tanah Datar terdapat sebanyak 2.936 guru PNS SD dan 993 guru PNS SMP dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Pendidikan Guru SD dan SMP Tahun 2024

Pendidikan Guru PNS SD dan SMP Tahun 2024							
	D1/di bawah D1	D2	D3	D4	S1	S2	Jumlah
SD	-	17	2	5	2.852	60	2.936
SMP	-	4	12	1	933	43	993
Jumlah	-	21	14	6	3.785	103	3.929

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni 2021 – 2024

Jenjang	2021	2022	2023	2024
SD	99.62	98.70	98,36	90,65
SMP	76.15	76.22	78,60	82,13

4. Bantuan Pendidikan

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan bantuan pendidikan berupa:

a. Bantuan perlengkapan siswa berupa pakaian seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP dengan anggaran sebesar Rp.3.287.646.000,-
b. Bantuan pendidikan yang disalurkan melalui Pokok Pikiran Anggota Dewan sebanyak 453 siswa/i SD/MI dan 352 siswa/i SMP/MTs menerima bantuan pendidikan dengan total nilai Rp. 509.600.000.-

5. Inovasi di bidang pendidikan

Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar mengembangkan 2 (dua) buah inovasi, yaitu :

a. Klinik Kurikulum

Klinik Kurikulum bertujuan untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan coaching kepada kepala sekolah dan guru dalam rangka penerapan kurikukum Merdeka. Klinik ini dilayani oleh seluruh pengawas sekolah, baik secara tatap muka maupun secara online.

b. Pendidikan Inklusi

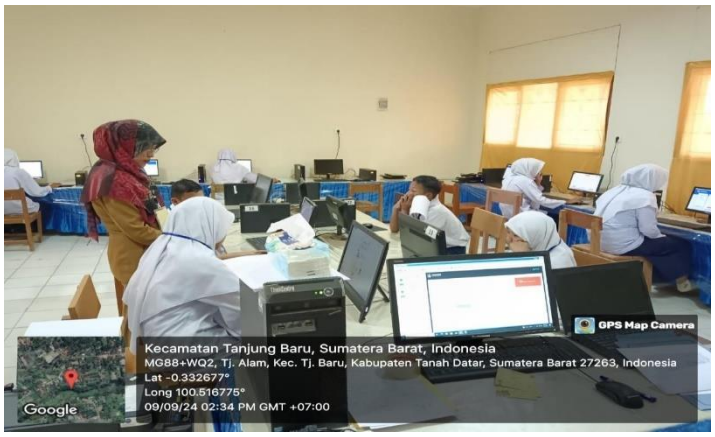
Pendidikan Inklusi merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pendidikan Inklusi dilaksanakan di 4 (empat) sekolah, yaitu SDN 02 Labuah, SDN 03 Sungayang, SDN 08 Baringin, dan SMPN 3 Lima Kaum.



Gambar Partisipasi Siswa Usia 5-6 Tahun



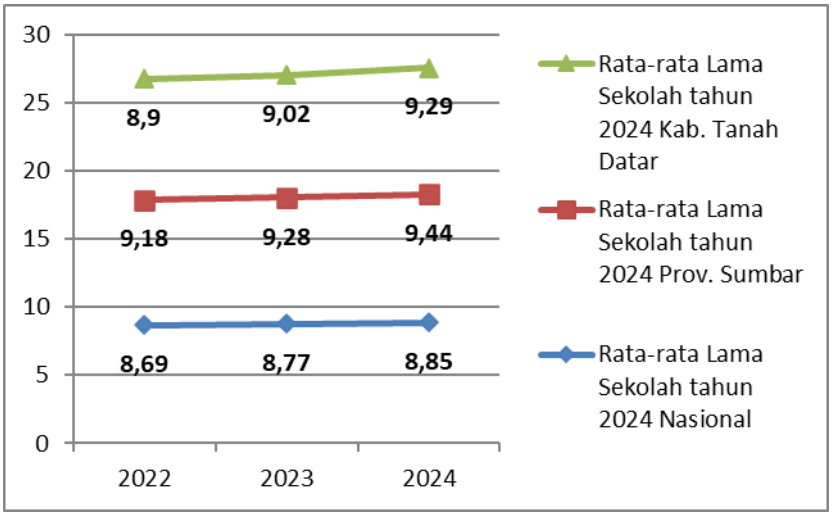
Gambar Partisipasi Siswa Usia 7-12 Tahun



Gambar Partisipasi Siswa Usia 13-15 Tahun

Berikut perbandingan capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi dan Nasional tahun 2022-2024

Grafik 2.14
Capaian Indikator Lama Sekolah



Sasaran Strategis 7: **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
10.	Umur harapan hidup	74,19	74,26	10,09%
11.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%	14*)	100%

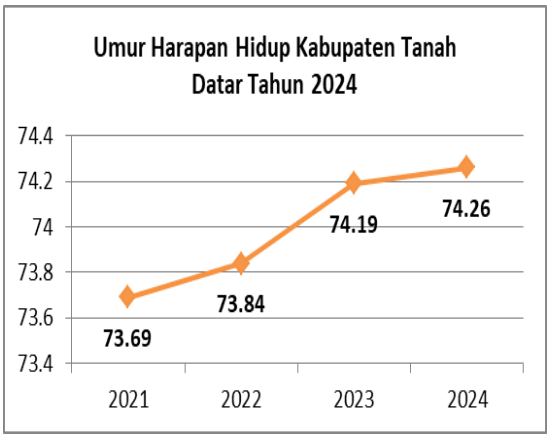
VII.1 Umur Harapan Hidup

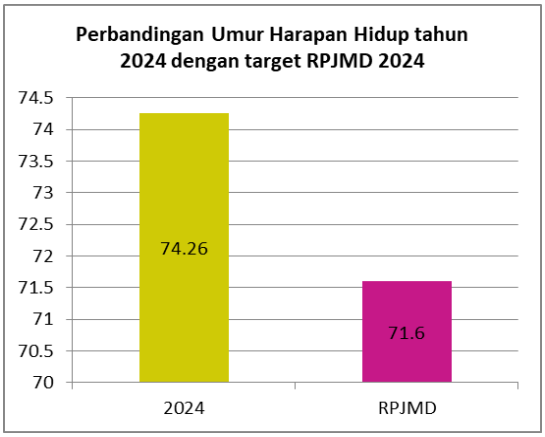
Capaian indikator "Umur harapan hidup" dan "Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita" diukur dengan menggunakan data sebagai berikut:

Umur Harapan Hidup = perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
$Prevalensi\ Stunting = \frac{Jumlah\ balita\ stunting}{Jumlah\ balita}\ X\ 100\%$

Target indikator Umur Harapan Hidup pada tahun 2024 adalah 74,19 realisasi sebesar 74,26 dengan tingkat capaian sebesar 100,09%. Berikut adalah perkembangan capaian indikator Umur Harapan Hidup tahun 2024.

Grafik 2.15
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan





Peningkatan Umur Harapan Hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam bidang kesehatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor ekonomi. Umur harapan hidup dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan pangan, Pendidikan, kebijakan pemerintah, perekonomian masyarakat, dan faktor-faktor lainnya.

Dari sisi ekonomi, semakin sejahtera masyarakat, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk memperpanjang usia hidup. Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu tempat dapat dilihat dari besarnya pendapatan dan pengeluaran atau pola konsumsi masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan/pengeluaran, dapat diasumsikan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Dari sisi kesehatan, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung capaian indikator Umur harapan hidup, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencapaian UHC pada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar
2. Kegiatan penjaringan kesehatan pada lansia dengan posyandu lansia
3. Kegiatan aksi bergizi pada anak sekolah kegiatannya berupa makan bersama, olahraga dan makan tablet tambah darah untuk remaja putri
4. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar berupa Kegiatan penjaringan kesehatan pada anak sekolah





Pencapaian UHC Tahun 2024 Kabupaten Tanah Datar




Penjaringan Kesehatan pada Anak Sekolah




Penyerahan Bantuan Ambulan

VII.2 Prevalensi Stunting

Capaian indikator prevalensi stunting pada tahun 2024 pada saat laporan ini selesai disusun belum bisa diperoleh. Diperkirakan, prevalensi stunting tahun 2024 sama dengan target yang ditetapkan, yaitu 14%.

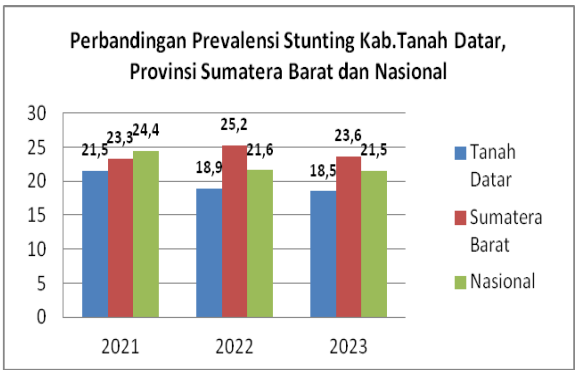
Data yang ditampilkan adalah data perkembangan Prevalensi Stunting tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka kasus stunting di

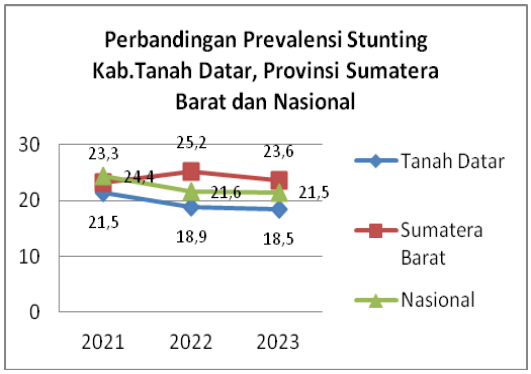
Kabupaten Tanah Datar cenderung terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Tingkat prevelansi stunting di Kabupaten Tanah Datar lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 2.21
Perbandingan Prevalansi Stunting Kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat dan Nasional.

	2021	2022	2023
Tanah Datar	21,5	18,9	18,5
Sumatera Barat	23,3	25,2	23,6
Nasional	24,4	21,6	21,5

Grafik 3.1
Perbandingan Prevalansi Stunting Kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat dan Nasional.





Dalam rangka mengejar target nasional prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar antara lain:

1. Kegiatan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri setiap minggu di sekolah.
2. Screening Anemia berupa pemeriksaan kesehatan termasuk kadar hoglobin siswi kelas 7 & 10.
3. Pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil yang meliputi pemeriksaan antenatal care (ANC) sebanyak 6 kali (2 kali dengan dokter), termasuk penggunaan USG
4. Komsumsi tablet tambah darah untuk ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan.
5. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronis)
6. Pemantauan tumbuh kembang balita meliputi kegiatan penimbangan, pengukuran panjang badan dan pemantauan perkembangan balita di Posyandu setiap bulan.
7. Pemberian ASI Eksklusif semenjak lahir sampai bayi berusia 6 bulan.

8. Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta berupa pemberian protein hewani bagi anak 12-23 bulan berupa telur dan sumber protein lainnya.
9. Tatalaksana balita dengan masalah gizi berupa kegiatan merujuk balita dengan weight faltering dan masalah gizi dari posyandu ke puskesmas serta memberikan makanan tambahan untuk weight faltering dan gizi kurang, formula 75 dan formula 100 untuk gizi buruk.
10. Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi meliputi pelayanan rutin kampanye bulan imunisasi dasar dan 3 imunisasi tambahan (PCV, Rotavirus, HPV), imunisasi tambahan PVC mencegah pneumonia dan Rotavirus mencegah diare sehingga mencegah terganggunya pertumbuhan.
11. Audit kasus stunting untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus stunting.
12. Pendataan kasus stunting sampai ke tingkat Nagari, untuk memastikan status masing-masing nagari, mana yang kasus stuntingnya turun atau justru meningkat.




Pemeriksaan HB dan Minum Tablet Tambah Darah Bersama di SMA 2 Lintau Buo




Pemantauan Tumbuh Kembang Balita

Sasaran Strategis 8: **Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
12.	Angka kemiskinan	4,06	4,28	94,85%
13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	58,53*)	99,10%
14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,9	97,62*)	98,82%

VIII.1 Angka Kemiskinan

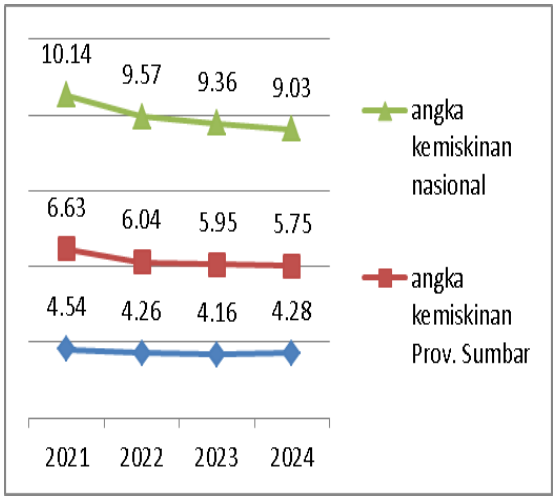
Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai kegiatan penangggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik. Dimana Tingkat kemiskinan Tanah Datar lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung menurun dan hal ini menunjukkan keberhasilan beberapa program kegiatan yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan persentase angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana banjir bandang pada Bulan Mei 2024 sehingga menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan seperti sektor pertanian, infrastruktur dan pariwisata

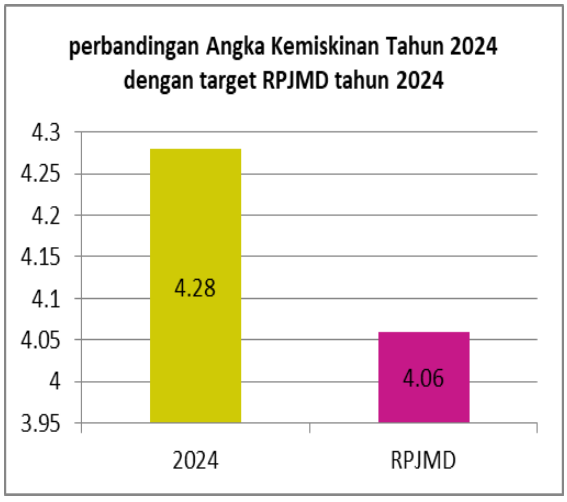
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dokumen Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024, pada tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar adalah 4,28 dan menjadikan Tanah Datar daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah ke-6 di Sumatera Barat. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 15 ribu orang (4,28% populasi). Diperkirakan butuh peningkatan Rp. 244 ribu (44% nilai Garis Kemiskinan) per individu untuk mengentaskan Kabupaten Tanah Datar dari kemiskinan ekstrim (total sekitar Rp. 93,53 milyar untuk seluruh penduduk), Sementara itu tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada 2024 sebesar 5,75%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional pada 2024 sebesar 9,03%.

Tabel 2.22
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumbar
Tahun 2022 – 2024

No	Kabupaten/Kota	% Penduduk Miskin		
		2022	2023	2024
1	Sawahlunto	2,28	2,27	2,33
2	Kota Solok	3,02	3,05	3,07
3	Bukittinggi	4,46	4,11	4,06
4	Tanah Datar	4,26	4,16	4,08
5	Padang	4,26	4,17	4,26
6	Pariaman	4,13	4,20	4,28
7	Padang Panjang	5,14	5,24	5,19
8	Payakumbuh	5,66	5,44	5,31
9	Dharmasraya	5,56	5,56	5,32
10	Sijunjung	6,00	5,88	5,78
11	Padang Pariaman	6,25	6,34	6,27
12	Solok Selatan	6,51	6,45	6,56
13	Agam	6,22	6,60	6,74
14	Lima Puluh Kota	6,59	6,80	6,83
15	Pasaman	6,85	6,80	6,92
16	Pasaman Barat	6,93	6,92	7,00
17	Kab.Solok	7,12	7,13	7,31
18	Pesisir Selatan	7,11	7,34	7,49
19	Kepulauan Mentawai	13,97	13,72	13,89
	PROVINSI SUMATERA BARAT	5,92	5,95	5,75
	NASIONAL	9,57	9,36	9,03

Grafik 3.14
Perkembangan Capaian Indikator Angka Kemiskinan





Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan daerah, berupa:

1. Perlindungan sosial, baik berupa bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung kepada masyarakat. Bantuan langsung diberikan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
   a. Bantuan langsung

      Bantuan langsung diberikan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa Bantuan Sosial uang Rp.2.000.000 per orang sebanyak 167 orang lanjut usia miskin, 162 orang penyandang disabilitas miskin, dan 467 orang anak miskin di luar panti asuhan dan bantuan alat usaha bagi 100 orang pelaku Industri Rumahan (IR) dan 1 (satu) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
   b. Bantuan tidak langsung

      Bantuan tidak langsung diberikan dalam bentuk jaminan pelayanan kesehatan maupun bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan berupa bantuan sosial uang yang diberikan kepada 1.433 orang mahasiswa miskin dan siswa SLTA miskin.
   c. Bantuan Pendidikan berupa bantuan social uang yang diberikan kepada 1.433 orang mahasiswa miskin dan siswa SLTA miskin.
2. Pemerintah juga melaksanakan program untuk mengurangi beban produksi masyarakat, di antaranya adalah bantuan bajak gratis untuk petani, program Makan Rendang untuk mengatasi masalah rentenir dan bantuan untuk UMKM. Selain itu, mengingat masyakarat miskin adalah kelompok yang paling terdampak inflasi, pemerintah melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian yang menjadi penyumbang inflasi, seperti cabe merah, beras, bawang merah, tomat dan telur. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Dinas Koperindag bersama dengan Bagian Perekonomian Setda melaksanakan operasi pasar untuk beberapa jenis komoditi, seperti gula, minyak goreng, bawang merah, cabe, dlll.

Salah satu program perlindungan sosial dan kerawanan pangan adalah penyaluran cadangan pangan berupa beras untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang/galodo yang terjadi pada bulan Mei 2025 sebanyak 25 ton dan penyerahan paket Sembako untuk balita di Kecamatan X Koto pada bukan April 2024 sebanyak 61 paket yang terdiri dari 1 sak telur, susu lactogen sesuai umur, kacang hijau dan beras. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan memberikan akses kepada keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, untuk

memanfaatkan berbagai fasilitas layanan yang disediakan pemerintah. Pada tahun 2024, sebanyak 10,82 persen masyarakat Tanah Datar menerima manfaat program ini.





Penyerahan paket Sembako untuk balita di Kecamatan X Koto



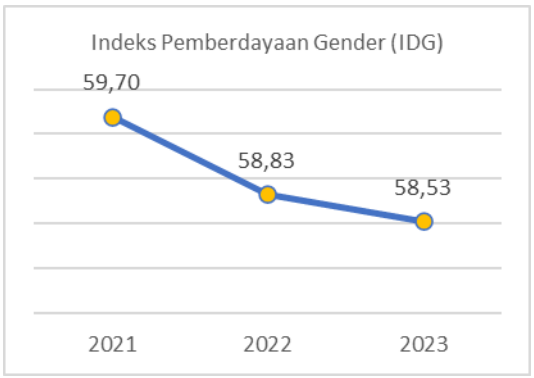


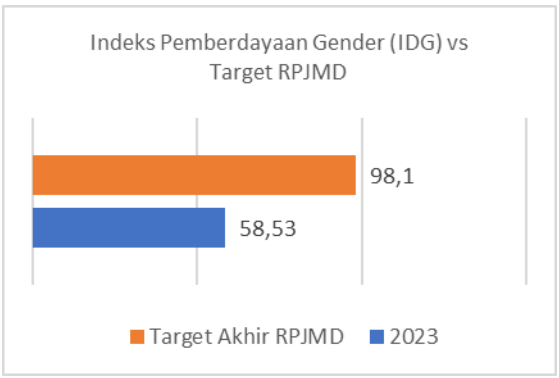
Penyaluran beras untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang

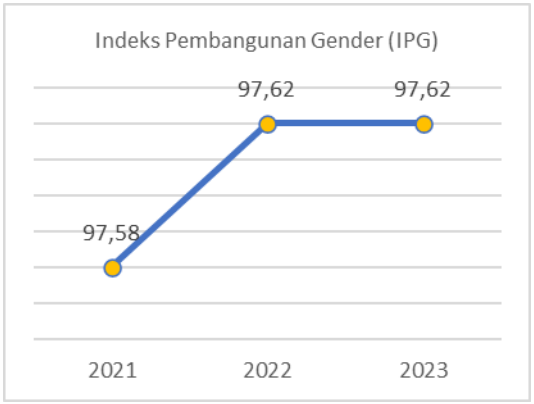
VIII.2 Indeks Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

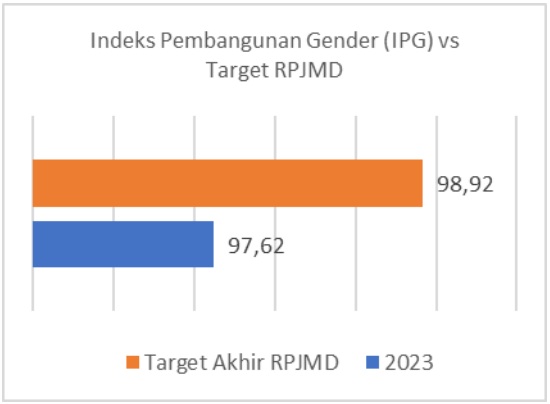
Data capaian IDG dan IPG Kabupaten Tanah Datar diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sampai dengan laporan ini selesai disusun, data tahun 2024 belum dapat diperoleh karena belum dirilis oleh BPS. IPG sendiri dihitung dari rasio antara IPM laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, idealnya nilai IPG idealnya mendekati 100. Apabila nilai IPG di bawah 100, hal ini menandakan capaian pembangunan perempuan masih di bawah capaian pembangunan laki-laki. IDG digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional, teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Grafik 2.17
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan dan Pembangunan Gender







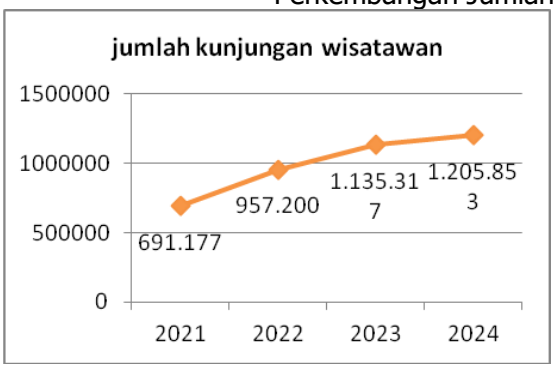


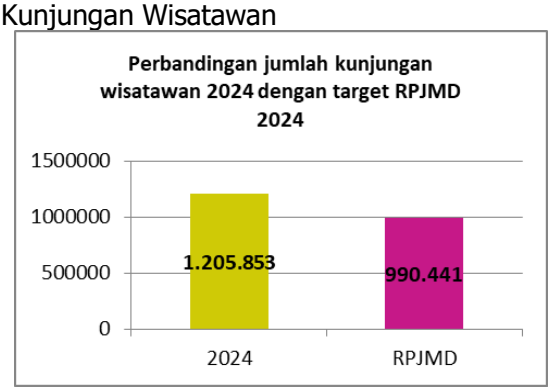
Sasaran Strategis 9 : **Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial**				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
15.	Jumlah kunjungan wisatawan	1.200.000	1.205.853	100,49%
16.	Lama tinggal wisatawan (hari)	2	1	50,00%

IX.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar sudah melebihi dari target sebesar 100,49% atau sebanyak 1.205.853 orang wisatawan. Berikut adalah perkembangan capaian indikator Jumlah kunjungan wisatawan:

Grafik 2.18
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan





Jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan sebanyak 1.200.000 terealisasi sebanyak 1.205.853 (100,49%), meningkat bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada tahun 2023 sebanyak 1.135.317 wisatawan, atau meningkat sebanyak 5.853 wisatawan. Apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2023, maka jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 meningkat sebanyak 0,51%. Berikut adalah data kunjungan wisatawan pada objek-objek wisata di Tanah Datar:

Tabel 2.23
Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 – 2024 per Objek Wisata

No	Jumlah Wisatawan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1.297.786	**1.218.576**	**665.780**	**691.177**	**957.200**	**1.135.317**	**1.205.853**
1	Istano Basa Pagaruyung	420.744	395.389	191.754	238.088	322.397	348.624	251.168
2	Lembah Anai	140.598	99.067	74.365	26.021	76.968	96.483	44.044
3	Panorama Tabek Patah	23.755	23.376	75.635	65.366	37.655	12.669	6.557
4	Puncak Pato	33.751	27.358	33.910	16.138	18.491	28.794	35.905
5	Tanjung Mutiara	53.033	51.740	46.659	66.143	64.645	25.239	26.361
6	Batu Angkek-Angkek	12.672	11.832	4.416	6.161	6.607	4.051	6.997
7	Batu Batikam	11.544	11.535	1.807	10.011	1.840	1.677	1.391
8	Batu Basurek	11.044	10.950	1.975	10.285	2.043	1.108	1.392
9	Nagari Tuo Pariangan	245.391	242.009	41.665	57.211	185.387	127.664	110.886
10	Aie Angek Padang Ganting	55.507	50.910	58.319	81.974	62.691	66.408	49.362
11	Kincia Kamba Tigo	33.754	28.610	-	-	-	-	
12	Tan Kayo	-	-	-	-	-	70.024	35.729
13	Puncak Aua Sarumpun	51.657	50.875	75.841	75.644	35.069	20.161	25.850
14	Pandai Sikek	40.841	40.496	32.540	7.683	2.947	3.470	17.940
15	Pacu Jawi	54.561	58.484	7.430	-	50.300	42.880	67.362
16	Wisata Pendaki Gunung	17.525	17.378	12.670	22.732	-	2.107	0
17	Event Kepariwisataan	73.992	52.520	-	7.720	90.160	180.392	128.355
18	Destinasi Digital Pasar Van der Capellen	17.417	46.047	6.794	-	-	1.100	2.045
19	Desa Wisata Pagaruyung Pakarak	-	-	-	-		2.637	390

	River Park					-		
20	Batu Badinding	-	-	-	-	-	1.400	3.834
21	Tanjung Indah	-	-	-	-	-	43.594	37.151
22	Tabek Ganggam	-	-	-	-	-	31.304	32.205
23	Desa Wisata Sumpu	-	-	-	-	-	1.598	890
24	Lubuak Soda	-	-	-	-	-	20.424	0
25	Rumah Tuo Balimbing	-	-	-	-	-	818	4.662
26	Bukit Siduali	-	-	-	-	-	691	1.125
	TOTAL	1.297.786	1.218.576	665.780	691.177	957.200	1.135.317	1.205.853

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kunjungan pada beberapa objek wisata, dan yang mengalami peningkatan signifikan adalah kunjungan wisatawan pada event pariwisata yang diselenggarakan sepanjang tahun 2024

Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawa ke Kabupaten Tanah Datar:

1. Festival Pesona Minangkabau merupakan agenda tahunan yang beranjak dari program unggulan Satu Nagari Satu Event. Kabupaten Tanah Datar sebagai wilayah tertua dan sebagai tempat asal usul etnis Minangkabau, ikut bertanggung jab untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Pada tahun 2024 Festival Pesona Minangkabau dilaksanakan di Istano Basa Pagaruyung dan Lapangan Cindua Mato. Adapun rangkaian kegiatan acara Festival Pesona Minangkabau tahun 2024 yaitu acara dibuka oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Fahmy Akmal, mewakili Menteri Pariwisata. Acara menampilkan berbagai sajian, seperti kuliner Minangkabau tempo dulu, kampong kopi, lomba fotografi, makan bajamba, pasar UMKM Minangkabau, dan Paju Jawi. Acara ditutup oleh Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra pada Minggu sore dengan penampilan tari kolosal dari Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab dan Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas.





2. Pacu Jawi merupakan atraksi budaya anak nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Pacu Jawi merupakan olahraga budaya local yang sudah go international. Pelaksanaan Alek Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan secara bergiliran pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Rambatan.




3. Gowes Bareng Luhak Nan Tuo 2 yang dihadiri lebih dari 2000 peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2024 dengan star dan finish didepan Lapangan Cindua Mato Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.





4. *Launching Calendar of Event* 2024 dilaksanakan di Pangeran Beach Hotel, Padang pada tanggal 8 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang tamu undangan yang berasal dari dalam dan luarr Kabupaten Tanah Datar. Launching Calendar of Event 2024 diresmikan oleh Bupati Tanah Datar, Bapak Eka Putra, SE, MM yang didampingi tamu undangan lainnya. Acara berlangsung meriah dengan menampilkan seni budaya khas Tanah Datar yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Acara berlangsung secara live di Youtube Tanah Datar TV. Kegiatan ini

memuat rencana pelaksanaan 56 event untuk Satu Nagari Satu Event dengan rincian 37 Nagari pelaksanan baru dan 19 Nagari pelaksana yang lama.

5. Sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*) untuk dua obyek wisata, yaitu Istano Basa Pagaruyung dan Panorama Puncak Pato.
6. Gowes Bareng Luhak Nan Tuo 2, yang diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Jambi) dan Kabupaten/Kota lainnya.
7. Pagaruyung Islamic Art Festival, event Wisata bernuansa religi yang digelar di Istano Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, untuk mendukung Visit Beatifull West Sumatera 2024.
8. Pengembangan Ekonomi Kreatif, salah satu tulang punggung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar. Subsektor seni pertunjukan berkembang dengan baik di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar telah dikukuhkan menjadi salah satu Kabupaten Kreatif (KaTa Kreatif) bidang Seni Pertunjukan di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Hal ini menjadi platform dan daya ungkit baru dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tanah Datar.

IX.2 Lama Tinggal Wisatawan

Capaian indikator Lama tinggal wisatawan dihitung dengan menggunakan sampel data hunian pada Hotel Emersia yang berada di tengah kota Batusangkar. Hotel Emersia diambil sebagai sampel selain sebagai satu-satunya hotel dengan kapasitas hunian yang cukup besar dan representatif, juga hotel dengan tingkat hunian yang cukup tinggi sehingga dipandang cukup untuk dijadikan sebagai sampel. Pada tahun 2024, rata-rata lama tinggal wisatawan adalah satu hari. Hal ini masih belum memenuhi target RPJMD, yaitu dua hari. Secara umum, dari sisi daya tarik fasilitas yang ada di Kota Batusangkar memang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten tetangga seperti Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh (+/- satu jam perjalanan), bahkan Kota Padang yang jaraknya kurang lebih tiga jam dari Kota Batusangkar. Sementara itu, untuk menarik wisatawan masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya capaian kinerja indikator Lama Tinggal wisatawan adalah dari sisi daya tarik fasilitas yang ada di Kota Batusangkar memang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten tetangga seperti Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh (+/- satu jam perjalanan), bahkan Kota Padang yang jaraknya kurang lebih tiga jam dari Kota Batusangkar. Sementara itu, untuk menarik wisatawan masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung.

Peningkatan lama tinggal wisatawan adalah salah satu cara untuk memperpanjang dampak ekonomi dari sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan lama tinggal wisatawan di suatu daerah:

a. Pengembangan Atraksi Wisata yang Beragam
   - Diversifikasi Destinasi Wisata
     Mengembangkan berbagai jenis atraksi wisata yang menarik, seperti wisata alam, budaya, kuliner, dan wisata edukasi. Semakin beragam pilihan wisata yang tersedia, semakin besar peluang wisatawan untuk tinggal lebih lama.
   - Peningkatan Wisata Berbasis Budaya dan Sejarah
     Mengembangkan dan mempromosikan wisata budaya dan sejarah lokal yang dapat menarik wisatawan untuk lebih lama mengunjungi tempat-tempat bersejarah, situs arkeologi, atau acara budaya yang berkelanjutan.

b. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur
   - Peningkatan Infrastruktur Transportasi
     Memperbaiki aksesibilitas transportasi, baik transportasi umum, jalan, maupun fasilitas bandara untuk mempermudah wisatawan bergerak antar destinasi.
   - Fasilitas Wisata yang Nyaman
     Menyediakan fasilitas wisata yang lebih lengkap dan nyaman, seperti tempat peristirahatan yang berkualitas, pusat informasi wisata, dan fasilitas umum yang memadai.

c. Paket Wisata yang Menarik dan Fleksibel
   - Paket Wisata Multi-Destinasi
     Membuat paket wisata yang memungkinkan wisatawan untuk mengunjungi beberapa destinasi dalam satu kunjungan dengan durasi yang lebih lama.
   - Paket Wisata Berdurasi Lama
     Menyediakan paket wisata jangka panjang yang menawarkan pengalaman mendalam tentang daerah tersebut, seperti paket wisata yang mencakup kursus memasak, workshop seni, atau program tinggal di desa wisata.
   - Wisata Tematik
     Mengembangkan paket wisata tematik yang menarik untuk wisatawan dengan minat khusus (misalnya, wisata petualangan, wisata kesehatan, wisata kuliner, atau wisata religi).

d. Peningkatan Pengalaman Wisata

- Pengalaman Wisata yang Unik dan Interaktif

  Meningkatkan pengalaman wisata dengan menawarkan kegiatan interaktif seperti tur lokal bersama penduduk setempat, pengalaman kuliner, atau kegiatan seni dan kerajinan tangan yang memberi kesan mendalam bagi wisatawan.

- Festival dan Event Rutin

  Menyelenggarakan acara atau festival tahunan yang dapat menarik wisatawan untuk datang dan tinggal lebih lama, seperti festival musik, kuliner, atau seni yang diadakan secara rutin di daerah tersebut.

e. Promosi Wisata yang Terintegrasi

- Pemasaran Digital yang Efektif

  Meningkatkan promosi melalui platform digital, termasuk media sosial dan situs web pariwisata, untuk menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Informasi yang menarik dan lengkap dapat mendorong wisatawan untuk merencanakan kunjungan lebih lama.

- Kerjasama dengan Influencer dan Blogger Wisata

  Menggandeng influencer atau blogger wisata untuk mempromosikan keindahan dan potensi wisata daerah serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperpanjang waktu tinggal.

f. Peningkatan Fasilitas Akomodasi

- Beragam Pilihan Akomodasi

  Menyediakan beragam pilihan akomodasi, dari hotel bintang lima hingga penginapan yang lebih terjangkau seperti homestay, guesthouse, atau eco-lodges yang sesuai dengan preferensi wisatawan dari berbagai kalangan.

- Peningkatan Kualitas Layanan Akomodasi

  Meningkatkan kualitas layanan penginapan agar wisatawan merasa nyaman dan betah tinggal lebih lama, dengan pelayanan ramah, fasilitas lengkap, dan suasana yang mendukung.

g. Pengembangan Wisata Kesehatan dan Wellness

- Wisata Kesehatan

  Mengembangkan wisata berbasis kesehatan seperti spa, yoga, meditasi, atau terapi kesehatan yang dapat membuat wisatawan menghabiskan waktu lebih lama untuk relaksasi dan pemulihan.

- Wisata Wellness

  Menyediakan paket wisata wellness yang menggabungkan relaksasi fisik dan mental, seperti retreat kesehatan atau perjalanan spiritual yang dapat menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama.

h. Kolaborasi dengan Sektor Lain

- Kerjasama dengan Industri Lain

  Mengintegrasikan sektor pariwisata dengan sektor lain, seperti sektor kuliner, olahraga, atau pendidikan. Misalnya, mengadakan kursus atau pelatihan jangka panjang yang menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tersebut.

- Pengembangan Wisata MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)

  Menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan konferensi, seminar, atau pameran yang dapat menarik wisatawan bisnis untuk tinggal lebih lama.

i. Penyediaan Program Loyalitas dan Diskon

- Program Loyalitas

  Mengembangkan program loyalitas bagi wisatawan yang sering berkunjung dengan memberikan potongan harga atau fasilitas khusus bagi wisatawan yang menginap dalam jangka waktu lama.

- Paket Diskon Jangka Panjang

  Menawarkan paket diskon untuk wisatawan yang memesan akomodasi atau tiket wisata untuk durasi yang lebih lama, mendorong mereka untuk memperpanjang masa tinggal.

j. Pelibatan Masyarakat Lokal

- Pengalaman Autentik dengan Masyarakat Lokal

  Menawarkan kesempatan bagi wisatawan untuk tinggal di komunitas lokal, terlibat dalam kegiatan sehari-hari mereka, dan menikmati pengalaman budaya yang otentik. Ini dapat menciptakan alasan bagi wisatawan untuk tinggal lebih lama dan lebih menikmati destinasi.

Dengan mengimplementasikan beberapa atau seluruh rekomendasi ini, diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Sasaran Strategis 10: Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
17.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100%
18.	Indeks Pengawasan Kearsipan	B	BB (70,06)	100%
19.	Nilai SAKIP	71	67,60	95,21%

X.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapat prediket wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2009 atau selama lima belas tahun berturut-turut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 76/S-HP/XVIII.PDG/04/2024 tanggal 25 April 2024 menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan opini tersebut, maka bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah bebas dari temuan yang material.

Capaian indikator "Opini BPK atas laporan keuangan" dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan opini WTP sehingga diasumsikan, meskipun hasil audit belum keluar, capaian tahun 2024 diperkirakan akan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu WTP.

Dalam rangka mempertahankan Opini BPK pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.
2. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah, perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola keuangan dan aset daerah.

Capaian Opini BPK tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2022	WTP	WTP	100%
2.	2023	WTP	WTP	100%
3.	2024	WTP	WTP	100%




Kegiatan Entry Meeting pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)

X.2 Indeks Pengawasan Kearsipan

Capaian indikator berikutnya, yaitu " **Indeks Pengawasan Kearsipan**", meskipun secara umum nilai/skor yang diperoleh terus meningkat setiap tahun, namun masih belum mencapai target akhir RPJMD, yaitu "A". Pada tahun 2024, nilai yang diraih adalah 70,06 dan masuk ke dalam kategori "BB" dengan kategori Baik untuk Indeks Pengawasan Kearsipan tahun 2024. Dimana nilai ini melebihi dari target yaitu B. Pencapaian ini tidak terlepas dari pengawasan kearsipan Kabupaten Tanah Datar pada setiap perangkat daerah sehingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut perkembangan data Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2022-2024.

Tabel 2.24
Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2022	B	C	50%
2.	2023	B	B	100%
3.	2024	B	BB	150%

Permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum mempunyai Gedung penyimpanan arsip yang memenuhi standar, pengelolaan arsip pada perangkat daerah belum semuanya menerapkan standar yang baku dan tenaga arsiparis sendiri jumlahnya masih belum sesuai dengan kebutuhan.

Faktor pendukung capaian kinerja indikator Indeks Pengawasan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan nagari dengan melakukan sosialisasi serta penilaian

setiap tahun dan pemberian reward (berkelanjutan),

2. Peningkatan nilai IPK yaitu pelatihan terhadap SDM (tenaga arsiparis),
3. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip,
4. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan arsip pada Depo arsip yang menjadi salah satu aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan eksternal, serta lembaga kearsipan daerah melengkapi regulasi kearsipan sesuai dengan instrument yang telah ada.

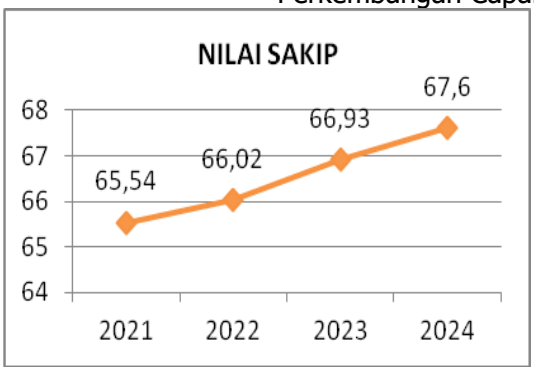


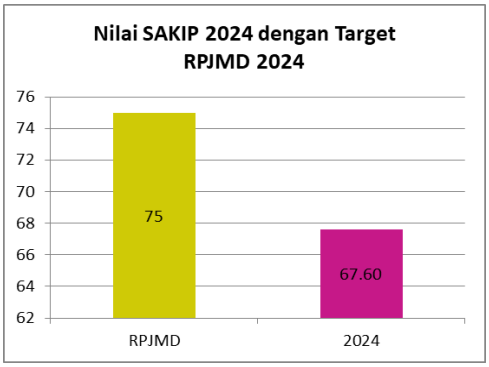
Rapat Koordinasi Kearsipan dan Pemberian Reward kepada Perangkat Daerah

X.3 Nilai SAKIP

Capaian indikator berikutnya, yaitu "Nilai SAKIP", meskipun secara umum nilai/skor yang diperoleh terus meningkat setiap tahun, namun masih belum mencapai target akhir RPJMD, yaitu "A". Pada tahun 2024, nilai yang diraih adalah 67,60 dan masuk ke dalam kategori "B". Berikut adalah grafik perkembangan nilai SAKIP dari tahun 2021 – 2024 dan perbandingan nilai SAKIP Tahun 2024 dengan target akhir RPJMD.

Grafik 2.19
Perkembangan Capaian Indikator Nilai SAKIP





Upaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan terus dilakukan. Verifikasi dan reviu atas dokumen perencanaan perangkat daerah untuk menjamin konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan Kabupaten secara konsisten terus dilakukan. Monitoring dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Namun demikian, capaian nilai SAKIP ini belum bisa beranjak dari "B" ke "BB" atau bahkan ke "A".

Faktor yang menyebabkan belum tercapainya target nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Belum ada implementasi integrasi sistem informasi perencanaan permbangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Saat ini, sistem yang digunakan adalah SIPD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, SIPD baru mengintegrasikan antara perencanaan dengan keuangan, belum mengakomodasi kebutuhan pengelolaan akuntabilitas kinerja.
2. Belum seluruh elemen berada pada level komitmen yang sama dalam penyelenggaraan SAKIP.
3. Masih dijumpai pimpinan perangkat daerah yang tidak terlibat secara intensif dalam penyelenggaraan SAKIP, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja.
4. Sumber Daya Manusia aparatur yang menangani atau bertanggung jawab pada perencanaan belum seluruhnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya, baik secara akademik maupun secara teknis.

5. Melakukan Sharing Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung



Sharing Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Sharing Informasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ke Pemerintah Kota Bandung

Strategi peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan implementasi SAKIP:

a. Peningkatan Pemahaman dan Komitmen Pimpinan.

Pimpinan instansi pemerintah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya SAKIP. Komitmen pimpinan dalam memimpin perubahan dan memastikan bahwa SAKIP

diimplementasikan dengan baik sangat penting untuk mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas.

b. Penyusunan Rencana Aksi yang Jelas.

Setiap instansi perlu memiliki rencana aksi yang terstruktur dengan baik. Ini mencakup penetapan tujuan kinerja yang terukur, indikator kinerja, dan sasaran yang realistis, serta mekanisme monitoring yang efektif.

c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Melatih dan mengembangkan kompetensi aparatur pemerintah agar lebih memahami dan mampu mengelola proses perencanaan dan pengukuran kinerja secara tepat sangat penting. Pelatihan dalam penyusunan laporan kinerja dan pengelolaan data juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

d. Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif.

Membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi yang baik untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang berbasis pada hasil (outcome-based monitoring) akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mempermudah proses pelaporan dan pemantauan kinerja. Pengembangan sistem informasi manajemen kinerja (SIMK) yang terintegrasi dan mudah diakses akan memudahkan instansi dalam melaksanakan SAKIP secara efisien.

f. Keterlibatan Stakeholder.

Melibatkan berbagai stakeholder, baik internal (pegawai) maupun eksternal (masyarakat, lembaga pengawas) dalam proses evaluasi dan perencanaan kinerja dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi, yang pada gilirannya mendorong perbaikan dalam implementasi SAKIP.

g. Penerapan Penghargaan dan Sanksi.

Memberikan penghargaan bagi instansi yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik serta menerapkan sanksi bagi instansi yang tidak memenuhi target atau mengabaikan prinsip akuntabilitas dapat mendorong persaingan yang sehat dan meningkatkan kinerja secara

keseluruhan.

h. Kolaborasi Antar Instansi.

Mengadakan forum kolaborasi antar instansi untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam implementasi SAKIP dapat meningkatkan pemahaman serta menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pemerintah.

i. Evaluasi dan Penyempurnaan Berkelanjutan.

Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SAKIP dan menyempurnakan proses yang ada berdasarkan temuan dan feedback akan membantu memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efektivitas SAKIP secara keseluruhan.

Implementasi SAKIP yang efektif membutuhkan kerja keras dari semua pihak dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 11: **Meningkatnya birokrasi yang kapabel**				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
20.	Indeks SPBE	3,22	2,81	87,27%
21.	Indeks Profesionalitas ASN	79,8	84.56	105.96%
22.	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,2	3,2	100%

XI.1 Indeks SPBE

Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Capaian indikator "Indeks SPBE" pada tahun 2024 adalah 2,81 terjadi penurunan dari capaian tahun 2023 sebesar 3,22. Beberapa penyebab terjadi penurunan Indeks SPBE yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih belum memiliki kebijakan internal arsitektur dan peta rencana SPBE serta Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum menerapkan manajemen SPBE yang terencana dan terarah. Dalam pengukuran Indeks SPBE salah satu indikator yang harus dipenuhi adanya regulasi yang mengikat Perangkat Daerah atau masyarakat yang berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan SPBE yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah pendukung SPBE.

Untuk melayani kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik, hingga akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 50 aplikasi layanan administrasi Pemerintahan

dan layanan publik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana daftar berikut:

Tabel 2.25
Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

No.	Nama Aplikasi	Fungsi
1	LAPOR SP4N	Layanan pengaduan publik
2	SPSE	Layanan pengadaan barang/jasa
3	SIRUP	Informasi rencana umum pengadaan
4	SIPD	Perencanaan, penganggaran dan keuangan daerah
5	SIAK	Layanan administrasi kependudukan pusat
6	SRIKANDI	Layanan kearsipan
7	SIDEKA	Website dan layanan desa
8	OSS	Layanan perizinan pusat
9	SIMBG	Izin mendirikan bangunan
10	Dapodik	Informasi profil pendidikan
11	Prodeskel	Profil Nagari
12	Siskeudes	Pengelolaan keuangan nagari
13	Simda BMD	Pengelolaan aset daerah
14	Sim Gaji	Pembuatan daftar gaji ASN
15	JDIH	Informasi produk hukum
16	PPID	Layanan informasi publik
17	Portal Tanah Datar	Website Tanah Datar versi mobile
18	Whistleblower	Layanan pengaduan daerah
19	Portal Data	Informasi data daerah
20	Geoportal	Informasi geospasial daerah
21	Diruang data	Informasi pemanfaatan ruang
22	E-Sakip	Informasi capaian kinerja perangkat daerah
23	Sitampan	Kinerja ASN
24	Abon	Absensi online ASN
25	Silamak	Layanan manajemen kepegawaian bagi ASN
26	Sijabri	Analisa jabatan
27	Sipintar	Layanan perizinan daerah
28	Oasedukcapil	Layanan administrasi kependudukan daerah
29	PPDB Online	Penerimaan peserta didik baru
30	Tanda Preneur	Pemberdayaan calon usahawan baru
31	Bajak Gratis	Layanan bajak gratis
32	Jelita	Informasi harga komoditas pertanian
33	Sidinda	Pengendalian inflasi daerah
34	Simbangda	Monitoring evaluasi kegiatan
35	Dashboard	Informasi penggunaan anggaran pengadaan dan data capaian kinerja
36	IPKD	Informasi indeks pengelolan keuangan daerah
37	E-Perben	Monitoring realisasi keuangan
38	PBB	Pengelolaan PBB

39	BPHTB	Pengelolaan BPHTB
40	Sipena	Perlindungan anak
41	SIAPPKK	Informasi dasawisma PKK
42	SIMRS GOS	Manajemen rumah sakit
43	Siduri	Sistem informasi data Pustu dan Poskesri.
44	Khanza	Layanan rekam medis Puskesmas
45	QR Code Pariwisata	Informasi inventori wisata
46	Aplikasi KIR	Pengelolaan KIR Kendaraan
47	Menara	Database menara seluler
48	Buku Tamu	Administrasi bagi tamu
49	Antrian MPP	Sistem antrian pada Mal Pelayanan Publik
50	Antrian Dukcapil	Sistem antrian pada Dinas Dukcapil

Aplikasi yang telah terintegrasi hingga akhir 2024 tercatat sebanyak 23 aplikasi sebagaimana daftar berikut:

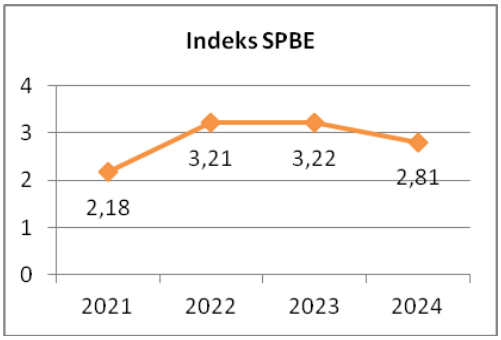
Tabel 2.26
Aplikasi yang telah terintegrasi

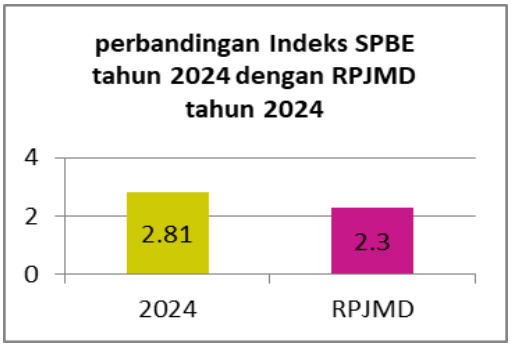
No.	Nama Aplikasi	Fungsi/Kegunaan	Integrasi
1.	SIPD	Perencanaan, penganggaran, keuangan	Terintegrasi dalam 1 aplikasi
2.	Portal Data	Informasi data daerah	Portal data nasional
3.	SPSE	Pengadaan barang/Jasa	SIRUP dari LKPP
4.	Simbangda	Monitoring Evaluasi Kegiatan	Simbangda Provinsi
5.	OASE Dukcapil	Layanan adminduk	SIAK
6.	SIAK	Layanan Adminduk	Datawarehouse Kemendagri
7.	Sipintar	Pelayanan perizinan	SIAK dan KWSP Dirjen Pajak
8.	OSS	Pelayanan perizinan	SIAK dan KWSP Dirjen Pajak
9.	SIMBG	Izin mendirikan bangunan	OSS
10.	PPID	Layanan informasi	PPID Nagari
11.	JDIH	Layanan informasi hukum/peraturan perundang- undangan	BPHN Kemenkumham
12.	Diruang Data	Informasi Pemanfaatan ruang	Silamak
13.	PPDB Online	Penerimaan Peserta didik Baru	Portal SPLP
14.	Aplikasi PBB	Layanan PBB	Aplikasi Bank Nagari
15.	Aplikasi BPHTB	Layanan BPHTB	Aplikasi BPN
16.	Silamak	Layanan Manajemen Kepegawaian bagi ASN	Abon, PPID, JDIH, WBS, dll
17.	Abon	Absensi online	Sitampan
18.	Khanza	Layanan Puskesmas	Satu Sehat
19.	Portal Tanah Datar	Website Tanah Data versi mobile	WebsiteTanah Datar
20.	Geoportal	Informasi Geospasial Daerah	Diruang data

21.	Dashboard	Informasi penggunaan anggaran pengadaan dan data capaian kineja	Simbangda, Sakip, Sipedal
22.	E-Sakip	Informasi capaian kinerja perangkat daerah	Silamak
23.	IKPD	Informasi indeks pengelolaan keuangan daerah	PPID

Keberhasilan capaian sasaran strategis "Meningkatnya birokrasi yang kapabel" dapat dilihat dari capaian indikator-indikator sebagai berikut:

Grafik 2.20
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel





Peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan nilai SPBE:

a. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
   - Penguatan Infrastruktur Jaringan

     Memastikan jaringan internet yang stabil, cepat, dan dapat diakses secara merata, termasuk di daerah terpencil, untuk mendukung implementasi SPBE di seluruh wilayah.
   - Pemeliharaan dan Pembaruan Infrastruktur

     Secara rutin memelihara dan memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sistem pemerintahan.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
   - Pelatihan Berkelanjutan untuk Aparatur

     Memberikan pelatihan rutin bagi pegawai pemerintah untuk menguasai teknologi terbaru, serta memahami prinsip-prinsip dasar dan teknis terkait SPBE.
   - Pengembangan Kompetensi TIK

Memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kebijakan terkait TIK pada setiap level pemerintahan untuk memastikan implementasi yang efektif.

c. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Terkait SPBE
   - Penyusunan dan Pembaruan Kebijakan

     Mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan SPBE, termasuk standar keamanan data, *interoperabilitas,* serta kebijakan terkait privasi dan perlindungan data pribadi.
   - Penguatan Regulasi

     Meningkatkan penerapan regulasi dan pedoman yang jelas terkait SPBE, termasuk sanksi bagi instansi yang tidak mengimplementasikan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Interoperabilitas Antar Sistem
   - Integrasi Sistem Antar Instansi

     Memastikan bahwa berbagai sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah dapat saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dengan lancar *(interoperabilitas),* guna mempercepat proses layanan publik dan berbagi data secara efektif.
   - Pembangunan Platform Terpadu

     Mengembangkan platform yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah untuk memudahkan akses bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintah.

e. Peningkatan Keamanan Informasi dan Perlindungan Data
   - Perlindungan Data dan Privasi

     Mengimplementasikan kebijakan dan sistem yang kuat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif yang dikelola oleh pemerintah, serta memastikan bahwa data tersebut hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
   - Penguatan Keamanan *Cyber*

     Memperkuat sistem keamanan siber untuk mencegah ancaman peretasan dan kebocoran data yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

f. Pengembangan Layanan Publik Digital
   - Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan

     Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik dengan fokus pada kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan akses bagi masyarakat,

seperti layanan administrasi kependudukan, perizinan, atau pengajuan keluhan publik.

- Meningkatkan Layanan E-Government

  Mengoptimalkan penerapan e-government dengan menyediakan portal online untuk layanan publik yang lebih luas, seperti *e-budgeting, e-planning, dan e-monitoring.*

g. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

- Akses Informasi yang Terbuka

  Membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah melalui platform digital yang transparan.

- Pemanfaatan Big Data dan Analitik

  Menggunakan big data dan analitik untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan berbasis data dan memperbaiki kinerja pemerintahan.

h. Pendekatan Kolaboratif dan Partisipatif

- Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

  Meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengembangan dan implementasi SPBE untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan efisien.

- Partisipasi Publik dalam Pengembangan SPBE

  Melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam pengembangan dan evaluasi layanan SPBE untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik.

i. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

- Evaluasi Kinerja SPBE

  Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SPBE di setiap instansi untuk mengidentifikasi kekurangan dan mencari solusi perbaikan yang diperlukan.

- Peningkatan Sistem Monitoring

  Mengembangkan sistem monitoring yang dapat memantau kinerja sistem SPBE secara real-time untuk memastikan bahwa SPBE berfungsi dengan baik dan efisien.

j. Penggunaan Teknologi Terkini

- Penerapan Teknologi Baru

  Menerapkan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan *(AI), blockchain*, dan analitik data besar, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyampaian layanan publik berbasis elektronik.
- Inovasi Layanan Digital

  Terus berinovasi dengan menciptakan aplikasi dan sistem baru yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti aplikasi berbasis mobile untuk mengakses layanan pemerintah.

Dengan mengikuti rekomendasi-rekomendasi di atas, SPBE dapat berkembang lebih baik, mempermudah akses pelayanan publik, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Peningkatan nilai SPBE yang berkelanjutan akan berkontribusi pada efisiensi birokrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

XI.2 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator "Indeks Profesionalitas ASN" digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan SDM Aparatur di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2024, nilai IP ASN Kabupaten Tanah Datar adalah 84,56, meningkat dari nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 (79,80). Nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 79,80. Untuk mencapai target kinerja ini, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualifikasi Pendidikan
   a. Proses pemberian izin belajar dan tugas belajar kepada 77 orang PNS.
   b. Pemberian bantuan pendidikan bagi 2 orang PNS.
   c. Pemberian beasiswa pendidikan S2 bagi 5 orang PNS melalui system cost sharing antara Pemerintah Daerah dan Bappenas.
   d. 10 mahasiswa STTD melalui jalur ikatan dinas berdasarkan MoU antara Pemerintah Daerah dengan STTD.
   e. Pemakaian/penyesuaian gelar akademik sebanyak 55 orang PNS.
2. Peningkatan kompetensi ASN
   a. Diklat Pelatihan Dasar bagi CPNS sebanyak 5 orang.
   b. Pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 2 orang
   c. Pengiriman peserta pelatihan kepamongprajaan bagi Camat sebanyak 1 orang
   d. Pengiriman peserta pelatihan perencanaan sebanyak 1 orang.
   e. Orientasi PPPK formasi tahun 2024 sebanyak 888.

3. Peningkatan kinerja ASN

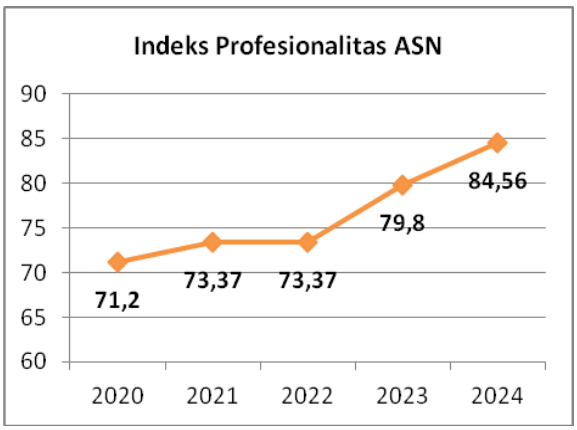
   Pada tahun 2024 evaluasi kinerja ASN melalui aplikasi e-Kinerja.. BKPSDM melaksanaka evaluasi terkait kepatuhandalam penyusunan dan penilaian kinerja pada aplikasi e-Kinerja secara secara rutin per triwulan.

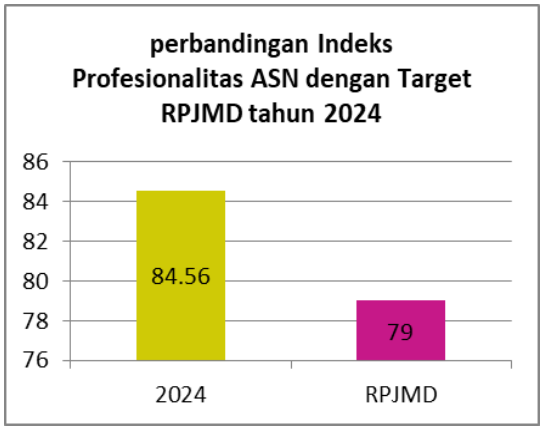
4. Peningkatan disiplin ASN

   a. Sosialisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

   b. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Grafik 2.21
Indek Profesional ASN



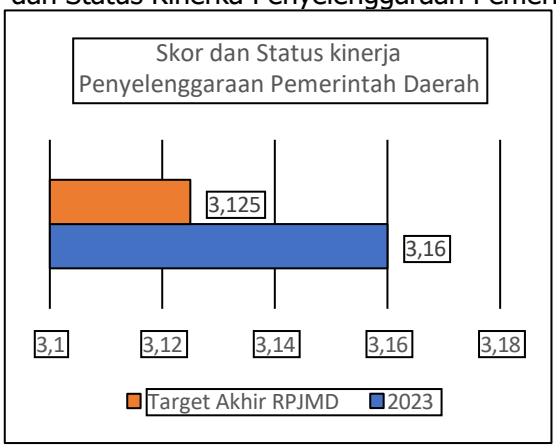


XI.3 Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah

Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai tolak ukur Kualitas pemerintahan daerah dan memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah. Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 mendapatkan skor 2,62 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 3,16 untuk hasil tahun 2023 masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sementara dalam RPJMD target untuk Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 3,125. Untuk meningkatkan kinerja ini ada beberapa hal yang dilakukan seperti:

1. Memberikan penjelasan langsung dengan mengundang OPD ke Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar tentang penyusunan LPPD Perangkat Daerah untuk meminimalisir kesalahan yang berulang.
2. Kedepannya direncanakan untuk mengadakan Soisalisasi kepada OPD untuk penyusunan LPPD pada instansi masing-masing.

Grafik 3.19
Skor dan Status Kinerka Penyelenggaraan Pemerintah







Memberikan Penjelasan langsung ke perangkat daerah dalam penyusunan LPPD

Sasaran Strategis 12: Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
23.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95,27	100,28%

Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat dihitung berdasarkan hasil survey di seluruh unit pelayanan publik, dengan hasil IKM Tahun 2024 adalah 95,27 (Sangat Baik), meningkat dari capaian tahun 2023 (94,57 atau Sangat Baik). Untuk mendukung upaya tersebut, sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan pembinaan dan evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Pada tahun 2024, berdasarkan evaluasi dari Ombudsman RI, hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan nilai 93,51 (zona hijau) masuk kategori A (kualitas tertinggi). Pada tahun

2024 sebanyak enam (6) unit layanan di lingkungan pemerintah kabupaten Tanah Datar yang di evaluasi oleh Ombudsman RI, adapun hasil evaluasi penilaian kepatuhan tersebut yaitu: Puskesmas Sungayang dengan nilai 97,59 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Puskesmas Tanjung Emas dengan nilai 93,98 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Pendidikan dengan nilai 93,45 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Sosial dengan nilai 92,95 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 92,15 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 90,97 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi).



Kegiatan Entry Meeting SKM dengan LPPM Unand

Pelaksanaan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 melalui pihak eksternal, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang dilaksanakan pada 41 perangkat daerah. Pada tahun 2024 juga dilakasanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB, Dimana ada tiga (3) Unit Lokus Evaluasi (ULE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu Dinas Sosial sebagai cerminan pelayanan barang dengan nilai 3,86. Rumah Sakit Umum Daerah M Ali Hanafiah SM Batusangkar sebagai perwakilan pelayanan jasa dengan nilai 4,40. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perwakilan pelayanan administrasi dengan nilai 4,53. Maka hasil Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 adalah 4,26. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar yang dinilai oleh Kementerian PANRB dengan nilai A- dan hasil penilaian oleh Ombudsman RI.

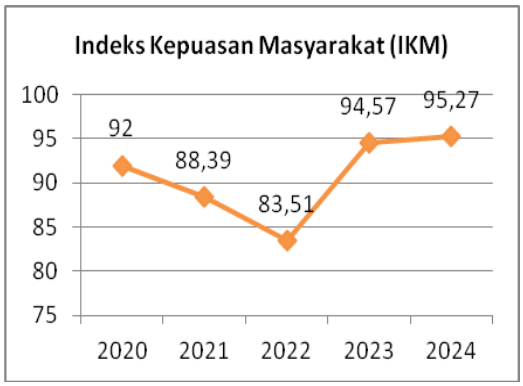


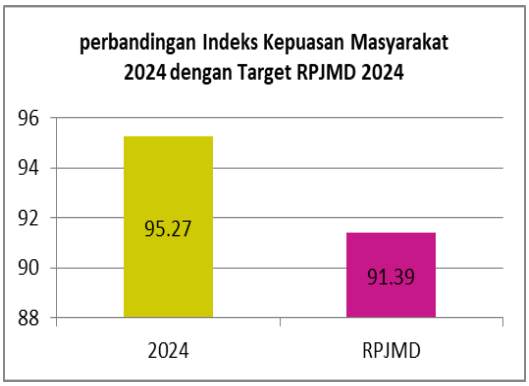
Gambar Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB



Gambar Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI

Grafik 2.22
Perkembangan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat





Berikut Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Pekppp) Kabupaten Dan Kota Se Sumatera Barat Tahun 2024:

Table 2.27
Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

NO.	KABUPATEN/KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KAB/KOTA	KATEGORI
1.	Kota Payakumbuh	4,51	4,48	4,51	4,50	A-
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	4,53	4,39	4,47	4,46	A-
3.	Kabupaten Solok	4,51	4,32	4,55	4,46	A-
4.	Kabupaten Sijunjung	4,41	4,42	4,25	4,36	A-
5.	Kota Pariaman	4,22	4,21	4,52	4,32	A-
6.	Kabupaten Padang Pariaman	4,23	4,47	4,17	4,29	A-
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	4,52	4,32	3,96	4,27	A-
8.	Kabupaten Tanah Datar	3,86	4,40	4,53	4,26	A-
9.	Kota Padang Panjang	3,51	4,45	4,56	4,17	A-
10.	Kabupaten Pasaman	3,68	4,16	4,54	4,13	A-
11.	Kota Bukittinggi	3,62	4,44	4,33	4,13	A-
12.	Kota Solok	3,9	*NA	4,26	4,06	A-
13.	Kabupaten Solok Selatan	3,52	4,22	3,77	3,84	B
14.	Kabupaten Pasaman Barat	3,57	3,16	3,77	3,50	B-
15.	Kota Padang	2,98	3,68	3,67	3,44	B-
16.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,41	3,49	2,9	3,27	B-
17.	Kabupaten Agam	3,26	3,82	2,66	3,25	B-
18.	Kabupaten Dharmasraya	4,20	2,41	3,03	3,21	B-
19.	Kota Sawahlunto	2,67	3,09	3,77	3,18	B-

Sasaran Strategis 13: **Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah**				
No.	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Tingkat Capaian**
24.	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	76,78%	73,16%	95,29%
25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	65,32	90,72%
26.	Persentase bencana yang ditangani	100%	100%	100%

XIII.1 Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas

Indikator presentase infrastruktur wilayah yang berkualitas diukur dari persentase panjang jalan dalam kondisi baik, persentase ketersediaan jembatan kondisi baik, persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik, Persentase cakupan pelayanan air minum, dan Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak. Untuk target tahun 2024 Indikator presentase infrastruktur wilayah yang berkualitas sebesar 76,78 % dengan realisasi 73,16 Dengan capaian persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas sebesar 95,29%.

Tabel 2.28
indikator Persentase Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian(%)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	81,39	69,89	85,87
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	90,00	87,24	96,93
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	71,29	57,28	80,35
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Persentase cakupan pelayanan air minum	80,50	76,55	95,09
4	Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	78,05	74,84	95,89
TOTAL			80.25	73,16	90,83

Panjang jalan kabupaten 1.138.66 km dan sepanjang 838.79 km berada dalam kondisi baik (baik-sedang). Target persentase panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2024 81,39 % dan realisasi 69,89% dengan tingkat capaian kerja 85,87%.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pada indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik yaitu Kondisi Kabupaten Tanah Datar yang memiliki bentang alam bervariasi seperti posisinya yang berada pada dua gunung yang masih aktif yaitu Gunung Marapi dan Tandikek, morfologi bergelombang, banyak dilalui sungai-sungai besar serta dilalui sesar besar jalur Sumatera (sesar semangko) menyebabkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap bencana, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan.

Target Persentase ketersediaan jembatan kondisi baik pada tahun 2024 adalah 90% dari jumlah kabuapten sebanyak 200 unit, jembatan dalam kondisi baik dan rusak ringan 253 unit ataau 87.24% dengan tingkat capaian kinerja 96.93%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target untuk persentase jembatan berkondisi baik karena curah hujan yang tinggi dan terjadinya Banjir Bandang pada tanggal 11 Juni 2024 yang mengakibatkan 22 unit jembatan putus dan 2 unit rusak berat.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan jalan dan jembatan dengan kondisi baik adalah:

a. Melakukan survei terhadap kondisi jalan dan jembatan untuk mengetahui existing jalan saat ini yang dijadikan dasar perencaan ditahun selanjutnya agar bisa menetukan prioritas perbaikan jalan yang akan dikerjakan.
b. Melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin untuk mencegah kerusakan yang lebih berat.
c. Mengupayakan untuk mendapatkan program pembangunan bidang jalan ke pemerintah pusat dan propinsi.

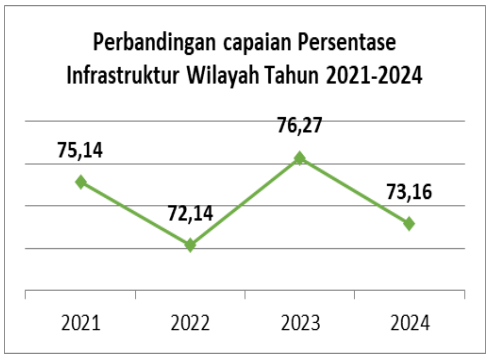
Target Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik tahun 2024 adalah 71,29% (seluas 29.003 ha), luas areal irigasi yang berkondisi baik 1.613,6 Ha dengan tingkat capaian 57,28 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80, 35%. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya untuk irigasi dalam kondisi baik karena curah hujan yang sangat tinggi dan erupsi gunung merapi menyebabkan banjir bandang yang merusak jaringan irigasi, tanggul, sungai dan pendangkalan sungai akibat terimbun material. Untuk mengatasi permasalahan ini maka dilakukan upaya mengoptimalkan penjaga pintu air, melakukan pembinaan terhadap petani pamakai untuk pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

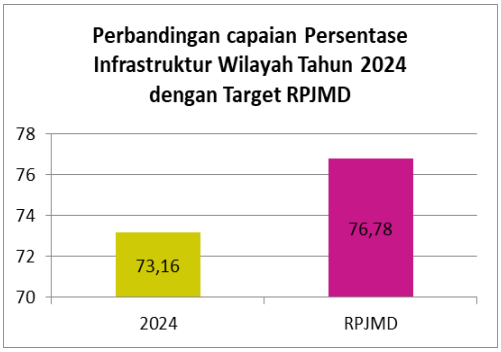
Target Persentase cakupan pelayanan air minum tahun 2024 adalah 80.50% (95,324 rumah tangga dari 124.527 rumah tangga) atau 75, 66%. Tingkat capaian Persentase cakupan pelayanan air minum daalah 95.9%. Faktor tidak tecapainya Persentase cakupan pelayanan air minum ini adalah karena terjadinya bencana alam banjir bandang yang menyebabkan kerusakan pada sumber air, bak penampung dan sambungan rumah air minum di 20 titik lokasi.

Target Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang sudah memiliki akses sanitasi sebesar 74,84% dari 380.727 jiwa jumlah penduduk. Capaian kinerja indikator persentase penduduk dengan akses sanitasi layak adalah 74,84%. Realisasi capaian yang tidak mencapai 95,89%.

Berikut adalah perkembangan capaian indikator "Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas":

Grafik 2.23
Perkembangan Capaian Indikator Infrastruktur Wilayah yang berkualitas





Galeri Pembangunan Infrastruktur Tahun 2024



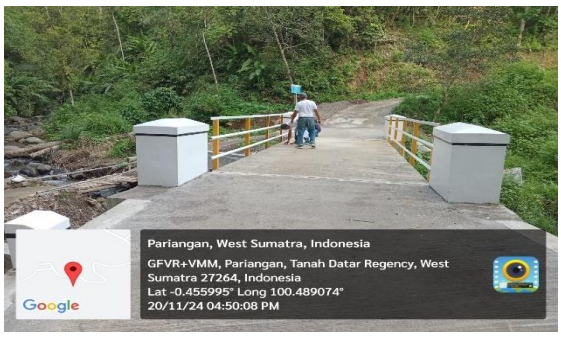
Ruang Jalan Lawang Mandahiling



Ruas Jalan Salimpaung



Jembatan Koto Baranjak



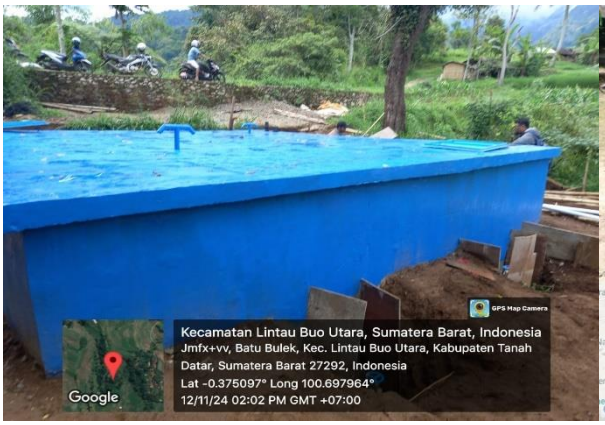
Jembatan Pariangan



Saluran Irigasi



Saluran Irigasi



Pelayanan Air Minum



Pelayanan Air Jaringan Minum



Galeri Kuanitas Jaringan Sanitasi



Galeri Kuanitas Jaringan Sanitasi

Peningkatan infrastruktur berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan daya saing sebuah negara. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan infrastruktur berkualitas baik:

a. Perencanaan Infrastruktur yang Tepat dan Berkelanjutan
   - Studi Kelayakan yang Mendalam:*

Setiap proyek infrastruktur harus dimulai dengan studi kelayakan yang mendalam, melibatkan analisis kebutuhan jangka panjang dan dampak terhadap lingkungan dan sosial.

- Perencanaan Berkelanjutan

  Pastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan masa depan dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, serta teknologi.

b. Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi
   - Smart Infrastructure

     Penggunaan teknologi digital dan sistem berbasis *IoT (Internet of Things)* untuk mengelola infrastruktur, seperti sistem pengelolaan lalu lintas pintar, pengawasan kualitas udara, serta pemantauan energi yang lebih efisien.
   - Building Information Modeling (BIM)

     Teknologi BIM dapat meningkatkan perencanaan, desain, dan pengelolaan infrastruktur dengan memberikan gambaran visual yang lebih baik dan akurasi tinggi untuk merencanakan pembangunan.

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)*
   - Pelatihan dan Sertifikasi Profesional

     Meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan standar internasional.
   - Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

     Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang teknik dan manajemen infrastruktur.

d. Fokus pada Kualitas dan Keberlanjutan
   - Pemilihan Material yang Berkualitas

     Gunakan material berkualitas tinggi yang tahan lama dan ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur dalam jangka panjang.
   - Desain Ramah Lingkungan

     Bangun infrastruktur yang mengutamakan prinsip-prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta mempertimbangkan pengurangan emisi karbon.

e. Pendanaan Infrastruktur yang Efektif
   - Diversifikasi Sumber Pembiayaan

Pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, seperti skema pembiayaan publik-swasta (PPP), obligasi infrastruktur, serta dana internasional yang dapat mendukung proyek-proyek besar.

- Prioritas Pembiayaan

  Tentukan prioritas pembiayaan dengan memetakan proyek-proyek yang paling urgent dan memberikan dampak paling besar bagi perekonomian dan masyarakat.

f. Penguatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

- Kemitraan Publik-Swasta (PPP)

  Kerjasama dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menyeimbangkan antara kepentingan publik dan keuntungan swasta.

- Transparansi dan Akuntabilitas\

  Pastikan bahwa kerjasama antara pemerintah dan swasta berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.

g. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

- Pembangunan Infrastruktur Transportasi

  Fokus pada pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan kota besar dan daerah terpencil untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pemerataan pembangunan.

- Pengembangan Infrastruktur Logistik

  Perkuat sistem logistik untuk mempercepat distribusi barang dan mengurangi biaya logistik yang tinggi.

h. Pemeliharaan dan Perbaikan Berkala

- Rencana Pemeliharaan Terjadwal

  Infrastruktur yang telah dibangun harus dipelihara secara teratur untuk memastikan keandalannya dalam jangka panjang. Buat rencana pemeliharaan yang jelas dan implementasikan secara konsisten.

- Investasi dalam Infrastruktur Pemeliharaan

  Pemeliharaan seringkali terabaikan, tetapi harus menjadi prioritas dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjaga kualitas dan umur panjang infrastruktur.

i. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder

- Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan

Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan dampak negatif.

- Konsultasi dengan Stakeholder Terkait

  Selain masyarakat, pastikan bahwa proyek infrastruktur juga melibatkan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan masukan yang beragam.

j. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi

- Pengawasan yang Ketat

  Tingkatkan pengawasan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, untuk mencegah penyimpangan atau korupsi.

- Evaluasi Kinerja Infrastruktur

  Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja infrastruktur yang telah dibangun untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut memenuhi standar kualitas dan dapat berfungsi secara optimal.

Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur berkualitas baik dapat dilakukan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

XIII.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dengan menggunakan data Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berikut adalah data IKA, IKU dan IKL tahun 2024:

Tabel 2.29
Indikator IKLH 2024

	Target 2024	Realisasi
Indeks Kualitas Air (IKA)	60,87	40,71
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,74	91,82
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	58,26	58,59
IKLH	**72**	**65,32**

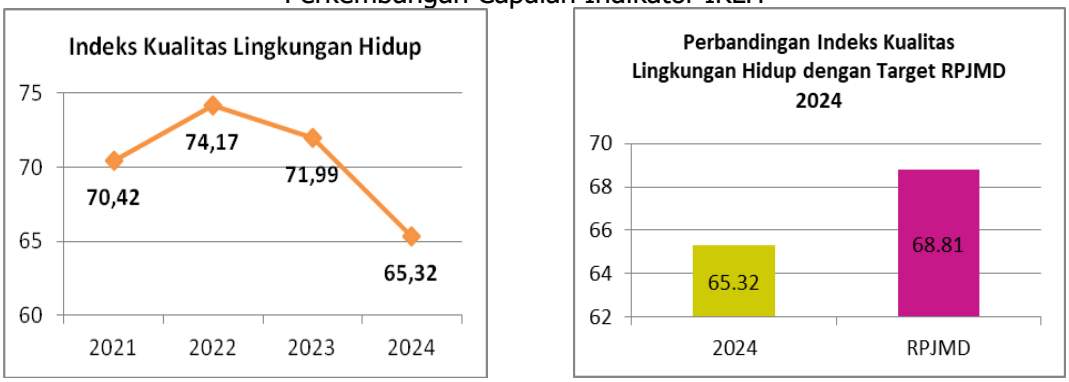
Nilai IKLH dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$IKLH = (0{,}376\ x\ IKA) + (0{,}405\ x\ IKU) + (0{,}219 x IKL)$$

$$= 0{,}376\ x\ 40{,}71 + 0{,}405\ x\ 91{,}82 + 0{,}219\ x\ 58{,}59$$

$$= 65{,}32$$

Grafik 2.24
Perkembangan Capaian Indikator IKLH



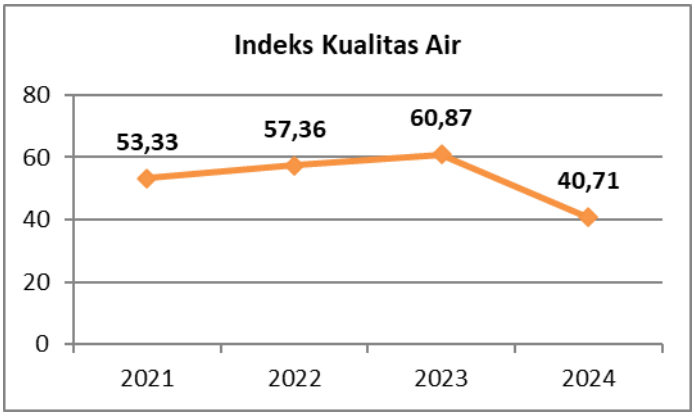
Kegiatan indeks kualitas lingkungan hidup terdiri atas :

- Uji kualitas air di 2 sungai masing-masing dengan 3 titik sampling yang diambil pada musim hujan dan musim kemarau.
- Uji kualitas air limbah TPA Bukik Sangkiang dengan 2 titik outlet kolam lindi dan 1 titik sumur pantau.
- Uji kualitas air hujan di Pagaruyung yang diambil pada musim hujan. Disamping melakukan pengujian kualitas air juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan DLH Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.30
Target dan Realisasi Indeks Kualitas Air

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	32,86	123,88

Grafik 2.25
Indeks Kualitas Air



Target Indek kualitas air tahun 2024 terjadi penurunan dari target tahun 2023, ini disebabkan Sungai yang ditetapkan sebagai titik pantau terdampak banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024. Kegiatan uji kualitas air dilakukan pada 2 titik sample/ Sungai dengan titik pantau pada hulu, tengah dan hilir sungai yaitu pada :

1. Sungai Batang Bangkahan
2. Sungai Batang Malana

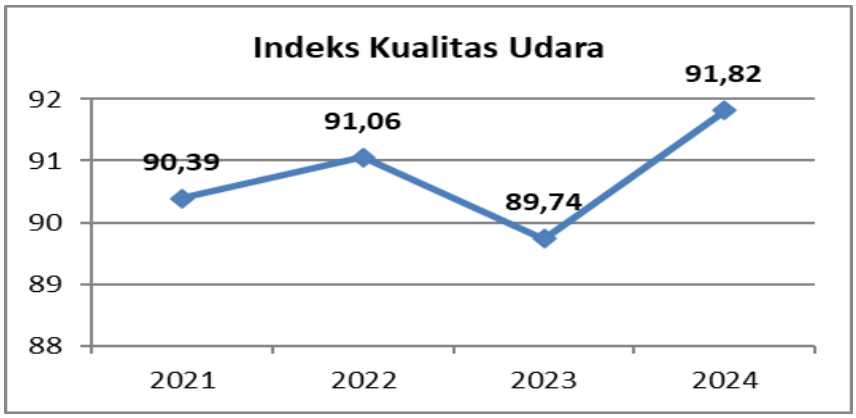
Pemantauan kualitas air dilakukan pada 2 periode yaitu :

1. Musim kemarau berkisar pada bulan Januari sd Juni
2. Musim hujan berkisar pada bulan Juli sd Desember

Tabel 2.31
Target dan Realisasi capaian Indeks Kualitas Udara

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Udara	85,88	91,82

Grafik 2.26
Indeks Kualitas Udara



Kondisi kualitas udara di Kabupaten Tanah Datar dikategorikan baik. capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami kenaikan. Untuk pencapaian target indikator yang telah ditetapkan perlu adanya peran berbagai pihak dan melibatkan multi sektor dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam pemenuhan pencapaian target Indeks Kualitas Udara bukan hanya pada aspek pemantauan dan pengukuran kualitas lingkungan hidup saja tetapi juga diperlukan program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan, penanggualangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan. Pemantauan kualitas udara dilakukan pada 4 lokasi/titik sampel dengan menggunakan Metode Passive Sampler yaitu:

1. Kompleks perkantoran pada halaman depan Kantor Bupati Tanah Datar
2. Kompleks industry di depan Industri Kopi Rangkiang Kaum Malana Ponco
3. Kompleks Perumahan Dobok Indah
4. Jalan raya/transportasi di Jalan Soekarno Hatta depan kantor Dinas Dukcapil Tanah Datar

Tabel 3.32
Target dan Realisasi capaian Indeks Kualitas Lahan

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Lahan	58,26	58,59

Capaian indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2023, hal ini dpengaruhi oleh peningkatan luas tutupan vegetasi terutama luas tutupan lahan dan luas lahan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengolahan, rehabilitasi serta pengendalian ekosistem di Kabupaten Tanah Datar serta adanya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan kualitas lahan.

Peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH:

a. Pengendalian Pencemaran Udara
   - Pengurangan Emisi Kendaraan Bermotor
     Memperketat regulasi emisi kendaraan bermotor dan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan transportasi umum.

- Penerapan Teknologi Bersih

  Menggunakan teknologi yang lebih bersih di sektor industri dan pembangkit listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya.

- Peningkatan Pemantauan Kualitas Udara

  Memperbanyak stasiun pemantauan kualitas udara dan memastikan data yang akurat serta transparan agar masyarakat dapat memantau kondisi udara secara real-time.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

- Konservasi Hutan dan Sumber Daya Alam

  Melakukan penanaman kembali (reboisasi) di daerah yang terdegradasi dan meminimalkan konversi lahan hutan menjadi lahan non-pertanian.

- Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu

  Mengembangkan program yang mengintegrasikan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, misalnya dalam sektor pertanian dan perikanan.

c. Pengelolaan Limbah yang Efisien

- Recycling dan Pengurangan Sampah

  Mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah, serta menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengolahan sampah rumah tangga dan industri.

- Pengelolaan Sampah Plastik

  Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kebijakan pelarangan atau pengurangan penggunaan plastik dan menggantinya dengan alternatif ramah lingkungan.

- Sistem Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi

  Meningkatkan pengelolaan sampah dengan cara yang lebih efektif, seperti mengoptimalkan sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah di tingkat lokal.

d. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Air

- Pengelolaan Sumber Daya Air yang Bijaksana

Melakukan konservasi air dengan cara efisien menggunakan teknologi untuk mengurangi pemborosan air dan memperbaiki infrastruktur pengelolaan air.

- Pengolahan Air Limbah yang Efektif
  Memastikan bahwa limbah domestik dan industri diproses dengan benar sebelum dibuang ke sungai atau laut agar tidak mencemari sumber air.
- Perbaikan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih
  Meningkatkan sistem distribusi air bersih ke seluruh wilayah, terutama daerah yang belum terjangkau.

e. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
   - Edukasi Lingkungan untuk Masyarakat
     Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup, dengan program edukasi yang berkelanjutan terkait pengelolaan sampah, penghematan energi, dan perlindungan alam.
   - Pemberdayaan Komunitas Lokal
     Memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti program kebersihan lingkungan, penghijauan, dan konservasi alam.

f. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Lingkungan
   - Penegakan Hukum yang Tegas
     Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup, termasuk terhadap industri yang tidak mematuhi standar emisi atau pengelolaan limbah.
   - Pengembangan Kebijakan Lingkungan yang Inklusif
     Mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, serta melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.
   - Insentif untuk Praktik Ramah Lingkungan
     Memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

g. Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan

- *Green Building*

  Mendorong pembangunan gedung dan infrastruktur yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air hujan, dan material bangunan yang berkelanjutan.

- Transportasi Ramah Lingkungan

  Meningkatkan infrastruktur transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

h. Peningkatan Keanekaragaman Hayati

- Konservasi Keanekaragaman Hayati

  Melindungi dan melestarikan spesies langka dan habitat alam, serta mengelola kawasan konservasi secara efektif untuk mendukung ekosistem alami.

- Restorasi Ekosistem yang Terdegradasi

  Melakukan rehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti mangrove, terumbu karang, dan hutan, untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mendukung keseimbangan ekosistem.

i. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan

- Sistem Pemantauan Lingkungan yang Terintegrasi\

  Membangun dan memperkuat sistem pemantauan yang terintegrasi untuk mengevaluasi kualitas lingkungan secara real-time di berbagai sektor, termasuk kualitas udara, air, tanah, dan biodiversitas.

- Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan

  Secara berkala melakukan evaluasi kebijakan dan program lingkungan hidup yang ada, dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan.

j. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

- Kolaborasi Lintas Sektor

  Menjalin kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- Kerjasama Internasional
  Berpartisipasi dalam inisiatif global untuk menangani isu-isu lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara sinergis, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

XIII.3 Persentase Bencana yang Ditangani

Persentase Bencana yang Ditangani bisa tercapai 100% karena bencana yang dilaporkan bisa tertangani 100%, Dengan Formulasi penghitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana Tahun 2024}}{\text{Jumlah kejadian yang ditangani}} \text{ X100\%}$$

Data kejadian bencana pada Tahun 2024 adalah sebanyak 213 kejadian, dengan penetapan status tanggap darurat sebanyak 3 kali dan seluruhnya dapat tertangani dengan baik. Formulasi penghitungan indikator ini adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk penanganan bencana dengan target paling lama 12 jam. Ini merupakan kecepatan terhadap respon bencana yang ditindaklanjuti dimulai dari laporan kejadian bencana yang diterima. Artinya BPBD selalu merespon dan menindaklanjuti setiap kejadian bencana dibawah waktu 12 jam. Namun kurangnya sarana prasarana dalam penanganan bencana yang bisa membuat penanganan bencana menjadi lambat. Target indikator Persentase Bencana yang Ditangani tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi kejadian 213 bencana dan dapat ditangani seluruhnya.

Tabel 2.33
Jumlah Bencana yang Ditangani Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Bencana yang ditangani	100% (81 Kejadian)	100% (89 Kejadian)	100% (124 kejadian)	10% (213 kejadian)

Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk capaian indikator Persentase Bencana yang Ditangani.

1. Merespon seluruh laporan kejadian bencana yang masuk baik dari masyarakat atau dari pihak lain dan melakukan penanganan kejadian bencana dengan

semaksimal mungkin dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait serta satgas nagari bencana.

2. Dikembangkan dan diterapkan Inovasi yang telah dilakukan oleh BPBD adalah membuat aplikasi SIPELANA (Sistem Pelayanan Kebencanaan) yang merupakan aplikasi untuk memudahkan dalam penanganan kebancanaan. Aplikasi ini pada Tahun 2024 telah coba digunakan, tetapi masih ada kendala dalam pengaplikasiannya seperti dalam mengakses formulir laporan bencana masih membingungkan bagi masyarakat.
3. Untuk Program Penanggulangan Bencana terjadi penambahan anggaran APDB Perubahan 2024 sebesar Rp 981.416.500,- berupa Belanja Konsultansi Perencana dan Konsultansi Pengawasan untuk 10 paket pekerjaan Rekontruksi Jalan dan Jembatan yang rusak akibat banjir bandang, sementara belanja fisiknya dianggarkan pada APBN melalui mekanisme dana siap pakai untuk pekerjaan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Nama Pekerjaan
1.	Nagari Sungai Jambu	Perbaikan Darurat Jembatan Aro
2.	Nagari Sungai Jambu	Perbaikan Darurat Jembatan Lona Ompang
3.	Nagari Sungai Jambu	Perbaikan Darurat Jembatan Pulai
4.	Nagari Koto Laweh	Perbaikan Darurat Jembatan Lurah Air Kalek
5.	Nagari Singgalang	Perbaikan Darurat Jembatan Lubuk Mata Kucing
6.	Nagari Koto Laweh	Perbaikan Darurat Jembatan Guguak Puti Saidu
7.	Nagari Batipuah Baru	Perbaikan Darurat Jembatan Sungai Maruok
8.	Nagari Tanjung Alam	Perbaikan Darurat Jembatan Sipopak
9.	Nagari Sungai Patai	Perbaikan Darurat Ruas Jalan Tali Agung-Sungai Patai





A. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 sebagai ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2023 adalah sebesar Rp. 1.352.808.437.874,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.266.769.592.678,- atau sebesar 93,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.34
Program dan Realisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
		1.299.969.192.850	**1.353.250.990.374**	**1.266.769.592.678**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	706.710.915.477	725.989.947.699	363.015.369.052
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	85.268.591.701	89.345.363.701	76.626.070.969
3.	Program Pengembangan Kurikulum	102.993.000	102.993.000	25.236.150
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Keseha	103.440.778.492	103.644.228.531	515.515.428
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	603.904.000	603.904.000	548.673.414
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	735.303.000	3.755.805.321	3.471.159.659
7.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	5.076.748.299	5.571.313.599	14.216.554.464,00
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.150.000.000	1.896.956.844	1.324.808.265

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
9.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.595.000.000	1.583.999.600	834.852.712
10.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	900.000.000	954.691.860	1.333.880.363
11.	Program Penataan Bangunan Gedung	570.000.000	3.774.947.140	3.041.060.983
12.	Program Penyelenggaraan Jalan	61.377.100.836	63.501.553.885	90.651.438.049
13.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	56.000.000	45.490.460	750.750
14.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.043.731.360	357.095.866	353.571.752
15.	Program Pengembangan Perumahan	122.447.000	32.447.000	58.685.285
16.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	87.000.000	5.382.990	999.900
17.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.214.564.400	1.215.799.400	1.014.888.750
18.	Program Penanggulangan Bencana	772.216.141	22.496.591	864.188.712
19.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.867.767.600	1.722.672.300	1.232.318.990
20.	Program Pemberdayaan Sosial	249.340.211	235.103.415	73.472.500
21.	Program Rehabilitasi Sosial	1.244.704.819	27.709.574.799	16.366.959.250
22.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.629.437.440	746.504.467	635.996.700
23.	Program Penanganan Bencana	128.800.000	121.644.000	39.688.000
24.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.000.000	33.220.800	18.776.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
25.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	390.900.000	388.900.000	475.298.972
26.	Program Penempatan Tenaga Kerja	51.376.800	51.376.800	52.765.050
27.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	769.900.000	856.365.500	509.434.126
28.	Program Perlindungan Perempuan	23.150.000	19.985.000	62.569.250
29.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	22.430.200	19.530.640	7.541.850
30.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	46.804.500	42.256.800	15.076.800
31.	Program Perlindungan Khusus Anak	62.126.700	8.259.800	353.304.587
32.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	183.000.000	111.081.016	180.468.484
33.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	67.350.000	62.763.200	32.158.230
34.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40.000.000	37.541.800	5.582.600
35.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	307.943.200	266.108.140	293.236.648
36.	Program Penatagunaan Tanah	120.501.000	85.413.200	21.355.000,00
37.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000	200.000.000	206.373.700
38.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	1.386.369.100
39.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	497.174.300	497.174.300	420.702.400

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
40.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	35.865.000	35.865.000	2.709.100
41.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	14.000.000	314.000.000	1.249.800
42.	Program Pengelolaan Persampahan	5.979.800.965	5.979.800.965	5.799.955.084
43.	Program Pendaftaran Penduduk	395.500.000	415.402.500	378.913.410
44.	Program Pencatatan Sipil	145.000.000	144.913.000	130.554.680
45.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.000.000	19.964.500	8.199.750,00
46.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000	9.821.800	892.000
47.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	15.000.000	-	1.461.600
48.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.947.252.705	4.066.877.625	124.531.422
49.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.795.787.500	3.385.297.808	3.605.613.942
50.	Program Pengendalian Penduduk	64.649.900	43.008.840	9.117.500,00
51.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.847.940.200	5.244.089.515	4.395.786.767
52.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.799.165.265	.386.828.371	2.274.889.440
53.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	10.379.174.218	13.927.125.818	12.945.442.494
54.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.104.285.829	1.631.503.618	1.546.298.503
55.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	875.699.173	861.733.858	786.146.374

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
56.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	10.000.000	9.000.000	12.274.931
57.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	140.125.000	140.125.000	164.100.000
58.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	30.000.000	32.000.000	30.036.200
59.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	462.199.125	321.020.000	451.338.900
60.	Program Pengembangan Umkm	5.469.688.640	731.128.200	207.065.583
61.	Program Promosi Penanaman Modal	44.000.000	110.275.000	152.303.050
62.	Program Pelayanan Penanaman Modal	208.983.750	172.298.850	500.247.000
63.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	460.600.000	460.600.000	699.778.700
64.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	245.897.670	240.554.370	14.628.800
65.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	997.790.000	1.082.790.000	44.595.599
66.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.526.000.000	10.559.000.000	1.912.286.079
67.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	672.694.335
68.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	128.294.400	80.408.628	69.741.800
69.	Program Pengembangan Kebudayaan	49.032.000	149.032.000	832.040.525
70.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	390.000.000	815.000.000	842.104.106
71.	Program Pembinaan Sejarah	69.560.000	89.560.000	18.476.950

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
72.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	126.260.000	126.260.000	3.150.000
73.	Program Pembinaan Perpustakaan	373.216.400	376.746.600	321.473.410
74.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	150.000.000	146.469.800	1.875.400
75.	Program Pengelolaan Arsip	94.000.000	76.399.379	44.879.550
76.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	31.000.000	30.970.000	8.961.250
77.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	65.884.524	59.802.167	4.402.300
78.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	488.674.147	59.937.983	347.942.050
79.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	52.687.050	45.730.725	184.807.300,00
80.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.025.277.151	7.148.498.151	5.361.884.929
81.	Program Pemasaran Pariwisata	1.938.642.743	1.722.789.293	1.482.145.417
82.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.513.685.000	1.537.623.600	44.644.200
83.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.115.952.020	7.544.593.917	15.776.911.646
84.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.239.078.709	2.549.630.661	6.487.161.358
85.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.535.729.404	1.560.729.404	1.427.088.195
86.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	145.000.000	247.459.500	214.313.500
87.	Program Penyuluhan Pertanian	876.753.600	1.124.753.600	1.288.163.880,00
88.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	2.000.000	2.000.000	3.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
89.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	450.822.285	373.302.326	254.968.405
90.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	81.690.000	73.009.687	80.539.110
91.	Program Pengembangan Ekspor	24.362.500	31.162.500	1.489.150
92.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	94.285.000	86.179.020	67.740.329
93.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	124.815.000	70.444.300	69.624.060
94.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	7.283.850.320	7.620.680.085	10.348.483.414
95.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	29.529.156.494	7.011.193.233	4.350.927.957
96.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.679.077.416	1.303.476.805	628.157.275
97.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	22.468.875.075	17.477.221.669	21.965.649.085
98.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	574.198.345	549.881.465	360.225.996
99.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	650.994.599	440.356.014	342.783.645
100.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	169.934.966.330	176.256.410.166	1.782.378.742
101.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.302.470.925	1.383.685.390	1.702.891.841

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
102.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	969.072.388	808.738.557	779.816.691
103.	Program Kepegawaian Daerah	1.951.703.545	1.366.569.329	975.569.353
104.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	479.173.700	473.899.700	340.451.143
105.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	845.275.735	1.200.275.735	671.717.078
106.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	40.000.000	30.450.000	89.764.554
107.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	792.085.073	725.352.423	22.687.900
108.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	117.013.600	111.823.800	1.980.000
109.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	61.898.900	51.017.000	0,00
110.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	518.140.526	461.775.477	40.492.500
111.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	761.379.130	609.133.897	27.138.350
112.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	50.000.000	83.282.000	150.597.050
113.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.686.297.120	16.473.459.590	28.032.850.162

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI 2024
114.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.000.000	1.870.000	26.172.755
115.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	16.322.880	1.197.280	1.445.000
116.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	514.064.400	705.702.790	864.816.788

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah

Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun 2024 Kabupaten Tanah Datar tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam bentuk Tugas Perbantuan.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini
b. Pendidikan Dasar
c. Pendidikan Kesetaraan

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terbaru sebagaimana yang diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 311 tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indek Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan telah dituangkan dalam Rapor Pendidikan setiap tahunnya. SPM Paud memiliki 9 indikator, SPM Pendidikan Dasar (SD dan SMP) memiliki 13 indikator dan Pendidikan Kesetaraan memiliki 13 indikator. Uraian indikator SPM masing-masing jenjang dan jenis pendidikan sebagai berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dasar perhitungan SPM Pendidikan Anak Usia Dini adalah jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar yaitu 7.801 orang.

Tabel 4.1

Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
1.	Angka Partisipasi sekolah	%	72.72	2024
2.	Angka Partisipasi Murni	%	68.55	
3.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	45.45	2024
4.	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D-IV)	%	78.09	2024
5.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	1.8	2024
6.	Kecukupan formasi guru ASN	%	49.34	2024

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
7.	Indeks distribusi guru	%	0.74	2024
8.	Proporsi PTK bersertifikat	%	51.53	2024
9.	Proporsi PTK penggerak	%	1.65	2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

b. Pendidikan Dasar

Dasar perhitungan SPM Pendidikan Dasar adalah jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar yaitu sebanyak 53.849 orang.

1) SD

Tabel 4.2

Target Pencapaian SPM Sekolah Dasar Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
1.	Angka partisipasi kasar	%	107.16	2024
2.	Angka partisipasi sekolah	%	90.83	2024
3.	Kemampuan literasi	Nilai	61.84	2024
4.	Kemampuan numerasi	Nilai	46.50	2024
5.	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	4.08	2024
6.	Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1.75	2024
7.	Indeks iklim keamanan	Nilai	73.29	2024
8.	Indeks ilkim kebinekaan	Nilai	73.4	2024
9.	Indeks ilkim inklusivitas	Nilai	56	2024
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	49.34	2024
11.	Indeks distribusi guru	%	0.39	2024
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	31.02	2024
13.	Proporsi PTK penggerak	%	0.54	2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

2) SMP

Tabel 4.3

Target Pencapaian SPM Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
1.	Angka partisipasi kasar	%	93.19	2024
2.	Angka partisipasi sekolah	%	96.23	2024
3.	Kemampuan literasi	Nilai	75.54	2024
4.	Kemampuan numerasi	Nilai	66.67	2024
5.	Perbedaan skor literasi	Nilai	4.41	2024

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
6.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.68	2024
7.	Indeks iklim keamanan	Nilai	71.62	2024
8.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73.79	2024
9.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.67	2024
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	44.96	2024
11.	Indeks distribusi guru	%	0.34	2024
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	45.69	2024
13.	Proporsi PTK penggerak	%	0.09	2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

c. Pendidikan Kesetaraan

Dasar perhitungan SPM Pendidikan Kesetaraan adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan yaitu sebanyak 1.313 orang.

Tabel 4.4

Target Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
1.	Angka partisipasi kasar	%	0	2024
2.	Angka partisipasi sekolah	%	58.25	2024
3.	Angka partisipasi murni	%	0	2024
4.	Kemampuan literasi	Nilai	0	2024
5.	Kemampuan numerasi	Nilai	0	2024
6.	Perbedaan skor literasi	Nilai	0	2024
7.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	2024
8.	Indeks iklim keamanan	Nilai	0	2024
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	0	2024
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	0	2024
11.	Indeks distribusi guru	%	0	2024
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	0	2024
13.	Proporsi PTK penggerak	%	0	2024
14.	Pengalaman pelatihan guru	%	0	2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

3. Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan

a) Pendidikan PAUD

Tabel 4.5

Hasil Capaian SPM Pendidikan PAUD

No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
	Jumlah Yang Harus Dilayani	**7.801**	**7.801**	**0**	**100%**
1.	Angka Partisipasi sekolah	72.61	72.61	0	100%
2	Angka partisipasi murni	68.55	68.55		
3.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	45.45	45.45	0	100%
4.	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	78.09	78.09	0	100%
5.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	1.8	1.8	0	100%
6.	Kecukupan formasi guru ASN	49.34	49.34	0	100%
7.	Indeks distribusi guru	0.74	0.74	0	100%
8.	Proporsi PTK bersertifikat	51.53	51.53	0	100%
9.	Proporsi PTK penggerak	1.65	1.65	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

b) Pendidikan Dasar

1) SD

Tabel 4.6

Hasil Capaian SPM Pendidikan SD

No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
	Jumlah Yang Harus Dilayani	53.849	53.849	0	100%
1.	Angka partisipasi kasar	107.16	107.16	0	100%
2.	Angka partisipasi sekolah	90.83	90.83	0	100%
3.	Kemampuan literasi	61.84	61.84	0	100%
4.	Kemampuan numerasi	46.50	46.50	0	100%
5.	Perbedaan Skor Literasi	4.08	4.08	0	100%
6.	Perbedaan Skor numerasi	1.75	1.75	0	100%
7.	Indeks iklim keamanan	73.29	73.29	0	100%
8.	Indeks ilkim kebinekaan	73.4	73.4	0	100%
9.	Indeks ilkim inklusivitas	56	56	0	100%
10.	Kecukupan	49.34	49.34	0	100%

No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
	formasi guru ASN				
11.	Indeks distribusi guru	0.39	0.39	0	100%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	31.02	31.02	0	100%
13.	Proporsi PTK Penggerak	0.54	0.54	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

2) SMP

Tabel 4.7

Hasil Capaian SPM Pendidikan SMP

No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
1.	Angka partisipasi kasar	93.19	93.19	0	100%
2.	Angka partisipasi sekolah	96.23	96.23	0	100%
3.	Kemampuan literasi	75.54	75.54	0	100%
4.	Kemampuan numerasi	66.67	66.67	0	100%
5.	Perbedaan skor literasi	4.41	4.41	0	100%
6.	Perbedaan skor numerasi	2.68	2.68	0	100%
7.	Indeks iklim keamanan	71.62	71.62	0	100%
8.	Indeks iklim kebinekaan	73.79	73.79	0	100%
9.	Indeks iklim inklusivitas	59.67	59.67	0	100%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	44.96	44.96	0	100%
11.	Indeks distribusi guru	0.34	0.34	0	100%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	45.69	45.49	0	100%
13.	Proporsi PTK penggerak	0.09	0.09	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

c) Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4.8

Hasil Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan

No.	Indikator	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia (Realisasi)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	% Capaian
	Jumlah yang harus dilayani	1.313	1.313	0	100%
1.	Angka partisipasi kasar	0	0	0	100%
2.	Angka partisipasi sekolah	58.25	58.25	0	100%
3.	Kemampuan literasi	0	0	0	100%

No.	Indikator	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia (Realisasi)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	% Capaian
4.	Kemampuan numerasi	0	0	0	100%
5.	Perbedaan skor literasi	0	0	0	100%
6.	Perbedaan skor numerasi	0	0	0	100%
7.	Indeks iklim keamanan	0	0	0	100%
8.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0	0	0	100%
9.	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0	100%
10.	Indeks distribusi guru	0	0	0	100%
11.	Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0	100%
12.	Proporsi PTK penggerak	0	0	0	100%
13.	Pengalaman pelatihan guru	0	0	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang Pendidikan tahun 2024 berjumlah Rp. 81.009.046.452.- adapun alokasi anggaran dan realisasi per program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan

NO	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			ALOKASI ANGGARAN (PERUBAHAN 2024)	KET
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN			**81,009,046,452**	
I	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**81,009,046,452**	
	A	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**47,468,959,410**	
		1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	245,057,590	
		2	Pembangunan Perpustakaan sekolah	577,904,554	
		3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	813,330,000	
		4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	426,000,000	
		5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	333,300,000	
		6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	557,900,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			ALOKASI ANGGARAN (PERUBAHAN 2024)	KET
		7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik sekolah Dasar	4,241,310,000	
		8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sekolah Dasar	55,985,000	
		9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33,407,100,000	
		10	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1,535,273,655	
		11	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1,617,027,500	
		12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	842,518,750	
		13	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	479,038,560	
		14	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	645,945,500	
		15	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2,168,775	
		16	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1,689,099,526	
	B	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama**		**22,978,877,157**	
		1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	293,973,000	
		2	Pembangunan Ruangan Unit Kesehatan Sekolah	461,980,000	
		3	Pembangunan Laboratorium Sekolah	329,489,451	
		4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	271,002,000	
		5	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	2,773,545,650	
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang unit kesehatan sekolah	89,488,788	
		7	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	506,866,800	
		8	Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium	644,749,324	
		9	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	670,895,834	
		10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	270,000,000	
		11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik sekolah Menengah Pertama	285,550,000	
		12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah	496,357,800	
		13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	17,272,750	
		14	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	1,532,023,750	

NO	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			ALOKASI ANGGARAN (PERUBAHAN 2024)	KET
		15	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	406,928,050	
		16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Pertama	10,917,500,000	
		17	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	260,716,602	
		18	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2,297,300,000	
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang guru/Kepala Sekolah/ TU	453,237,358	
	C	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**		**8,797,894,885**	
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	99,700,000	
		2	Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	262,375,000	
		3	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud	307,184,000	
		4	Penyelenggaraan Proses Belajar Paud	71,386,900	
		5	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Paud	2,649,449,400	
		6	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Paud	347,740,250	
		7	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Paud	23,144,895	
		8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,553,400,000	
		9	Pembangunan Ruangan Kelas Baru	458,514,440	
		10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	25,000,000	
	D	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**		**1,763,315,000**	
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	225,515,000	
		2	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	142,500,000	
		3	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	37,100,000	
		4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,358,200,000	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

5. Dukungan Personil

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu dinas besar yang jangkauan pelayanannya sampai ke jorong-jorong diseluruh wilayah kabupaten Tanah Datar. Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dinas

Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tanah Datar didukung oleh ribuan personil yang tersebar diseluruh jajaran dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Jumlah personil tersebut dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.10

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL		
		PNS	NON PNS	TOTAL
1	Dinas Dikbud	63	18	81
2	Pengawas	19	-	19
3	Penilik	12	-	12
4	TK	122	529	651
5	SD	2.270	439	2.709
6	SMP	712	102	814
7	SKB	17	77	94
	J u m l a h	3.215	1.165	4.380

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

6. Permasalahan dan Solusi

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal terhadap masyarakat, namun ada beberapa permasalahan antara lain :

Tabel 4.11

Permasalahan Dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan

No	Permasalahan	Solusi
1	**2**	**3**
1	Pengumpulan Data	
	Rapor pendidikan hanya menampilkan data dalam bentuk persentase dan tidak menampilkan data secara rinci sehingga menyulitkan kita mencari angka rill nya	Rapor pendidikan juga menampilkan data Rill
2	Perencanaan Dan Penganggaran	
	Penganggaran belum maksimal dalam pemenuhan SPM berdasarkan rapor pendidikan	Perencanaan dan penganggran didasarkan pada hasil rapor pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja SPM Urusan Pendidikan dari masing-masing bidang, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa pencapaian SPM Urusan Pendidikan telah mencapai 100%.

B. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan

d. Pelayanan kesehatan Balita

   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita adalah jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.

i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus adalah jumlah warga negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat terlayani kesehatan.
k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis
   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah jumlah warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
   Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan layanan kesehatan.

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Target Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%.

a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil = 100%
b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan = 100%
c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir = 100%
d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar = 100%
e. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar = 100%
f. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 100%
g. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 100%

h. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 100%
i. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 100%
j. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar = 100%
k. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar = 100%
l. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 100%

3. Realisasi

Dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang capaiannya didukung oleh beberapa program kegiatan, dapat dilihat targetnya pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12

Target Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**		**3313**	**3313**	**100**				**100**	**100**
	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)				3,313	3,313	100		
	2	Tablet tambah darah				596,340	596,340	100		
		(180 tablet x jumlah ibu hamil)								
	3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan				3,313	3,313	100		
	4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB				3,313	3,313	100		
	5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah				3,313	3,313	100		
	6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin				428	428	100		
		(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)								
	7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes				3,313	3,313	100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV								
	8	Kartu ibu/rekam medis ibu				3,313	3,313	100		
	9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)				3,313	3,313	100		
	10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3	3	100		
	11	Gel USG				276	276	100		
		(untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)								
	12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;				43	43	100		
		(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"								
	13	Tenaga kesehatan : Perawat				142	142	100		
		(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)								
	14	Tenaga kesehatan : Bidan				293	293	100		
		(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)								
	15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian				42	42	100		
	16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				35	35	100		
	17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)				2,458	2,458	100		
		(Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)								
2.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**		**3382**	**3382**	**100**				**100**	
	1	Formulir partograf				3,382	3,382	100		
	2	Kartu ibu/rekam medis ibu				3,382	3,382	100		
	3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)				3,382	3,382	100		
		(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)								
	4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3	3	100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi				43	43	100		
		(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)								
	6	Tenaga kesehatan : Bidan				293	293	100		
		(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)								
	7	Tenaga kesehatan : Perawat				142	142	100		
		(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)								
	8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian				42	42	100		
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				35	35	100		
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**		**3472**	**3472**	**100**				**100**	
	1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)				3,472	3,472	100		
	2	Vitamin K1 injeksi				3,472	3,472	100		
	3	Salep/tetes mata antibiotik				3,472	3,472	100		
	4	Formulir bayi baru lahir				3,472	3,472	100		
	5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)				3,472	3,472	100		
	6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)				3,472	3,472	100		
	7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3	3	100		
	8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak				43	43	100		
	9	Tenaga kesehatan : Bidan				293	293	100		
	10	Tenaga kesehatan : Perawat				142	142	100		
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian				42	42	100		
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku				29	29	100		
	13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				35	35	100		
	14	Kader Kesehatan				3,094	3,094	100		
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**		**17118**	**17118**	**100**				**100**	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku				34,236	34,236	100		
	2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)				34,236	34,236	100		
	3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)				17,118	17,118	100		
	4	Vitamin A Biru				1,354	1,355	100		
		(sesuai standar 6-11 bulan)								
	5	Vitamin A Merah				8,958	8,958	100		
		(sesuai standar 12-59 bulan)								
	6	Vaksin imunisasi dasar: BCG				640	640	100		
	7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes				2,270	2,270	100		
	8	Vaksin imunisasi dasar: IPV				2,270	2,270	100		
	9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib				2,349	2,349	100		
	10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella				918	918	100		
	11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib				261	261	100		
	12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella				102	102	100		
	13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)				13,277	13,277	100		
	14	Peralatan Anafilaktik				614	614	100		
	15	Formula Terapi Gizi Buruk				73	73	100		
	16	Tenaga medis : Dokter				40	40	100		
	17	Tenaga kesehatan : Bidan				293	293	100		
	18	Tenaga kesehatan : Perawat				142	142	100		
	19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				35	35	100		
	20	Guru PAUD				415	415	100		
	21	Kader Kesehatan				3,094	3,094	100		
5.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**		**17335**	**17335**	**100**				**100**	
	1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku				17,335	17,335	100		
		(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)								
	2	Form pencatatan/buku				17,335	17,335	100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pemantauan kesehatan								
		(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)								
	3	Kuesioner skrining kesehatan				17,335	17,335	100		
		(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)								
	4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah				17,335	17,335	100		
		(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)								
	5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah				17,335	17,335	100		
		(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)								
	6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah				928,408	928,408	100		
		(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)								
	7	Alat Pemeriksaan Hb				23	23	100		
		(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)								
	8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7				3,286	3,286	100		
		(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining								

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		anemia di sekolah SMP/sederajat)								
	9	Media promosi kesehatan				3	3	100		
		(Media khusus remaja sehat)								
	10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)				417	417	100		
		(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)								
	11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi				40	40	100		
	12	Tenaga kesehatan : Bidan				293	293	100		
	13	Tenaga kesehatan : Perawat				142	142	100		
	14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				35	35	100		
	15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian				42	42	100		
	16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat				39	39	100		
	17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru				479	479	100		
	18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu :Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor				2,284	2,284	100		
6.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**		**48598**	**48598**	**100**				**100**	
	1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3	3	100		
	2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)				211	211	100		
	3	Alat : Tensimeter				304	304	100		
	4	Alat : Glukometer				69	69	100		
	5	Alat: Alat Pemeriksa Hb				23	23	100		
	6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol				304	304	100		
	7	Alat : KIT IVA Tes				24	24	100		
	8	Strip dan Reagen				3,313	3,313	100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pemeriksaan Hb								
	9	Kit Opthalmologi Komunitas				20	20	100		
	10	Kuesioner PUMA				23	23	100		
		(Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)								
	11	Alat Pelayanan KB				50	50	100		
		Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)				23	23	100		
		Set Pemasangan dan Pencabutan Implan				23	23	100		
		Vasectomi Set				4	4	100		
	12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				1	1	100		
	13	Vaksin Tetanus Difteri (td)				4,000	4,000	100		
	14	Tenaga medis : Dokter				40	40	100		
	15	Tenaga kesehatan : Bidan				293	293	100		
	16	Tenaga kesehatan : Perawat				142	142	100		
	17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				35	35	100		
	18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat				29	29	100		
	19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu				3,150	3,150	100		
7.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**		**28793**	**28793**	**100**				**100**	
	1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter				23	23	100		
	2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah				23	23	100		
	3	Alat pemeriksaan kolesterol				23	23	100		
	4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol				23	23	100		
	5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan				23	23	100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)								
	6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya				28,793	28,793	100		
	7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3	3	100		
	8	Tenaga medis : Dokter				40	40	100		
	9	Tenaga kesehatan : Bidan				293	293	100		
	10	Tenaga kesehatan : Perawat				142	142	100		
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				35	35	100		
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat				39	39	100		
	13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu				3,094	3,094	100		
8.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**		**11742**	**11742**	**100**				**100**	
	1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				3	3	100		
		(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)								
	2	Obat Hipertensi				11,742	11,742	100		
	3	Tensimeter				304	304	100		
		(mengukur tekanan darah)								
	4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)				1	1	100		
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3	3	100		
		(peningkatan pengetahuan masyarakat)								
	6	Tenaga medis : Dokter				40	40	100		
	7	Tenaga kesehatan : Bidan				293	293	100		
	8	Tenaga kesehatan : Perawat				142	142	100		
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				35	35	100		
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku				29	29	100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian				42	42	100		
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat				23	23	100		
9.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**		**2756**	**2756**	**100**				**100**	
	1	Obat Diabetes Melitus				2,756	2,756	100		
	2	Fotometer atau Glukometer				69	69	100		
		(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)								
	3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet				2,756	2,756	100		
	4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)				3	3	100		
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3	3	100		
		(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)								
	6	Tenaga medis : Dokter				40	40	100		
	7	Tenaga kesehatan : Bidan				293	293	100		
	8	Tenaga kesehatan : Perawat				142	142	100		
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian				42	42	100		
	10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat				23	23	100		
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				35	35	100		
	12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)				21	21	100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
10.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**		**506**	**506**	**100**				**100**	
	1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)				23	23	100		
		bentuk fisik atau elektronik)								
	2	Penyediaan Psikofarmaka				2	2	100		
		(pengobatan/medikasi)								
	3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi				2	2	100		
		(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)								
	4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan				1	1	100		
		(pencatatan dan pelaporan)								
	5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3	3	100		
	6	Tenaga kesehatan : Dokter				40	40	100		
	7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa				23	23	100		
		(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)								
	8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.				225	225	100		
	9	Tenaga profesional lainnya				-	-	0		
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**		**3000**	**3000**	**100**				**100**	
	1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3,000	3,000	100		
	2	Reagen Zn TB				3,000	3,000	100		
	3	Masker bedah dan Masker N95				3,000	3,000	100		
	4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol				3,000	3,000	100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering								
	5	Katrid tes cepat molekuler				3,000	3,000	100		
	6	Formulir pencatatan dan pelaporan				3,000	3,000	100		
	7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)				35	35	100		
	8	Tuberkulin				566	566	100		
	9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru				37	37	100		
	10	Tenaga kesehatan : Perawat				35	35	100		
	11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian				35	35	100		
	12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat				27	27	100		
	13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)				27	27	100		
	14	Tenaga kesehatan : Radiografer				1	1	100		
	15	Kader Kesehatan				230	230	100		
12.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**		**3431**	**3431**	**100**				**100**	
	1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)				3,431	3,431	100		
	2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama				3,431	3,431	100		
	3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai				3,431	3,431	100		
	4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK				3,431	3,431	100		
	5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan				27	27	100		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)		PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		kelamin								
	6	Tenaga kesehatan : Bidan				27	27	100		
	7	Tenaga kesehatan : Perawat				27	27	100		
	8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)				27	27	100		
	9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat				27	27	100		
	10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan				27	27	100		

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024

4. Dukungan Personil

Jumlah Personil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.13

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan

No	Nama Fasyankes	Jumlah Tenaga
1	X KOTO I	33
2	X KOTO II	35
3	SINGGALANG	25
4	BATIPUH I	41
5	BATIPUH II	30
6	RAMBATAN I	36
7	RAMBATAN II	47
8	LIMA KAUM I	41
9	LIMA KAUM II	32
10	TANJUNG EMAS	48
11	PAGARUYUNG	24
12	LINTAU BUO	53
13	SUNGAYANG	38
14	SUNGAI TARAB I	36
15	SUNGAI TARAB II	30
16	GURUN	29
17	PARIANGAN	40
18	SALIMPAUNG	44
19	PADANG GANTING	39

No	Nama Fasyankes	Jumlah Tenaga
20	TANJUNG BARU	31
21	LINTAU BUO UTARA I	52
22	LINTAU BUO UTARA II	39
23	BATIPUH SELATAN	41
24	DINAS KESEHATAN	80
Total		**944**

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

2. Target Pencapaian SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Kab. Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

Tabel 4.14

Target SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Capaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	5.688	5.688	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	Jaringan Perpipaan					

	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1.422	1.422	0	100%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1.422	1.422	0	100%
	Bukan Jaringan Perpipaan					
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah tangga	0	0	0	100%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah tangga	0	0	0	100%
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	400	400	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	100	100	0	100%
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar	Rumah Tangga	0	0	0	100%

	individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T					
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	100	100	0	100%

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2024

3. Dukungan Personil

Jumlah Personil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2024 adalah sebanyak 15 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15

Jumlah Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	NAMA	JUMLAH (ORANG)
A.	Pegawai Negeri Sipil	
1.	Magister Teknik	**-**
2.	Sarjana Teknik	7
3.	Sarjana Muda	4
4.	SMA/Sederajat	**3**
B.	Pegawai Honor/Tenaga Kontrak	
1.	Pegawai Honor/Tenaga Kontrak	1
	Total	**15**

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2024

4. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.16

Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	**2**	**3**
1.	Pengumpulan Data	
	Tidak ada nya data by name by address yang valid	-
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	
	Masih belum optimalnya anggaran untuk kegiatan SPM	Dilakukan Penyesuaian target
4.	Pelaksanaan	
	Khusus untuk sanitasi masih kurang nya pemikiran masyarakat tentang sadar stunting	-
5.	Pelaporan	
	Tidak ada permasalahan	-
6.	Lain-Lain	
	Tidak ada permasalahan	-

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2024

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja SPM Urusan Pekerjaan Umum dari masing-masing bidang, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 100%.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kota.
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota.

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

Tabel 4.17

Target dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS DILAYANI)	BATAS WAKTU CAPAIAN (TAHU N)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota Kabupaten/Kota				Dinas Perkim LH
	1 Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	62	-	
	2 Mutu Barang/ Jasa			-	
	a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		2	-	
	b. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		0	-	
	c. Pemukiman kembali bagi korban bencana		60	-	
	d. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	-	
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Perkim LH
	1. Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	-	
	2 Mutu Barang/ Jasa				
	a. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan		0	-	
	b. Subsidi uang sewa		0	-	
	c. Penyediaan rumah layak huni		0	-	

Sumber: Dinas Perkim dan Lh Tahun 2024

3. Realisasi Pencapaian SPM Daerah

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.18

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
					JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSENTASE (%)
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota						100
	1.	Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	62	62	0	100
	2	Mutu Barang/ Jasa					0
		a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		2	2	0	100
		b. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		0	0	0	0
		c. Pemukiman kembali bagi korban bencana		60	60	0	100
		d. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		60	60	0	0
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota						100
	1.	Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0
	2	Mutu Barang/ Jasa					0
		a. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan		0	0	0	0
		b. Subsidi uang sewa		0	0	0	0
		c. Penyediaan rumah layak huni		0	0	0	0

Sumber: Dinas Perkim dan LH Tahun 2024

4. Dukungan Personil

Jumlah Personil pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan perumahan rakyat pada tahun 2024 sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.19

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JUMLAH (ORANG)
1	Sarjana Hukum	2
2	Sarjana Teknik Elektro	1
3	Sarjana Teknik Sipil	1
4	Sarjana Muda (A.Md) Akuntansi	1
5	SLTA	
	Total	5

Sumber: Dinas Perkim dan Lh Tahun 2024

5. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.20

Permasalahan dan Solusi

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Agak sulit melakukan pendataan pada lokasi rawan bencana melalui wawancara karena kejenuhan masyarakat terhadap kegiatan pendataan rumah	Memberikan penjelasan kepada masyarakat dibantu oleh pihak Pemerintahan Nagari agar masyarakat bersedia untuk dilakukan pendataan
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	penghitungan kebutuhan baru dilakukan setelah adanya penetapan bencana	Melakukan perhitungan kebutuhan sesuai anggaran yang tersedia
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	
	- Karena pemenuhan SPM terkait bencana maka agak sulit untuk membuat perencanaan karena tidak bisa memprediksi kejadian bencana - Terbatasnya anggaran	- Tetap dianggarkan kegiatan untuk penunjang SPM - Memberikan penjelasan kepada TAPD terkait kewajiban pemenuhan SPM
5.	Pelaporan	
	- Pelaporan melalui aplikasi e-SPM masih terkendala	- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaporan SPM

Sumber: Dinas Perkim dan Lh Tahun 2024

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Trantibum dan Linmas di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah SATPOL PP dan DAMKAR dan Badan Penanggulangan Bencana.

Berikut diuraikan urusan trantibum dan linmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar:

1. Jenis Pelayanan Dasar

A. Trantibum (Satpol-PP) dan Damkar

Pelayanan Dasar yang diampu oleh Satuan Polisi pamong Paraja dan Pemadam Kebakaran Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi kabupaten/kota adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Meteri dalama Negeri nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran
2. Pelayanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar)
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)

B. Kebencanaan (BPBD)

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2. Target Pencapaian SPM

A. Trantibum (Satpol-PP) dan Damkar

Tabel 4. 21

Target SPM Sub Urusan Trantibum (Satpol-PP) dan Damkar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	**Pelayanan Ketentraman dan KetertibanUmum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi**	**Capaian Penegakan Perda Sesuai Mutudan pelayanan Ganti Rugi**			
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan kerugian materil akibat dari penegakan	100 %	Tahun 2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		Hukum Perda dan Perkada			
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan kerugian pengobatan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	Tahun 2024	
II	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu**	**Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu**			
	1. Penegakan Perda sesuai SOP	Jumlah Penegakan Perda sesuai dengan SOP	100 %	Tahun 2024	
	2. Pelaksanaan penegakan Perda sesuaidengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesua istandar	Jumlah pelaksanaan penegakan sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	100%	Tahun 2024	
	3. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	Jumlah pelaksanaan Penegaka Perda menggunakan Sarpras sesuai standar	100%	Tahun 2024	
III	**Pelayanan informasi rawan bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**			
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana				
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana				
	3. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana				
	4. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana				
	5. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)		SKPD Penanggung Jawab
	jenis bencana					
IV	**Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana**		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiap siagaan terhadap bencana**			
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana					
V	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**			
	1. Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
	2. Pendataan terhadap warga yangterkena/menjadi korban bencana					
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana					
	4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana					
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana					
VI	**Pelayanan Penyeleamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran**			
	1. Layanan penyelamatan dan evakuas imelalui pendataan dan verifikasif aktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71,23%	Tahun 2024	
	2. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan		Jumlah warga negara yang terlayani pengurusan surat keterangan korban kebakaran	0	Tahun 2024	

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

B. Kebencanaan (BPBD)

Tabel 4. 22

Target SPM Sub Urusan Kebencanaan (BPBD)

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/ legal	100%	2024
	b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	2024
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persetase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/ legal	100%	2024
	b. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/ legal	80%	2024
	c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	2024
	d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yag ikut pelatihan	100%	2024
	e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	2024
	f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	2024
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	a. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%	-
	b. Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana	100%	2024
	c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase (%) jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	100%	2024
	d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	2024

Sumber: BPBD Tahun 2024

3. Realisasi Pencapaian SPM

A. Trantibum (Satpo-PP)

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.23

Realisasi dan Penerapan SPM Trantibum

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSENTASE (%)
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar				100
	1. Yang Harus Terlayani		1	1	-	100
	2 Mutu Barang/ Jasa					
	a. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada		364	245	-	67.31
	b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada		6	6	0 -	100
	c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM		**61**	**29**	32	47.54
	d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal		**1**	**1**	0	100
	e. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		**1**	**1**	0	100
	f. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan		**1**	**1**	0	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

B. **Damkar**

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Damkar, sebagai berikut:

Tabel 4.24

Realisasi SPM Damkar

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
					JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSENTASE (%)
I	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**						100%
	1.	Yang Harus Terlayani		40	40	0	100%
	2	Mutu Barang/ Jasa					100%
		a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi		73 kali	52 kali	21 kali	71,23%
		b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		6 SOP	6 SOP	0	100%
		c. Sarana prasarana pemadam kebakaran		336 Item	225 Item	111 Item	66,96%
		d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia		55	53	2	96.36
		e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran		123	123	0	100
		f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran		1	1	0	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

C. **Kebencanaan (BPBD)**

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebencanaan, sebagai berikut:

Tabel 4.25

Realisasi dan Penerapan SPM Kebencanaan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HRUS DILAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH YANG BELUM DITANGANI	PERSENTASE(%)
I	**Pelayanan informasi rawanbencana**	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	**122.405**	**380.727**	**0**	**100**
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana		1	1	0	100
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana		75	75	0	100
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana		122.405	122.405	0	100
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana		1	1	0	100
II	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**122.405**	**122.405**	**0**	**100**
	1 Sarana prasarana penanggulangan bencana		3	3	0	100
	2 Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)		50	50	0	100
III	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**122.405**	**122.405**	**0**	**100**
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		1	1	0	100
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana		2.092	2.092	0	100
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana		1	1	0	100
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas		0	0	0	100
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		1	1	0	0

Sumber: BPBD Tahun 2024

4. Alokasi Anggaran

A. Trantibum (Satpol-PP) dan Damkar

Anggaran yang dialokasi untuk pencapaian SPMSatpol PP dan Damkar tahun 2024 adalah sbb:

Tabel 4. 26

Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Trantibum (Satpol-PP) dan Damkar

N o	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN
1	2	3
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.188.000
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pekaksanaan patroli pengamanan dan pebgawalan	61.385.000
2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban atas Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	62.878.000
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	925.000
4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	-
	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	**891.076.955**
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	-
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	891.076.959
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**7.000.000**
1	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	7.000.000
	Pencegahan pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota	1.570.841.080
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.064.000
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.392.727.750
3	Pengadaan Saana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	175.049.330
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**0**
1	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	0
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	**0**
2	Pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	0

N o	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN
	Investigasi Kejadian Kebakaran	**0**
1	Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian, pengujian, penyebab kejadian kebakaran	0

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

B. Kebencanaan (BPBD)

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 bersumber dari dana APBD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 27

Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Bencana pada BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	**Rp. 5.687.500**
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Rp. 0
	b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Rp. 5.687.500
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Rp. 559.844.300**
	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Rp. 11.328.000
	b. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Rp. 0
	c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Rp. 10.958.500
	d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 0
	e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 427.057.800
	f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 110.500.000
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Rp. 4.504.484.538**
	a. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Rp. 0
	b. Respon Cepat Darurat Bencana	Rp. 4.504.484.538
	c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp. 0
	d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 0

Sumber: BPBD Tahun 2024

5. Dukungan Personil

A. Trantibum (Satpol-PP) dan Damkar

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas didukung oleh 121 orang anggota terdiri dari:

Tabel 4. 28

Daftar Pegawai ASN Dan Pegawai Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	41 orang
2	PPPK	20 orang
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	60 orang

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar lebih sedikit Pegawai Negeri Sipil (ASN) dibandingkan dengan Tenaga Harial Lepas (THL).

Tabel 4. 29

Eselon Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Eselonisasi	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II/b	1 orang	PNS
2	Eselon III/a	1 orang	PNS
3	Eselon III/b	3 orang	PNS
4	Eselon IV/a	7 orang	PNS
4	Fungsional Tertentu	1 orang	PNS
5	Fungsional Umum	28 orang	PNS
6	Pemadam Pemula	20 orang	PPPK
7	Tenaga Harian Lepas	60 orang	THL
	Jumlah	121 orang	

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

B. Kebencanaan (BPBD)

Pelaksanaan SPM sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar didukung oleh personil dengan jumlah 38 orang, yang terdiri dari 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 Orang Tenaga Harian Lepas (THL).

6. Permasalahan dan Solusi

A. Trantibum (Satpol-PP) dan Damkar

Permasalahan:

1. Belum semua mutu layanan terpenuhi, karena belum lengkap nya sarana dan prasarana sesuai dengan standar layanan
2. Belum semua Nagari membentuk relawan kebakaran

3. Belum tersedia anggaran yang memadai untuk mencapai target SPM
4. Kurangnya SDM dalam pencapaian target
5. Kualitas SDM yang belum memadai

Solusi :

1. Menentukan target SPM yang diselaraskan dengan target pusat dan propinsi
2. Memberikan pelatihan pada personil untuk pencapaian SDM
3. Menganggarkan kegiatan untuk pencapaian target SPM Menyiapkan sarana dan prasarana

B. Kebencanaan (BPBD)

Permasalahan Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Bencana Tahun 2024 adalah :

a. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan kebencanaan.
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana
c. Belum sinerginya upaya implementasi Standar Pelayanan Minimal Solusi
d. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayana Minimal (SPM) Bidang Bencana sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara/masyarakat.
e. Menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana.
f. Melakukan upaya implementasi penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) secara sinergi

F. URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 Bidang Sosial sebagai berikut:

Tabel 4.30

Target Penerapan SPM Urusan Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS DILAYANI)	BATAS WAKTU CAPAIAN (TAHUN)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2		3	4	5	6
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		2024	Dinas Sosial
	1	Yang Harus Terlayani		185	2024	
	2	Mutu Barang/ Jasa			2024	
		1 . Layanan data dan pengaduan		0	2024	
		2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti		0	2024	
		3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru		0	2024	
		4 . Penyediaan permakanan		185	2024	
		5 . Penyediaan sandang		0	2024	
		6 . Penyediaan alat bantu		0	2024	
		7 . Penyediaan perbekalan kesehatan		0	2024	
		8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		0	2024	
		9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas		0	2024	

		terlantar				
		10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	2024	
		11 . Akses ke layanan pendidikan		0	2024	
		12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		0	2024	
		13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		0	2024	
		14 . Layanan rujukan		0	2024	
		15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan		0	2024	
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		2024	Dinas Sosial
	1	Yang Harus Terlayani		52	2024	
	2	Mutu Barang/ Jasa			2024	
		1 . Layanan data dan pengaduan		0	2024	
		2 . Penyediaan permakanan		0	2024	
		3 . Penyediaan sandang		0	2024	
		4 . Penyediaan alat bantu		0	2024	
		5 . Penyediaan perbekalan kesehatan		0	2024	
		6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		0	2024	
		7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar		0	2024	
		8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	2024	
		9 . Akses ke layanan pendidikan		0	2024	
		10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		0	2024	
		11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		0	2024	
		12 . Layanan rujukan		0	2024	

		13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti		0	2024	
		14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru		0	2024	
		15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan		0	2024	
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		2024	Dinas Sosial
	Yang Harus Terlayani			166	2024	
	Mutu Barang/ Jasa				2024	
	1. Layanan data dan pengaduan			0	2024	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti			0	2024	
	3. Penyediaan permakanan			166	2024	
	4. Penyediaan sandang			0	2024	
	5. Penyediaan alat bantu			0	2024	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan			0	2024	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual			0	2024	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar			0	2024	
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak			0	2024	
	10. Akses ke layanan pendidikan			0	2024	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			0	2024	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			0	2024	
	13. Layanan rujukan			0	2024	

	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan			0	2024	
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru			0	2024	
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		2024	Dinas Sosial
	1	Yang Harus Terlayani		0	2024	
	2	Mutu Barang/ Jasa		0	2024	
		1 . Layanan data dan pengaduan		0	2024	
		2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti		0	2024	
		3 . Penyediaan permakanan		0	2024	
		4 . Penyediaan sandang		0	2024	
		5 . Penyediaan alat bantu		0	2024	
		6 . Penyediaan perbekalan kesehatan		0	2024	
		7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		0	2024	
		8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar		0	2024	
		9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak		0	2024	
		10 . Akses ke layanan pendidikan		0	2024	
		11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		0	2024	
		12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		0	2024	
		13 . Layanan rujukan		0	2024	
		14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus		0	2024	

		layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan				
		15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru		0	2024	
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		2024	Dinas Sosial
	1	Yang Harus Terlayani		261	2024	
	2	Mutu Barang/ Jasa			2024	
		1 . Penyediaan permakanan		0	2024	
		2 . Penyediaan sandang		0	2024	
		3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi		0	2024	
		4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan		261	2024	
		5 . Pelayanan dukungan Psikososial		0	2024	

Sumber: Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2024

3. Realisasi Penerapan SPM

Realisasi terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.31

Realisasi Penerapan SPM Urusan Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
					JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSENTASE (%)
1	2		3	4	5	6	7
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100%
	1.	Yang Harus Terlayani		185	185	0	100%
	2	Mutu Barang/ Jasa					
		1 . Layanan data		0	0	0	100 %

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	7
	dan pengaduan					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti		0	0	0	100 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru		0	0	0	100 %
	4 . Penyediaan permakanan		185	185	0	100 %
	5 . Penyediaan sandang		0	0	0	100 %
	6 . Penyediaan alat bantu		0	0	0	100 %
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan		0	0	0	100 %
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		0	0	0	100 %
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar		0	0	0	100 %
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		0	0	0	100 %
	11 . Akses ke layanan pendidikan		0	0	0	100 %
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		0	0	0	100 %
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		0	0	0	100 %
	14 . Layanan rujukan		0	0	0	100 %

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	7
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan		0	0	0	100 %

Sumber: Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2024

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Dinas Sosial dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.32

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	0	0	0%
			Penyediaan Permakanan	750.000.000	702.000.000	93,60%
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0	0	0%
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	456.094.819	397.111.600	87,07%
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.185.410.000	934.429.000	78,83%
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0%
2.	Program Penanganan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Penyediaan Makanan	0	0	0%
			Penyediaan Sandang	0	0	0%

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Bencana	dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	121.644.000	109.174.000	89,75%

Sumber: Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2024

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Dinas Sosial dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.33

Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Sosial

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	1	
	Sekretariat		
2	Sekretaris	1	
3	Perencana Ahli Muda	1	
4	Analis Kebijakan Ahli Muda	1	
5	Analis Perencanaan dan Program Kegiatan	1	
6	Pengadministrasi Umum	2	
7	Penata Laporan Keuangan	1	
8	Bendahara	1	
9	Verifikator Keuangan	1	
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	
11	Pengemudi	1	
	Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial		
12	Kabid	1	
13	Pekerja Sosial Madya	1	
14	Pekerja Sosial Ahli Muda	3	
15	Pekerja Sosial Penyelia	2	
16	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1	
17	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin.	1	
18	Kabid.	1	
19	Pekerja Sosial Ahli Muda	3	
20	Pekerja Sosial Ahli Pertama	2	
	Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
21	Kabid.	1	

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
22	Analis Kebijakan Ahli Muda	2	
23	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	
	Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		
24	Kabid.	1	
25	Analis Kebijakan Ahli Muda	2	
26	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	1	
27	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	

Sumber: Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2024

Berdasarkan Tabel Dukungan Personil Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan pemenuhan SPM Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa personil berupa ASN terdiri dari 36 orang.

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan *progress report* dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dan sumber dana lainnya (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) serta kerja sama dengan pihak lainnya.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, semoga dapat memberikan informasi dan penjelasan kepada seluruh *stakeholder* sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik demi kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajiannya, terima kasih.

Batusangkar, Maret 2025